

**PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN
YANG BERTUMPU PADA SWADAYA MASYARAKAT
DI KOTA MAGELANG**

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh

**BOWO ADRIANTO
L4D005051**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN
YANG BERTUMPU PADA SWADAYA MASYARAKAT
DI KOTA MAGELANG**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**BOWO ADRIANTO
L4D005051**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 30 November 2006

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, November 2006

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Hadi Wahyono, MA

Ir. Nany Yulastuti, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, November 2006

BOWO ADRIANTO
NIM : L4D005051

TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN
UNTUK ORANG-ORANG YANG AKU SAYANGI

Kedua Orangtuaku
Isteriku tercinta Erni Kurniartati
Anakku tersayang Nadia Bernika Puteri

ABSTRAK

Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat Kota Magelang salah satunya dipenuhi melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP). Program ini bertujuan mengajak masyarakat untuk berswadaya secara aktif dalam tahap-tahap kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Pada kenyataannya swadaya yang terkumpul di masyarakat pada setiap tahunnya justru semakin turun. Anggaran stimulan yang telah diberikan ternyata belum dapat memancing swadaya masyarakat secara maksimal dalam membangun prasarana lingkungan.

Penelitian ini bertujuan selain untuk melakukan kajian persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman juga akan mengkaji partisipasi swadaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan prasarana dasar permukiman masyarakat melalui Program P2DP di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang. Adapun sasaran penelitian ini adalah mengkaji persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Sedangkan partisipasi dikaji melalui respon masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman.

Pendekatan studi dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan baik melalui data primer maupun sekunder. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat distribusi frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus pada organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat RT, RW dan LPM yang paling sering dilibatkan dalam menyusun usulan rencana kegiatan pembangunan. Masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan masukan baik berupa saran maupun pendapat. Terhadap hasil pembangunan pada dasarnya masyarakat merasa cukup puas dan merasakan manfaatnya. Besarnya stimulan yang diberikan oleh pemerintah belum menjamin nilai swadaya yang diberikan oleh masyarakat juga semakin besar. Besarnya swadaya yang diberikan masyarakat masih sangat tergantung dengan kondisi kemampuan masyarakat dan partisipasi mereka terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman. Disisi lain juga diperoleh kenyataan bahwa kelurahan dengan tingkat swadaya tinggi belum tentu dalam setiap tahapan pembangunan prasarana dasar permukiman berjalan lebih baik dari pada kelurahan yang memiliki tingkat swadaya yang lebih rendah.

Sebagai rekomendasi hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan persepsi dan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman maka sosialisasi tetap harus dilaksanakan secara intensif dan didalam menentukan jenis kegiatan pembangunan hendaknya selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat gotong royong dan kebebasan masyarakat untuk menentukan jenis swadaya.

Kata Kunci : Persepsi dan Partisipasi

ABSTRACT

One of the housing basic infrastructures providing for Magelang community has facilitated by the Housing Basic Infrastructure Improvement Program (Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman/ P2DP). This program is aim to invite community to actively self-supporting the development of the housing basic infrastructure in their neighborhood. In fact, the number of self-supporting effort in the community is decreasing year by year. The stimulant budget given still can't initiate the community self-supporting effort in building their neighborhood infrastructure.

This research goal are to identify the community perception towards the housing basic infrastructure development and to identify the community participation in providing the community housing basic infrastructure needs through the P2DP Program in Magersari, Kramat and Potrobangsari Village in Magelang Municipality. As for the research, objectives are to identify the community perception towards the program planning process, development implementation and the usage of the development outcome. As for the participation is investigated through the community response towards the housing basic infrastructure development implementation.

The study approach in this study is based on the empiric condition found in the study field. The data compilation is conducted both through the primary and secondary data. Analysis used in this research is descriptive qualitative using the frequency distribution tools.

The research result shows that the committee on the community social organization in the RT, RW and LPM (Community Empowerment Organization) is the parties, which are often participated in development planning process. Community is not quite active in giving input, both in the form of suggestion and opinion toward the development results. Basically, community feels satisfied enough. Amount of the stimulant given by government is not quarantine the community self-supporting effort is greater than before. Level of self-supporting effort by community is still depending on the community capability and participation towards the housing basic infrastructure development. On the other side, it is find out that the village with the high level of self-supporting effort is not always better in supporting the housing basic infrastructure development than the low-level one.

As the research recommendation, it is suggested to improve the perception and participation of community self-supporting effort in the development of housing basic infrastructure. Therefore, socialization should implemented intensively in determining the form of development accordingly to the community needs, mutual assistance and community freedom in self supporting effort choices.

Keywords: *Perception and participation.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Tesis dengan judul **“Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah turut membantu selama proses penyusunan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA, selaku Ketua Program Pasca Sarjana pada Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
2. Ibu Ir. Nany Yulastuti, MSP, selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan masukan, saran, pendapat dan kekayaan materi.
3. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Pembimbing Pendamping, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan tuntunan selama proses penyusunan Tesis.
4. Ibu Ir. Retno Susanti, MT selaku pembahas, yang telah memberikan masukan, saran dan pendapatnya untuk penyempurnaan dalam penyusunan Tesis.
5. Ibu Ir. Sunarti, MT selaku penguji, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk penyempurnaan Tesis.
6. Walikota Magelang, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana (S2).
7. Ayahanda (Alm) dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan dan doa selama penulis melaksanakan tugas belajar.
8. Istri dan anakku tersayang, yang selalu setia dalam memberi dorongan dan dukungan bagi penyelesaian Tesis ini.
9. Teman-teman Angkatan 28 yang telah memberikan dukungan dan menciptakan kerjasama yang baik selama proses belajar.

Pada kesempatan ini pula Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada penyusunan Tesis ini. Guna penyempurnaan Tesis ini, kritik dan saran tetap kami harapkan dari semua pihak.

Semarang, November 2006
Penulis,

Bowo Adrianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Sasaran	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial	12
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial	13
1.6 Kerangka Pemikiran	22
1.7 Metodologi Penelitian.....	25
1.7.1 Jenis Penelitian	25
1.7.2 Jenis Data	25
1.7.3 TeknikPengumpulan Data	29
1.7.4 Metode Analisa	30
1.7.5 Teknik Pengambilan Sampel	31
1.7.6 Analisis Penelitian	33
1.8 Sistematika Penulisan	34
 BAB II KAJIAN LITERATUR PERSEPSI DAN PARTISIPASI	
MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN	
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN	38
2.1 Persepsi Masyarakat	38
2.2 Pembangunan	40
2.3 Prasarana Dasar Permukiman	42
2.3.1 Pengertian Sarana dan Prasarana	42
2.3.2 Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana	43
2.3.3 Komponen Sarana dan Prasarana	44
2.3.4 Stakeholder yang Terlibat dalam Pembangunan	47

2.4	Permukiman	49
2.4.1	Pengertian Permukiman	49
2.4.2	Pembangunan Permukiman Bertumpu pada Masyarakat	52
2.4.3	Tipe-tipe permukiman	56
2.5	Swadaya Masyarakat	57
2.5.1	Pengertian Swadaya	57
2.5.2	Pembangunan Bertumpu pada Swadaya Masyarakat	58
2.5.3	Pengembangan Dana	59
2.6	Partisipasi Masyarakat	60
2.6.1	Pengertian Partisipasi	60
2.6.2	Tipe Partisipasi	62
2.6.3	Tingkatan Partisipasi	62
2.6.4	Faktor Internal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	65
2.7	Pembangunan Prasarana Berbasis pada Masyarakat	69
2.8	Rangkuman Kajian Teori	74
BAB III	GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG	77
3.1	Kondisi Umum Kota Magelang	77
3.1.1	Letak Geografis	77
3.1.2	Pemerintahan	79
3.1.3	Penduduk Kota Magelang	80
3.2	Kondisi Umum Obyek Penelitian	82
3.2.1	Luas Wilayah dan Batas Administrasi	82
3.2.2	Penduduk pada Obyek Penelitian	83
3.2.3	Tingkat Pendidikan Penduduk	85
3.2.4	Banyaknya Rumah	86
3.3	Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP)	87
3.3.1	Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	87
3.3.2	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program P2DP	90
3.3.3	Ruang Lingkup Program P2DP	92
3.3.4	Mekanisme Pengelolaan Program P2DP	93
3.3.5	Pelaksanaan Program P2DP pada Lokasi Penelitian	97
3.4	Deskripsi Responden	112
BAB IV	ANALISA PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN DI KOTA MAGELANG	127
4.1	Persepsi Masyarakat terhadap Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	127

4.2	Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	139
4.2.1	Peran Serta Masyarakat	141
4.2.2	Jenis Kegiatan	147
4.3	Persepsi Masyarakat terhadap Hasil Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	152
4.4	Partisipasi Swadaya Masyarakat Sebagai Respon dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	163
4.5	Analisa Perbandingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman pada Obyek Penelitian	177
4.5.1	Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman.....	177
4.5.2	Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	180
4.5.3	Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Hasil Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	184
4.5.4	Perbandingan Partisipasi Swadaya Masyarakat sebagai Respon dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	187
BAB V	PENUTUP	195
5.1	Kesimpulan	195
5.2	Rekomendasi	198
	DAFTAR PUSTAKA	200
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Rekapitulasi Swadaya Masyarakat pada Program P2DP Tahun 2002 – 2004 di Kota Magelang.....	8
TABEL I.2	: Kebutuhan Data	28
TABEL I.3	: Jumlah Responden di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari	33
TABEL II.1	: Variabel Penelitian	75
TABEL III.1	: Luas Tanah Menurut Penggunaannya di Kota Magelang Tahun 2004	78
TABEL III.2	: Jumlah Penduduk dan Kepadatannya di Kota Magelang Tahun 2004	81
TABEL III.3	: Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari Tahun 2004	85
TABEL III.4	: Banyaknya Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari Tahun 2004	86
TABEL III.5	: Banyaknya Rumah Menurut Jenis Bangunannya di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari Tahun 2004	87
TABEL III.6	: Jenis Kegiatan Program P2DP Di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang Tahun 2001 – 2004.....	101
TABEL III.7	: Rekapitulasi Swadaya Masyarakat pada Program P2DP di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari Tahun 2002 - 2004.....	106
TABEL III.8	: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	113
TABEL III.9	: Jumlah Responden Berdasarkan Umur	114
TABEL III.10	: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	115
TABEL III.11	: Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang menjadi Tanggungan	116
TABEL III.12	: Jumlah Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah	117
TABEL III.13	: Jumlah Responden Berdasarkan Luas Tanah yang Dimiliki	118
TABEL III.14	: Jumlah Responden Berdasarkan Luas Bangunan yang Dimiliki	119
TABEL III.15	: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Bangunan	120
TABEL III.16	: Jumlah Responden Berdasarkan Lama Tinggal	121
TABEL III.17	: Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	123

TABEL III.18	:	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	123
TABEL III.19	:	Rekapitulasi Karakteristik Responden	124
TABEL IV.1	:	Frekuensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan	130
TABEL IV.2	:	Persepsi Masyarakat terhadap Prosedur Penyusunan Usulan Kegiatan Pembangunan	132
TABEL IV.3	:	Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan	134
TABEL IV.4	:	Persepsi Masyarakat terhadap Waktu yang diperlukan untuk Merealisasikan Usulan Kegiatan	137
TABEL IV.5	:	Frekuensi Kehadiran dalam Pertemuan	142
TABEL IV.6	:	Keaktifan dalam Berdiskusi	144
TABEL IV.7	:	Keanggotaan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan	146
TABEL IV.8	:	Frekuensi Kegiatan Kerja Bakti	148
TABEL IV.9	:	Frekuensi Kehadiran dalam Kegiatan Kerja Bakti	150
TABEL IV.10	:	Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Hasil Pembangunan dengan Kebutuhan Masyarakat	154
TABEL IV.11	:	Persepsi Masyarakat terhadap Kepuasan Hasil Pembangunan	156
TABEL IV.12	:	Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Program P2DP ..	158
TABEL IV.13	:	Persepsi Masyarakat terhadap Jumlah Dana Stimulan	160
TABEL IV.14	:	Persepsi Masyarakat terhadap Kelanjutan Program P2DP	162
TABEL IV.15	:	Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Hasil Pembangunan dengan Usulan dan Pendapat Masyarakat	165
TABEL IV.16	:	Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Kegiatan Kerja Bakti	167
TABEL IV.17	:	Frekuensi Pemberian Bantuan/Sumbangan Berupa Uang	169
TABEL IV.18	:	Frekuensi Pemberian Bantuan/Sumbangan Berupa Material Bangunan	171
TABEL IV.19	:	Frekuensi Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Kerja Bakti	173
TABEL IV.20	:	Kemampuan Masyarakat dalam Membayar Iuran Pembangunan	175
TABEL IV.21	:	Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman.....	178
TABEL IV.22	:	Penilaian Persepsi Masyarakat terhadap Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	179
TABEL IV.23	:	Analisa Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	180
TABEL IV.24	:	Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	182

TABEL IV.25	:	Penilaian Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	183
TABEL IV.26	:	Analisa Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	184
TABEL IV.27	:	Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Hasil Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	185
TABEL IV.28	:	Penilaian Persepsi Masyarakat terhadap Hasil Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	186
TABEL IV.29	:	Analisa Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Hasil Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	187
TABEL IV.30	:	Perbandingan Partisipasi Swadaya Masyarakat sebagai Respon dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	189
TABEL IV.31	:	Penilaian Partisipasi Swadaya Masyarakat sebagai Respon dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman.....	190
TABEL IV.32	:	Analisa Perbandingan Partisipasi Swadaya Masyarakat sebagai Respon dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	191
TABEL IV.33	:	Perbandingan Persentase Jenis Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	191
TABEL IV.34	:	Analisa Perbandingan Proses Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman	192

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Peta Administrasi Kota Magelang	16
GAMBAR 1.2	: Peta Admnistrasi Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang	17
GAMBAR 1.3	: Peta Administrasi Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang	18
GAMBAR 1.4	: Peta Admnistrasi Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang	19
GAMBAR 1.5	: Peta Administrasi Kelurahan Kramat, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang	20
GAMBAR 1.6	: Peta Administrasi Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang	21
GAMBAR 1.7	: Diagram alur pemikiran studi persepsi dan partisipasi swadaya masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP) di Kota Magelang.....	24
GAMBAR 1.8	: Analisis Persepsi dan Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu pada Swadaya Masyarakat.....	35
GAMBAR 2.1	: Unsur Permukiman Modern	52
GAMBAR 3.1	: Peta Kawasan Permukiman di Kota Magelang	88
GAMBAR 3.2	: Mekanisme Usulan dalam Musrenbang	90
GAMBAR 3.3	: Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Program P2DP.	94
GAMBAR 3.4	: Suasana penyusunan daftar skala prioritas untuk pemba- ngunan prasarana dasar permukiman	95
GAMBAR 3.5	: Beberapa tim survey sedang meninjau kelayakan usulan kegiatan pembangunan Progam P2DP di lokasi usulan	96
GAMBAR 3.6	: Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Permukiman	99
GAMBAR 3.7	: Pembuatan Saluran dan Gorong-gorong di RW 08, Kelurahan Magersari pada kondisi fisik 50% dan 100% ...	100
GAMBAR 3.8	: Pembuatan Saluran di RW 11 (RSJ), Kelurahan Kramat dengan kondisi fisik 0% dan 100%	102
GAMBAR 3.9	: Rehab Saluran di RT 10 / RW 02, Kelurahan Potrobang- sari dengan kondisi fisik 0% dan 100%	102
GAMBAR 3.10	: Pengerukan Walet di RT 01/RW 01, Kelurahan Potro- bangsari, dengan kondisi fisik 25% dan 100%	102
GAMBAR 3.11	: Betonisasi Jalan di RT 11 RW 01, Kelurahan Potrobang- sari, dengan kondisi fisik 0% dan 100%	103

GAMBAR 3.12	: Pavingisasi Jalan di RT 08 RW 07, Kelurahan Potrobangsang, dengan kondisi fisik 0% dan 100%	103
GAMBAR 3.13	: Pengaspalan Jalan di RT 01 RW 04, Kelurahan Potrobangsang, dengan kondisi fisik 0% dan 100%	103
GAMBAR 3.14	: Pavingisasi jalan di RW VI, Kelurahan Kramat dengan kondisi fisik 0%, 50% dan 100%	104
GAMBAR 3.15	: Rehab Saluran dan Talud di RT 10/RW 02, Kelurahan Potrobangsang, dengan kondisi fisik 0% dan 100%	104
GAMBAR 3.16	: Pembangunan Talud di RW 12, Kelurahan Magersari dengan kondisi fisik 0%, 50% dan 100%	104
GAMBAR 3.17	: Peta Swadaya Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsang Kota Magelang	107
GAMBAR 3.18	: Peta Prosentase Nilai Kegiatan pada Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsang Kota Magelang Tahun 2001	108
GAMBAR 3.19	: Peta Prosentase Nilai Kegiatan pada Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsang Kota Magelang Tahun 2002	109
GAMBAR 3.20	: Peta Prosentase Nilai Kegiatan pada Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsang Kota Magelang Tahun 2003	110
GAMBAR 3.21	: Peta Prosentase Nilai Kegiatan pada Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsang Kota Magelang Tahun 2004	111
GAMBAR 4.1	: Persentase Frekuensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan	131
GAMBAR 4.2	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Prosedur Penyusunan Usulan Kegiatan Pembangunan	133
GAMBAR 4.3	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan	136
GAMBAR 4.4	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Waktu yang diperlukan untuk Merealisasikan Usulan Kegiatan	138
GAMBAR 4.5	: Persentase Frekuensi Kehadiran dalam Pertemuan	143
GAMBAR 4.6	: Persentase Keaktifan dalam Berdiskusi	145
GAMBAR 4.7	: Persentase Keanggotaan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan	147
GAMBAR 4.8	: Persentase Frekuensi Kegiatan Kerja Bakti	149
GAMBAR 4.9	: Persentase Frekuensi Kehadiran dalam Kegiatan Kerja Bakti	151
GAMBAR 4.10	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Hasil Pembangunan dengan Kebutuhan Masyarakat	155

GAMBAR 4.11	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Kepuasan Hasil Pembangunan	157
GAMBAR 4.12	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Program P2DP	159
GAMBAR 4.13	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Jumlah Dana Stimulan	161
GAMBAR 4.14	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Kelanjutan Program P2DP	163
GAMBAR 4.15	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Hasil Pembangunan dengan Usulan dan Pendapat Masyarakat	166
GAMBAR 4.16	: Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Kegiatan Kerja Bakti	168
GAMBAR 4.17	: Persentase Frekuensi Pemberian Bantuan/Sumbangan Berupa Uang	170
GAMBAR 4.18	: Persentase Frekuensi Pemberian Bantuan/Sumbangan Berupa Material Bangunan	172
GAMBAR 4.19	: Persentase Frekuensi Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Kerja Bakti	174
GAMBAR 4.20	: Persentase Kemampuan Masyarakat dalam Membayar Iuran Pembangunan	176

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1999/2000 seluruh penduduk perkotaan di Indonesia diperkirakan mencapai 40% dari total 200 juta penduduk Indonesia atau sekitar 80 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk kota diperkirakan antara 2,5-3,5% pertahun atau sekitar dua kali lebih cepat dari pertumbuhan penduduk secara total. Dalam kurun waktu 20 tahun penduduk kota di Indonesia diperkirakan akan bertambah lebih dari 100% dari 80 juta menjadi lebih dari 170 juta, sedangkan penduduk total hanya bertambah kurang dari 30% (dalam kurun waktu yang sama). Kalau pertumbuhan penduduk total secara keseluruhan akan menurun, maka sampai tahun 2015 pertumbuhan penduduk perkotaan malah semakin cepat (*Center for Urban Studies*, 2002:8). Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia memang tidak seimbang. Kota-kota di Jawa menunjukkan peningkatan penduduk yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota di pulau-pulau lainnya. Sampai tahun 2000 separo lebih penduduk perkotaan berada di Pulau Jawa, padahal luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas seluruh pulau di Indonesia (Kodoatie, 2005:24).

Kepadatan jumlah penduduk yang menempati daerah perkotaan akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan untuk memiliki perumahan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, selain sandang dan pangan (Budihardjo, 1992). Adanya permintaan permukiman yang layak bagi penghuninya semakin hari semakin meningkat, meskipun pada kenyataannya

sering tidak di imbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana dasarnya. Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi suatu kota di Indonesia pada umumnya hampir selalu tertinggal dibandingkan dengan kecepatan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Batubara (dalam Budiharjo, 1992:91–94), padatnya penduduk di kota akan mengakibatkan semakin kurang memadainya sarana dan prasarana permukiman. Padahal sarana dan prasarana permukiman merupakan kebutuhan dasar dan merupakan faktor penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat.

Tuntutan akan peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman tidak saja terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi hampir semua kota menghadapi permasalahan tersebut. Tidak ketinggalan Kota Magelang juga menghadapi permasalahan dalam penyediaan prasarana dasar permukiman bagi masyarakatnya. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang menjadi kendala dalam pemenuhan pembangunan prasarana dasar tersebut. Keterbatasan tersebut selain berdampak pada kelambatan dalam pemenuhan pembangunan prasarana dasar permukiman juga seringkali menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat yang membutuhkan. Tidak mengherankan jika masyarakat Kota Magelang menuntut pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya secara cepat dan merata, karena semakin hari aktifitas mereka semakin meningkat. Apabila pembangunan prasarana dasar permukiman tersebut dapat cepat dipenuhi dengan sendirinya akan sangat menunjang masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Menyadari akan kondisi ini maka pelibatan masyarakat dalam memenuhi pembangunan

prasarana dasarnya menjadi suatu pilihan yang dianggap paling tepat oleh Pemerintah Kota Magelang. Pelibatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara optimal diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan prasarana dasar permukiman di masyarakat secara cepat, merata, efektif dan efisien.

Untuk merealisasikan pilihan dari Pemerintah Kota Magelang tersebut maka mulai tahun 2001 telah ditetapkan suatu program pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat. Program yang diberi nama dengan Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP) ini bertujuan selain untuk mempercepat dan meratakan pembangunan prasarana dasar permukiman juga sekaligus mengajak secara aktif masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar di lingkungannya. Program ini pada hakekatnya Pemerintah Kota Magelang memberikan anggaran stimulan terbatas untuk pembangunan prasarana dasar permukiman kepada warga masyarakatnya. Keterbatasan anggaran yang diterima oleh masyarakat tersebut diharapkan akan menimbulkan bentuk swadaya masyarakat untuk mewujudkan prasarana yang dinginkannya.

Pada pelaksanaan program P2DP ini masyarakat dilibatkan sejak awal kegiatan, yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemeliharannya. Pada tahap perencanaan masyarakat diajak untuk mengidentifikasi kondisi prasarana yang ada di lingkungannya dan kemungkinan alternatif untuk memenuhinya. Pada tahap ini sekaligus untuk menetapkan jenis-

jenis kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan serta memutuskan bagaimana, kapan dan siapa yang harus melakukan kegiatan.

Masyarakat pada tahap ini dapat menyalurkan aspirasinya melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dulunya bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) bersama-sama dengan Pemerintah di Tingkat Kelurahan. Pada kegiatan ini semua usulan pembangunan dari masyarakat akan ditampung dan dibahas hingga tersusun dalam suatu skala prioritas kebutuhan pembangunan di tingkat kelurahan untuk satu tahun ke depan. Agar usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak menyimpang dari tujuan Program P2DP, maka usulan yang akan dibahas dalam forum musrenbangkel hanyalah usulan prasarana lingkungan yang berskala kecil. Prasarana dengan skala kecil disini dimaksudkan adalah pembangunan dengan volume dan biaya yang kecil. Prasarana yang dapat diusulkan melalui program ini adalah peningkatan jalan lingkungan, peningkatan saluran *drainase*, peningkatan sanitasi lingkungan, pembangunan sarana air bersih, penyediaan sarana prasarana persampahan dan pembangunan jembatan kecil atau jembatan yang telah terbangun dengan konstruksi sederhana.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, masyarakat khususnya yang lingkungannya telah terpilih mendapatkan alokasi pembangunan diajak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk mewujudkan prasarana yang telah diusulkan. Sumber daya tersebut, baik dana, manusia dan peralatan digunakan untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun dan

ditetapkan bersama pada tahap penyusunan rencana. Pada tahap ini masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan baik berupa uang, pikiran, tenaga, pembebasan tanah kepemilikan yang terkena pembangunan maupun bentuk-bentuk lainnya. Dari hasil pelaksanaan ini nantinya akan nampak bentuk dan besarnya partisipasi swadaya masyarakat yang telah diberikan terhadap pembangunan di lingkungannya. Partisipasi ini diutamakan yang berasal dari masyarakat sekitar lokasi dimana pembangunan dilaksanakan, tetapi tidak menutup kemungkinan partisipasi juga berasal dari luar masyarakat setempat. Pihak swasta biasanya juga akan memberikan swadayanya apabila prasarana tersebut juga akan ikut menunjang kegiatannya. Bentuk partisipasi ini biasanya tergantung dari tingkat kesadaran masyarakatnya terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pada tahap pengawasan masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar karena pada tahap ini sangat menentukan diterima atau tidaknya hasil-hasil pembangunan. Pada dasarnya tahap ini digunakan untuk membandingkan antara rencana yang telah disepakati dengan hasil yang telah dilaksanakan. Pengawasan juga dilakukan dengan melihat kualitas hasil pembangunan. Kualitas yang baik akan memberi usia yang lama terhadap fisik bangunan sebaliknya kualitas yang jelek selain akan memperpendek usia bangunan juga akan menimbulkan permasalahan dalam pemeliharannya. Fungsi pengawasan dilakukan juga untuk mengetahui perkembangan kemajuan fisik terhadap pembangunan yang sedang dilakukan terutama apabila menghadapi permasalahan-permasalahan maupun kesulitan-kesulitan dilapangan. Hambatan tersebut akan segera dapat diketahui

dan akan sangat membantu untuk sesegera mungkin untuk mengatasinya. Semakin cepat hambatan diketahui akan semakin baik, karena waktu untuk mengatasinya juga semakin panjang.

Dan pada tahap pemeliharaan sangat diperlukan untuk menambah umur dari bangunan. Pemeliharaan terhadap prasarana yang ada di lingkungan masyarakat tidak boleh hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tetapi masyarakat juga harus mempunyai rasa memiliki terhadap bangunan yang telah tersedia. Masyarakat dalam memelihara prasarana pembangunan dapat dilakukan dengan swadaya dengan bentuk penarikan iuran pemeliharaan secara rutin. Apabila terjadi kerusakan pada prasarana nantinya masyarakat tidak akan merasa terbebani untuk perbaikannya, karena sudah ada dana pemeliharaan yang dapat digunakan untuk perbaikan. Dan apabila memang memerlukan dana perbaikan yang besar maka iurannya juga tidak mencapai nilai yang besar karena sudah terbantu dengan hasil pengumpulan iuran pembangunan yang telah ada. Sudah semestinyalah apabila masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan hasil pembangunan prasarana dasar permukiman karena biar bagaimanapun mereka jugalah yang akan menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Pelibatan masyarakat pada tahap-tahap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman diharapkan akan menjadi suatu kekuatan pendorong akan keberhasilan program tersebut. Sebaliknya di sisi lain masyarakat diharapkan juga akan merasa memiliki apabila mereka dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat akan lebih mempercayai program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

apabila mereka ikut dilibatkan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga mereka tumbuh rasa memiliki terhadap pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP di Kota Magelang selama ini telah berjalan dengan cukup baik, tetapi pada tingkat swadaya masyarakat masih menunjukkan angka yang rendah. Program P2DP yang telah dilaksanakan dan dimanfaatkan di semua kelurahan di Kota Magelang tersebut, mulai tahun 2002 stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang meningkat menjadi Rp 40.000.000,- untuk setiap kelurahan. Seiring dengan meningkatnya dana stimulan tersebut seharusnya diimbangi dengan meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar di lingkungannya, tetapi sebaliknya malah menurun untuk tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2002 untuk swadaya masyarakat telah terkumpul Rp 76.340.000,- atau 13,63% dari nilai dana stimulan yang telah diberikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk tahun 2003 telah terkumpul swadaya masyarakat sebesar Rp 57.850.000,- atau menurun menjadi 10,33%. Pada tahun 2004 diharapkan swadaya masyarakat akan naik paling tidak sama dengan tahun sebelumnya, tetapi pada kenyataannya swadaya masyarakat malah semakin menurun yaitu sebesar Rp 49,239,500,- atau menjadi 8,79% dari dana stimulan yang telah diberikan kepada masyarakat. Nilai swadaya masyarakat tersebut sudah merupakan akumulasi dari bentuk-bentuk partisipasi swadaya baik yang berupa uang secara tunai maupun bentuk tenaga, barang, material, makanan yang telah dikonversikan ke dalam bentuk rupiah. Menurunnya tingkat swadaya tersebut

juga dialami oleh tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian. Untuk lebih jelasnya penurunan angka partisipasi swadaya masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel I.1.

TABEL I.1
REKAPITULASI SWADAYA MASYARAKAT PADA
PROGRAM P2DP TAHUN 2002 – 2004 DI KOTA MAGELANG

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	SWADAYA MASYARAKAT			JUMLAH	(%)
		2002	2003	2004		
I.	Kec. Magelang Utara	18,514,500	18,650,000	11,813,000	48,977,500	26.70
1	Kel. Potrobangsari	2,500,000	2,000,000	1,800,000	6,300,000	3.43
2	Kel. Kedungsari	1,000,000	1,200,000	1,895,000	4,095,000	2.23
3	Kel. Magelang	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1.64
4	Kel. Kramat	5,150,000	8,000,000	3,543,000	16,693,000	9.10
5	Kel. Wates	2,080,000	3,000,000	1,575,000	6,655,000	3.63
6	Kel. Gelangan	5,784,500	2,200,000	1,000,000	8,984,500	4.90
7	Kel. Panjang	1,000,000	1,250,000	1,000,000	3,250,000	1.77
II.	Kec. Magelang Selatan	57,825,500	39,200,000	37,426,500	134,452,000	73.30
1	Kel. Cacaban	2,850,000	2,400,000	2,000,000	7,250,000	3.95
2	Kel. Kemirirejo	4,415,500	3,300,000	3,050,000	10,765,500	5.87
3	Kel. Jurangombo	1,000,000	1,400,000	1,900,000	4,300,000	2.34
4	Kel. Magersari	16,310,000	13,850,000	13,000,000	43,160,000	23.53
5	Kel. Rejowinangun Utara	9,750,000	7,800,000	7,000,000	24,550,000	13.38
6	Kel. Rejowinangun Selatan	1,000,000	2,650,000	4,476,500	8,126,500	4.43
7	Kel. Tidar	22,500,000	7,800,000	6,000,000	36,300,000	19.79
	Kota Magelang	76,340,000	57,850,000	49,239,500	183,429,500	100.00
	Jumlah Bantuan	560,000,000	560,000,000	560,000,000	1,680,000,000	
	Prosentase	13.63	10.33	8.79	10.92	

Sumber: Badan Perencanaan Kota Magelang

Menurunnya nilai swadaya masyarakat tersebut bagi Pemerintah Kota Magelang bukanlah suatu tujuan yang diharapkan. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang yang sebenarnya hanya sebagai stimulan bagi masyarakat untuk membangun prasarana dasar di lingkungannya ternyata belum dapat menarik swadaya masyarakat secara maksimal dalam membangun prasarana

di lingkungannya. Semakin menurunnya swadaya masyarakat tersebut menjadikan pemikiran bagi Pemerintah Kota Magelang bagaimana untuk dapat meningkatkan nilai swadaya tersebut. Kajian dan penelitian terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP sangat perlu dilakukan guna penyempurnaan pelaksanaan program-program pembangunan prasarana dasar permukiman di masa-masa yang akan datang. Kajian maupun penelitian dapat dilakukan baik terhadap kondisi masyarakat, kemampuan pemerintah daerah maupun pada programnya sendiri. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat teridentifikasi kekurangan maupun kelemahan terhadap pelaksanaan Program P2DP.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Magelang pada kesempatan ini akan dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP di Kota Magelang. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga maka penelitian ini akan hanya akan membatasi pada sisi pelaksanaannya dari masyarakat, yaitu persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel tiga kelurahan dari empat belas kelurahan yang ada di Kota Magelang, yaitu Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari. Ketiga kelurahan tersebut dipilih karena ketiganya selain memiliki potensi yang berbeda juga ketiganya memiliki tingkat swadaya masyarakat yang berbeda pula, yaitu telah mewakili kelurahan dengan tingkat swadaya masyarakat yang tinggi, sedang dan rendah.

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan prasarana dasar permukiman menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Banyaknya tuntutan dan permintaan atas pembangunan prasarana dasar di wilayah Kota Magelang oleh pemerintah daerah telah disikapi melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP). Pelaksanaan program ini pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai penentu atas keberhasilan program ini. Pada pelaksanaan program ini Pemerintah Kota Magelang akan memberikan stimulan anggaran pada setiap kelurahan dengan nilai yang sama dimana untuk menutup kekurangan biaya pembangunan diharapkan dapat terpenuhi melalui swadaya masyarakat.

Dari hasil pelaksanaan Program P2DP selama ini apabila dilihat dari tingkat swadaya masyarakatnya belum sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Dari tahun ke tahun tingkat swadaya masyarakatnya justru mengalami penurunan, untuk itu perlu dicarikan jalan keluarnya agar kemampuan swadaya masyarakat dalam pembangunan di lingkungannya dapat ditingkatkan. Kajian terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman tersebut perlu dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program-program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat kelurahan. Dari gambaran tersebut diatas maka diharapkan penelitian ini dapat menjawab pertanyaan sebagai rumusan *Research Question* yang telah ditetapkan, yaitu: *Bagaimana persepsi dan partisipasi swadaya masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat di Kota Magelang?*

1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Penelitian ini selain bertujuan untuk melakukan kajian persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman juga akan mengkaji partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam memenuhi kebutuhan prasarana dasar permukiman masyarakat melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP) di Kota Magelang.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

- Mengkaji persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman di Kota Magelang
- Mengkaji persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di Kota Magelang.
- Mengkaji persepsi masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di Kota Magelang.
- Mengkaji partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di Kota Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi penelitian terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP) diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah:

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan. Kekurangan dan kelebihan pada pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan terhadap pelaksanaan Program P2DP selanjutnya.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi persepsi masyarakat dan kemampuan swadaya masyarakat dalam pelibatangannya terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat mengubah cara pandang masyarakat bahwa pembangunan prasarana dasar lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi justru masyarakatlah yang akan menentukan keberhasilan pembangunan prasarana dasar tersebut.
- c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan Pembangunan Wilayah dan Kota.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial.

Secara substansial ruang lingkup studi terhadap kajian pelaksanaan program pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat di Kota Magelang dibatasi pada:

- a. Studi ditekankan pada proses pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP), yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasilnya.

- b. Persepsi masyarakat merupakan penilaian dari anggota masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun manfaat hasilnya terhadap program pembangunan prasarana dasar permukiman baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- c. Bentuk swadaya masyarakat diimplementasikan dalam bentuk keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan program hingga pada pemanfaatan hasilnya.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial pada studi ini adalah Kota Magelang sebagai lokasi dilaksanakannya Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP). Kota Magelang sendiri merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah dengan wilayah terkecil dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya yang secara administrasi di kelilingi oleh Wilayah Kabupaten Magelang.

Dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dalam penelitian ini maka dari 14 (empat belas) kelurahan yang ada di Kota Magelang hanya akan diambil 3 (tiga) kelurahan sebagai sampel pada penelitian ini. Ketiga kelurahan yang terpilih sebagai obyek penelitian tersebut adalah Kelurahan Magersari yang berada pada Kecamatan Magelang Selatan serta Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari yang berada pada Kecamatan Magelang Utara.

a. Kelurahan Magersari

Kelurahan ini dipilih karena tingkat swadaya masyarakatnya dalam pembangunan prasarana dasar permukiman mempunyai nilai tertinggi dibanding dengan kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Magelang. Dari jumlah swadaya masyarakat yang telah terkumpul dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, sebesar Rp 43.160.000,- berasal dari kelurahan Magersari atau 23,53% dari keseluruhan jumlah swadaya yang ada di Kota Magelang.

b. Kelurahan Kramat

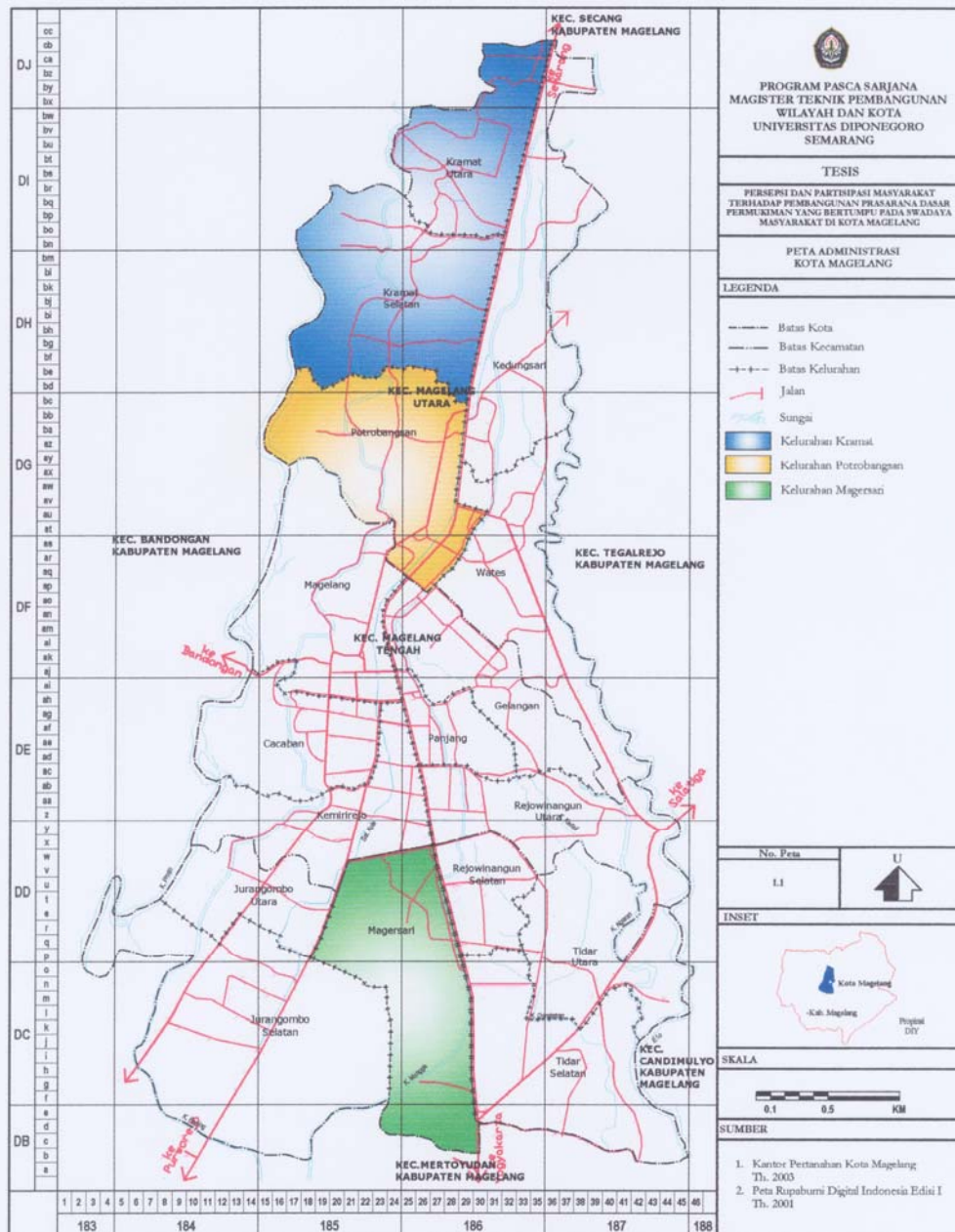
Selain alasan tingkat swadaya yang berkategori sedang, kondisi kepadatan rumah yang tertinggi di Kota Magelang juga menjadi salah satu alasan kenapa kelurahan ini dipilih menjadi salah satu obyek penelitian. Kelurahan ini sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan swadaya masyarakatnya, mengingat luas wilayahnya termasuk kategori luas di Kota Magelang. Dari jumlah swadaya masyarakat yang telah terkumpul dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, sebesar Rp 16.693.000,- berasal dari Kelurahan Kramat atau 9,10% dari keseluruhan jumlah swadaya yang ada di Kota Magelang.

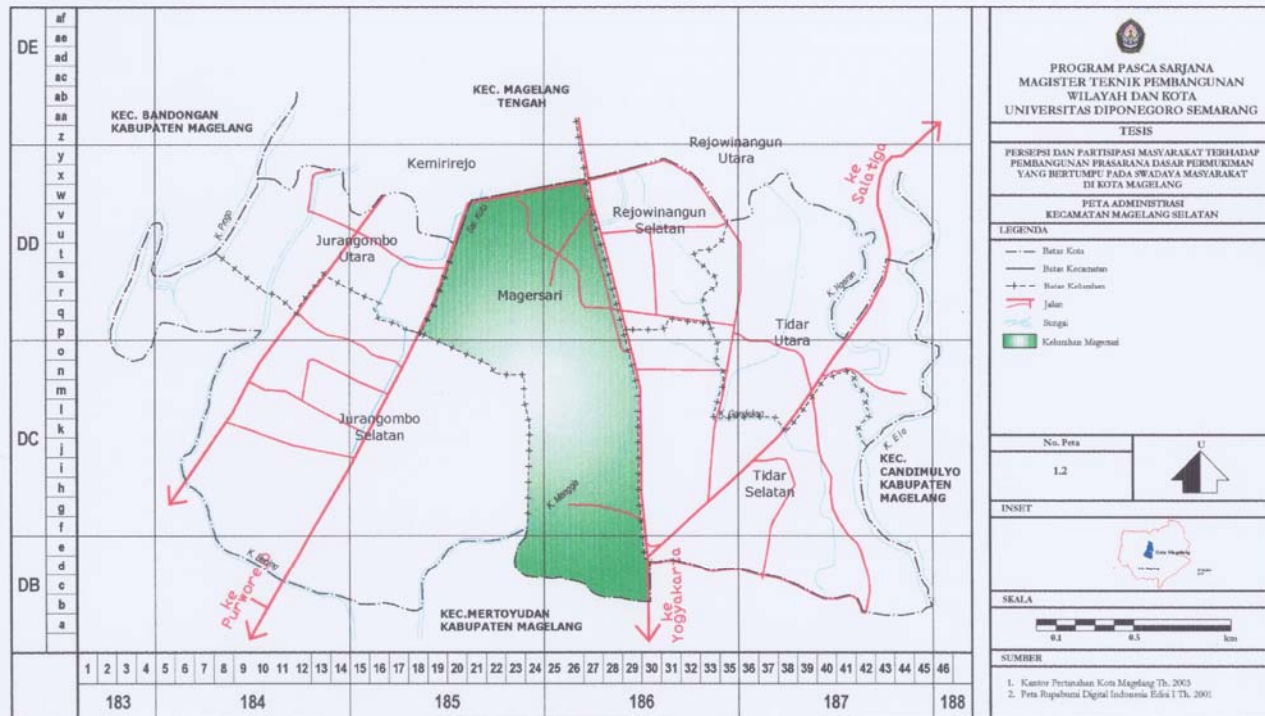
c. Kelurahan Potrobangsari

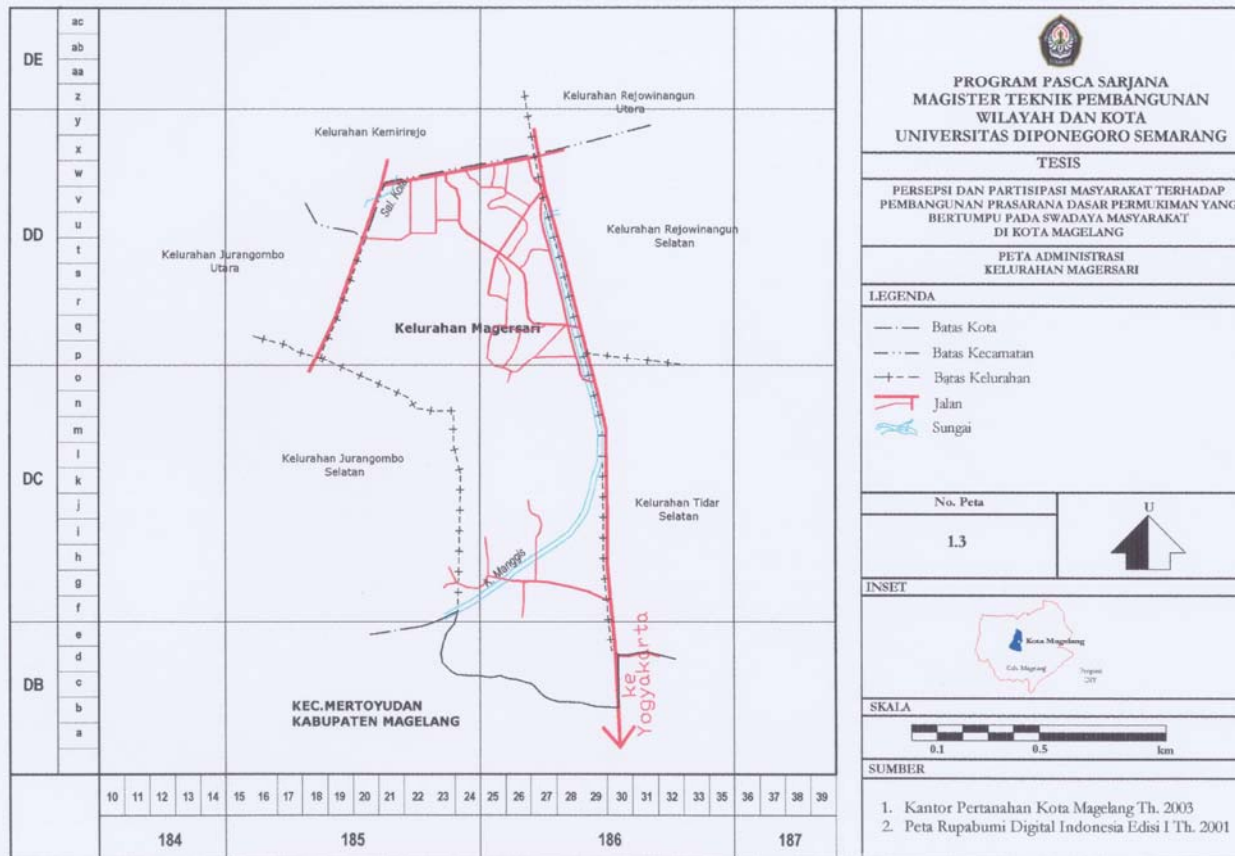
Kelurahan ini pada pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman tingkat swadaya termasuk kategori kecil, tetapi apabila dilihat dari potensi jenis pekerjaan penduduknya yang sebagian besar sebagai pegawai negeri yang seharusnya ikut mendukung program pemerintah maka masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Dari jumlah swadaya masyarakat yang

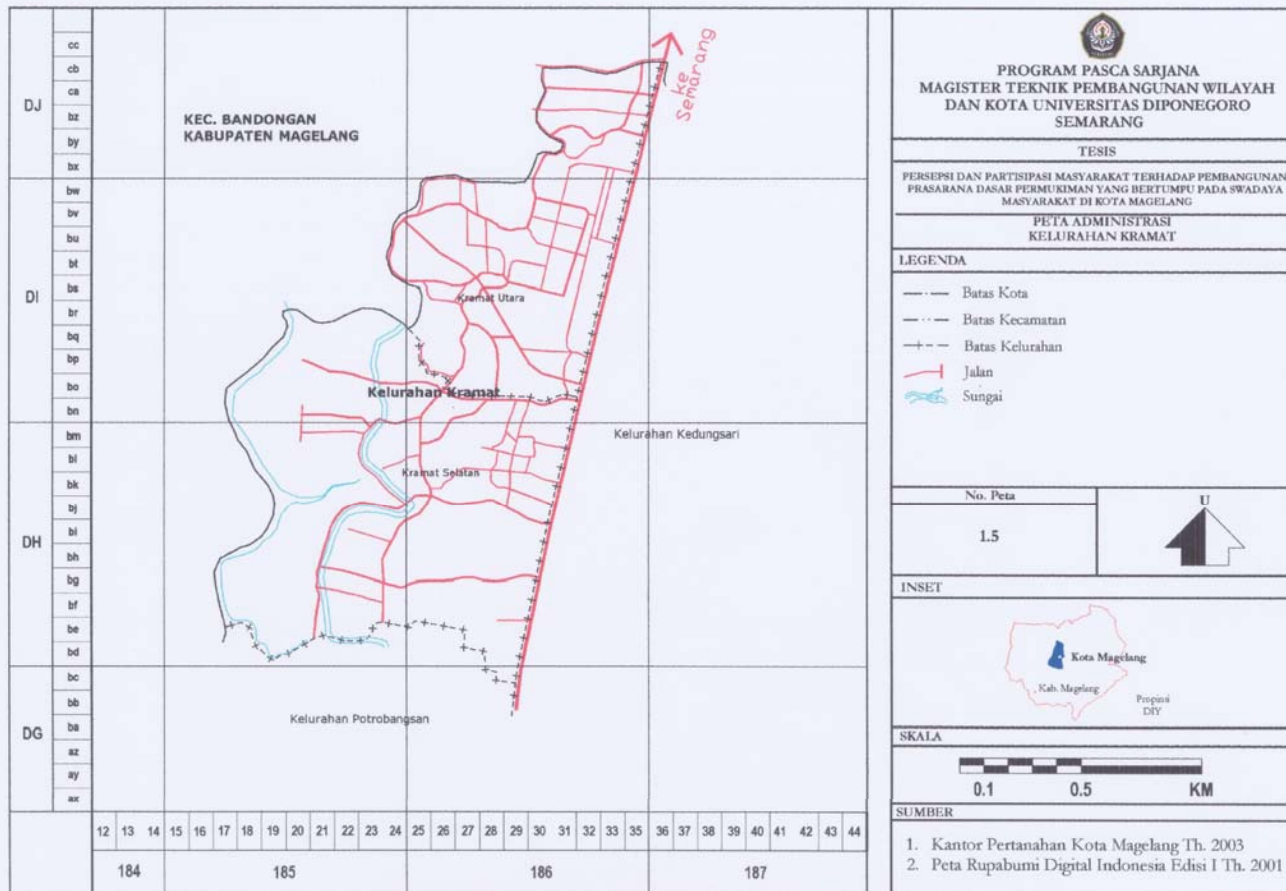
telah terkumpul dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, sebesar Rp 6.300.000,- berasal dari Kelurahan Potrobangsari atau 3,43% dari keseluruhan jumlah swadaya yang ada di Kota Magelang.

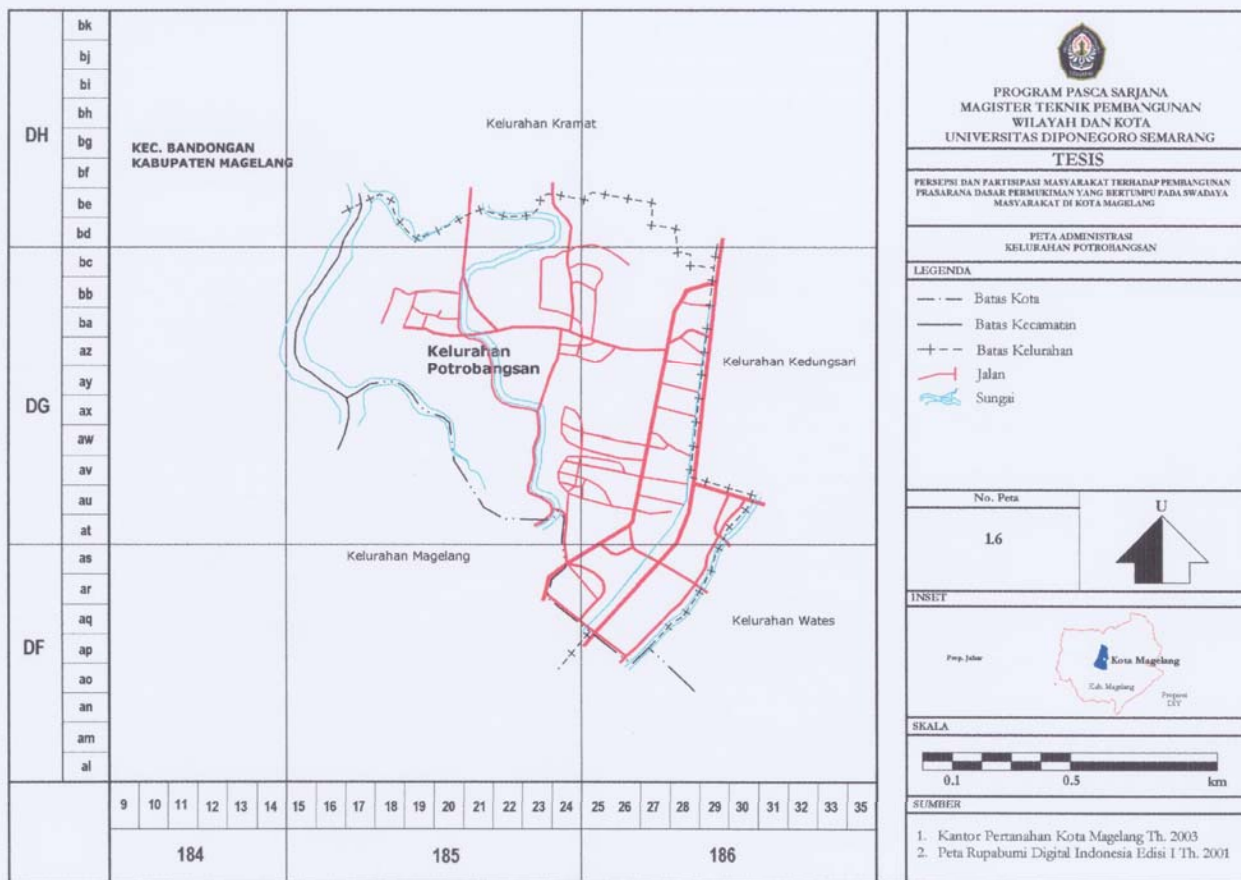
Dari ketiga lokasi obyek penelitian ini maka penulis anggap telah mewakili untuk tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman, yaitu telah mewakili kelurahan yang berswadaya besar, menengah dan kecil. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di Kota Magelang.











1.6 Kerangka Pemikiran

Berkembangnya suatu kota membawa konsekuensi terhadap perubahan fisik kota yang biasanya juga dibarengi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dengan penyebaran yang semakin cepat dan luas. Bertambahnya penduduk di perkotaan secara otomatis selain akan meningkatkan aktifitas masyarakatnya juga permintaan terhadap tempat tinggal. Tempat tinggal yang aman dan nyaman menjadi tujuan bagi setiap masyarakat yang akan menempatnya. Pada kenyataannya penyediaan tempat tinggal di permukiman tidak selalu diimbangi dengan penyediaan prasarana dasarnya yang representatif. Pembangunan prasarana dasar permukiman merupakan salah satu bentuk kebutuhan dasar dari masyarakat terutama sekali untuk mendukung dan mengimbangi kegiatan masyarakat yang semakin hari kian berkembang.

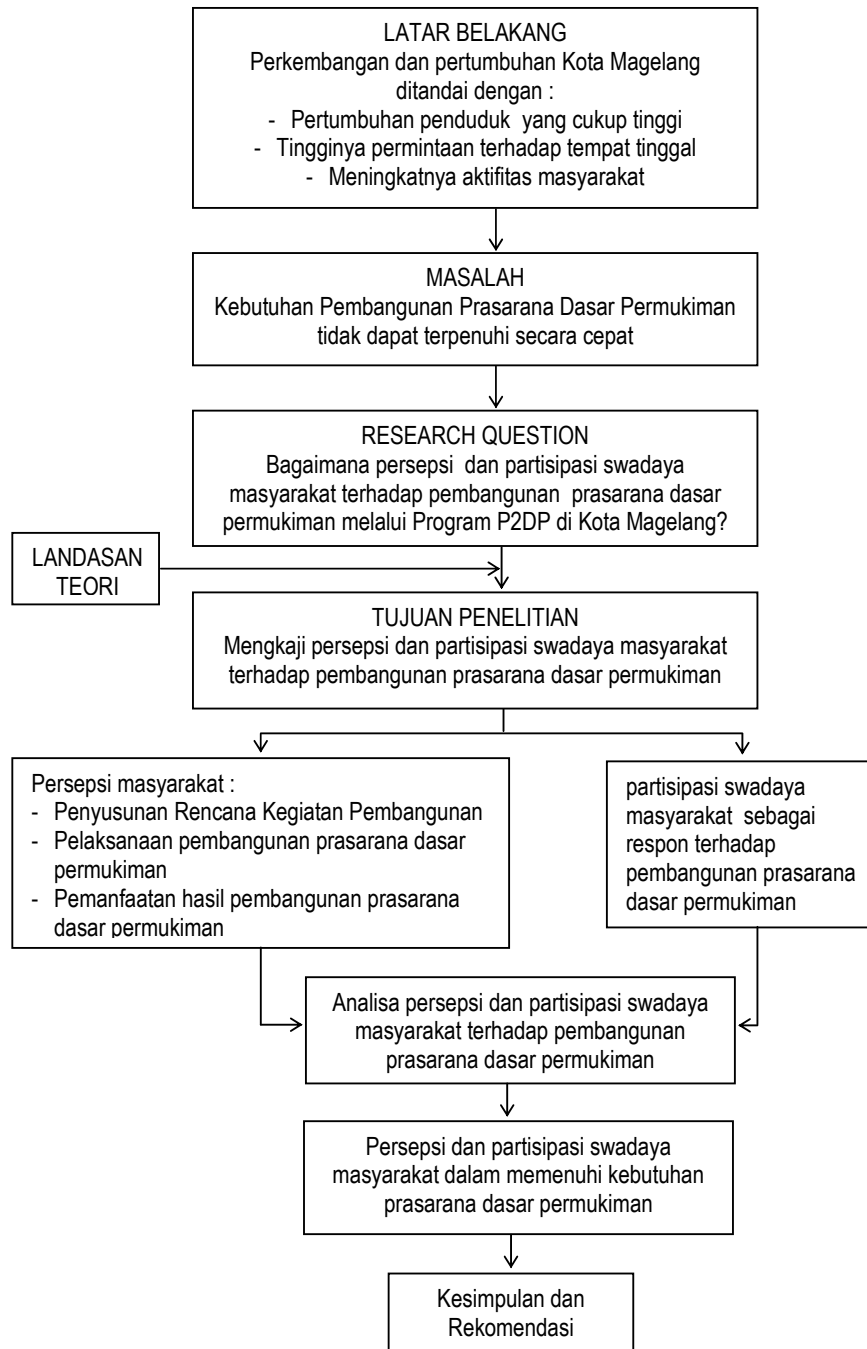
Banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk membangun, memperbaiki maupun meningkatkan prasarana dasar permukiman disikapi oleh Pemerintah Kota Magelang dengan melaksanakan Program P2DP (Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman). Program ini bertujuan mengajak masyarakat agar mau berswadaya dalam memenuhi kebutuhan prasarana dasar permukiman di lingkungannya sebagai penyeimbang terhadap anggaran stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang. Pada kenyataannya program ini dari sisi kesadaran berswadaya masih kurang mendapat tanggapan yang menggembirakan dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan selain untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman juga

untuk mengkaji partisipasi swadaya masyarakat dalam memenuhi pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP.

Dalam mengkaji kondisi ini tentunya tidak berdasarkan pada kajian-kajian teoritis semata tetapi juga melalui kajian-kajian yang berhubungan dengan pelaksanaan Program P2DP. Analisis terhadap penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian persepsi masyarakat terhadap proses pelibatan masyarakat, pelaksanaan program, hasil pelaksanaan program dan partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman. Identifikasi ini dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, yang sedang berjalan dan rencana-rencana yang akan dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Kondisi pelibatan masyarakat sendiri dalam pelaksanaan program ini juga akan dilihat dengan potensi yang dimilikinya, antara lain, umur, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, keterlibatan dalam organisasi sosial, lama tinggal di lingkungan dan sebagainya.

Dari penggabungan kajian antara unsur-unsur tersebut dengan dukungan data yang ada diharapkan proses tahap-tahap pelaksanaan Program P2DP dapat teridentifikasi. Pengidentifikasian pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alat analisa deskriptif analitik baik yang berupa kualitatif maupun kuantitatif. Hasil kajian inilah yang nantinya akan digunakan sebagai simpulan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu kemandirian masyarakat dalam membangun prasarana dasar pemukiman di lingkungannya.

Diagram 1.7 : Alur pemikiran studi persepsi dan partisipasi swadaya masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP) di Kota Magelang



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di Kota Magelang melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar permukiman (P2DP) ini, pada dasarnya merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat serta mendapatkan informasi maupun data yang ada pada lokasi penelitian. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan tidak meninggalkan penelaahan pustaka (*literature study*) yang telah banyak digunakan pada waktu penyusunan kerangka pemikiran dan landasan teori dari penelitian ini. Melalui kedua metode tersebut diharapkan akan ditemukan kekurangan maupun kelebihan dari pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di Kota Magelang.

1.7.2 Jenis Data

Didalam melaksanakan suatu penelitian, maka keberadaan data memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai keinginan yang akan dituju. Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu sebagai dasar penyusunan suatu perencanaan dan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. Pada dasarnya data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun kelompok terhadap responden terpilih. Dalam pelaksanaan di

lapangan, data primer ini biasanya diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi. Penyebaran kuesioner disini merupakan metode pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara tertulis.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari masyarakat yang lingkungannya pernah melaksanakan maupun yang sedang melaksanakan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP di ketiga kelurahan obyek penelitian yaitu Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari. Data yang dikumpulkan melalui data primer tersebut selain data potensi dari responden (umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, jenis rumah, lama tinggal dan sebagainya), juga data yang berkenaan dengan persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman yang dilaksanakan melalui Program P2DP. Alat yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan penyebaran kuesioner dan wawancara dengan responden yang terpilih. Pertanyaan didalam kedua alat tersebut mencakup penilaian, pendapat, pengetahuan dan pandangan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya.

b. Data Sekunder

Didalam pencarian data sebagai kelengkapan sebelum dilakukan penelitian adalah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin melalui berbagai sumber yang relevan. Jenis data tersebut sering disebut dengan data sekunder, yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel ataupun diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto, 2001:19). Data sekunder ini biasanya diperoleh dengan menyalin atau mengutip data yang sudah jadi.

Data sekunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini adalah profil kelurahan, data kependudukan, data pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP dan data swadaya masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman pada masing-masing kelurahan yang menjadi obyek penelitian. Data ini diperoleh dari instansi pemerintah di lingkungan Kota Magelang, yaitu Badan Perencanaan Kota Magelang, Badan Pusat Statistik Kota Magelang, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kelurahan dan instansi lainnya yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini.

Kebutuhan akan kedua jenis data tersebut baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel I.2 yang merupakan tabel kebutuhan data pada penelitian pembangunan prasarana dasar permukiman.

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA

No	VARIABEL	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA
1.	<p>Proses penyusunan rencana pembangunan prasarana dasar permukiman:</p> <p>a. Komponen Sarana dan Prasarana Dasar</p> <p>b. Pelibatan Masyarakat</p>	<p>Data kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman yang telah di bangun dengan swadaya masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan - jaringan air bersih - saluran pembuangan limbah / sanitasi - pengelolaan sampah - saluran air hujan untuk pematusan (<i>drainase</i>) <p>Data persepsi masyarakat terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelibatan penyusunan rencana kegiatan - prosedur penyusunan usulan - kesesuaian rencana dengan realisasi - waktu untuk realisasi usulan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPU ▪ Bapeko ▪ Kelurahan ▪ Masyarakat
2.	<p>Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar permukiman:</p> <p>a. Peran serta masyarakat</p> <p>b. Jenis kegiatan</p>	<p>Pelibatan masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran dalam pertemuan - Keaktifan dalam berdiskusi - Keanggotaan dalam organisasi sosial kemasyarakatan <p>Aksi massa / kerja bakti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frekuensi kegiatan kerja bakti - frekuensi kehadiran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat ▪ Masyarakat
3.	<p>Hasil Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman: Manfaat Pembangunan</p>	<p>Persepsi masyarakat terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kepuasan terhadap hasil pembangunan - kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat - manfaat program - jumlah anggaran - kelanjutan program 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat
4.	<p>Partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman:</p> <p>a. Bentuk Partisipasi Swadaya Masyarakat</p>	<p>Bentuk partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swadaya dalam usulan dan pendapat - Swadaya dalam bentuk tenaga - Swadaya dalam bentuk uang - Swadaya dalam bentuk bahan bangunan - Sawadaya dalam bentuk konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat

No	VARIABEL	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA
	b. Besarnya Partisipasi Swadaya Masyarakat c. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi swadaya masyarakat	Besarnya bantuan bila dinilai dengan uang (tenaga, barang, makanan) Potensi masyarakat: - jenis kelamin - usia - mata pencaharian - status kepemilikan rumah - lama tinggal - tingkat pendidikan - tingkat pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat ▪ Masyarakat

Sumber : Hasil Analisis

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang bertemakan pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat, dilakukan dengan cara:

- a. Kuesioner, yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun secara terstruktur kepada setiap responden terpilih. Penggunaan kuesioner ini bertujuan selain untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survey juga untuk memperoleh informasi dengan realibilitas dan validitas setinggi mungkin (Singarimbun, 1995:175). Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden disusun dengan alternatif jawaban yang sekiranya sesuai dengan pendapat, pengetahuan dan pandangan dari responden.
- b. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali sebanyak mungkin informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden maupun nara sumber yang sekiranya mengetahui secara rinci tentang topik penelitian. Wawancara adalah

salah satu bagian yang terpenting dari setiap pelaksanaan survey. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya akan dapat diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden.

- c. Observasi, teknik ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung gambaran obyek penelitian secara nyata di lapangan, dalam hal ini adalah kondisi prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungan masyarakat.
- d. Dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari maupun mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan, monografi atau daftar tabel statistik dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan.

1.7.4 Metode Analisa

Didalam penelitian ini, metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang didukung dengan analisa kualitatif. Metode ini digunakan selain untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman juga untuk mengkaji partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman. Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden disusun dengan alternatif jawaban yang sekiranya sesuai dengan pendapat, pengetahuan dan pandangan dari responden. Skala yang dipakai untuk menentukan jumlah alternatif jawaban untuk data yang sifatnya ordinal dipakai Skala Likert. Skala ini akan menilai jawaban responden pada skala 1 sampai 4, dimana untuk pertanyaan positif nilai 4 merupakan jawaban tertinggi dan nilai 1 merupakan jawaban tertinggi untuk pertanyaan yang sifatnya negatif. Skor responden merupakan jumlah seluruh skor

pada pertanyaan-pertanyaan yang terpisah. Penentuan skala dalam suatu penelitian sebenarnya tidak ada aturan baku yang harus ditaati, hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2002: 63) yang menyatakan bahwa dalam penggunaan skala Likert tidak terdapat aturan baku dimana dalam hal ini dapat dipakai dengan jumlah ganjil atau genap. Untuk mempermudah didalam menganalisa jawaban responden maka alat analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah distribusi frekuensi.

1.7.5 Teknik Pengambilan Sampel

Didalam penentuan sampel maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya populasi, yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun, 1995:152). Dalam hal ini populasi merupakan keseluruhan penduduk atau individu yang dimaksudkan untuk diselidiki. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. Sampel merupakan sebagian individu yang diselidiki (Hadi, 2000:7). Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah wakil dari populasi yang dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi (Nasir, 1999:325).

Didalam menetapkan jumlah sampel dari sebuah populasi pada prinsipnya tidak ada aturan-aturan yang ketat secara mutlak berapa jumlah sampel yang harus diambil dalam sebuah populasi (Kartono, 1996:45). Pada penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan rumus yang sering digunakan dalam penelitian masyarakat, yaitu:

$$n = \frac{N}{N (d^2 + 1)}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Derajat Kecermatan (*Level of Significance*)

Sehubungan dengan hal tersebut, pada penelitian yang bertemakan pembangunan prasarana dasar permukiman di Kota Magelang yang menjadi populasi penelitian adalah jumlah penduduk yang ada pada tiga kelurahan terpilih yang menjadi obyek penelitian. Adapun jumlah penduduk pada masing-masing kelurahan pada tahun 2004 adalah, 8.514 jiwa untuk Kelurahan Magersari, 11.854 jiwa untuk Kelurahan Kramat dan 8.957 jiwa untuk Kelurahan Potrobangsari. Sehubungan dengan penentuan sampel penelitian ini, maka sesuai dengan rumus diatas jumlah sampel yang diperlukan adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{29.325}{29.325 (10\%^2 + 1)} \\ &= 99,01 \\ &\approx 100 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 100 responden yang tersebar di tiga kelurahan. Dari sampel tersebut maka akan dibagi secara proposional pada masing-masing kelurahan, yaitu untuk Kelurahan Magersari sebanyak 29 orang, Kelurahan Kramat sebanyak 40 orang dan Kelurahan Potrobangsari sebanyak 31 orang.

TABEL I.3
JUMLAH RESPONDEN DI KELURAHAN MAGERSARI,
KELURAHAN KRAMAT DAN KELURAHAN POTROBANGSAN

No.	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSEN-TASE (%)	JUMLAH RESPONDEN
1.	Kelurahan Magersasi	8.514	29,03	29
2.	Kelurahan Kramat	11.854	40,42	40
3.	Kelurahan Potrobangsari	8.957	30,54	31
	Jumlah	29.325	100,00	100

Sumber: Magelang dalam Angka Tahun 2004, diolah

Sedangkan untuk penentuan responden yang akan diteliti digunakan teknik *purposive sampling* dimana responden dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau obyek studi yang selektif dan yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Hal ini juga disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggali informasi seakurat mungkin. Untuk itu dipilih responden yang benar-benar mengetahui dan terkait dengan permasalahan dari obyek penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini maka sampel yang akan dijadikan sumber data adalah masyarakat yang lingkungannya pernah melaksanakan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP di tiga kelurahan sebagai obyek penelitian.

4.6 Analisis Penelitian

Untuk melakukan analisis terhadap hasil penelitian maka metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang didukung dengan analisa kualitatif dengan alat pengolahan distribusi frekuensi. Analisa ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara lebih rinci apa yang menjadi pendapat, penilaian dan keinginan dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP. Metode ini digunakan untuk mengkaji persepsi masyarakat dan partisipasi swadaya

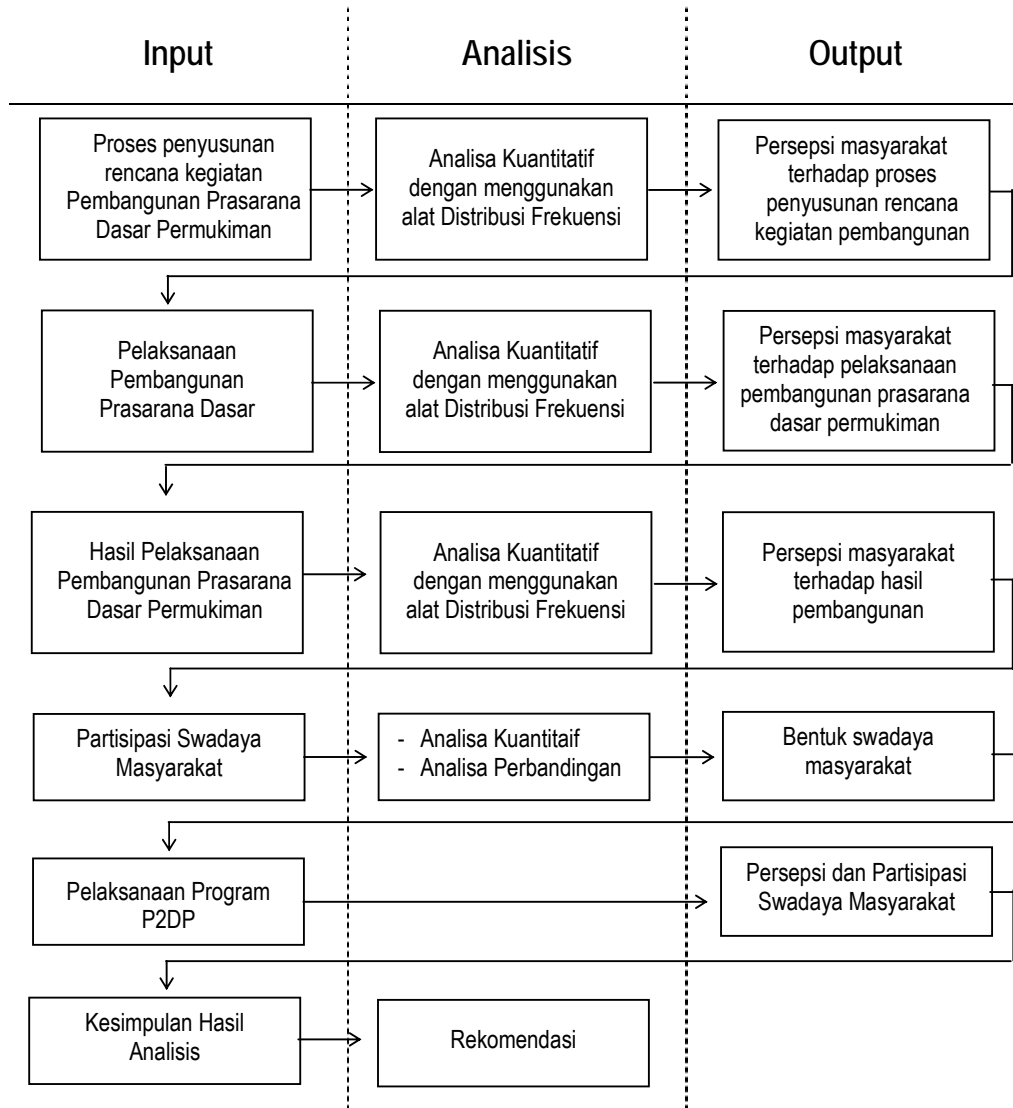
masyarakat terhadap program pembangunan prasarana dasar permukiman. Untuk partisipasi swadaya masyarakat, melalui analisa ini juga akan diketahui bentuk/jenis swadaya yang telah diberikan oleh masyarakat. Bentuk/jenis swadaya tersebut diantaranya adalah partisipasi dalam bentuk pikiran, tenaga, sumbangan berupa uang, barang yang dalam hal ini berupa bahan material bangunan dan konsumsi.

Untuk mengetahui kategori keberhasilan dalam setiap tahapan pada proses pelaksanaan program pembangunan prasarana dasar permukiman terhadap tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian maka digunakan analisa perbandingan. Kategori keberhasilan pada setiap kelurahan secara garis besar akan di bagi menjadi tiga kategori, yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Melalui analisa ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kelurahan mana yang mempunyai keunggulan dalam setiap tahapan dalam proses pembangunan prasarana dasar permukiman. Secara lebih jelas, tahapan analisa yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.8.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan pada penelitian yang bertemakan pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat di Kota Magelang terbagi menjadi lima bab, antara lain:

BAGAN I.8
ANALISIS PENELITIAN PERSEPSI DAN PARTISIPASI SWADAYA
MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR
PERMUKIMAN YANG BERTUMPU PADA SWADAYA MASYARAKAT



Sumber: Hasil Analisis

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Substansial

dan Spasial Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN LITERATUR PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

Bab ini berisikan uraian teori-teori yang akan digunakan untuk menentukan variabel sebagai alat analisa penelitian. Teori-teori dan kebijakan yang akan diuraikan pada bab ini meliputi konsep persepsi masyarakat, konsep pembangunan, konsep prasarana dasar, konsep permukiman, konsep swadaya masyarakat, konsep partisipasi baik konsep tipe partisipasi maupun konsep tingkatan partisipasi dan konsep faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

BAB III KAJIAN UMUM KOTA MAGELANG

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum dari Kota Magelang yang merupakan lingkup dari penelitian ini dan gambaran khusus pada kelurahan-kelurahan yang terpilih sebagai obyek penelitian yaitu Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari. Kondisi yang akan diuraikan diantaranya adalah kondisi geografis, kondisi demografi, konsep maksud dan tujuan Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP), gambaran pelaksanaan Program P2DP di Kota Magelang, gambaran tingkat partisipasi swadaya masyarakat terhadap Program P2DP dan deskripsi terhadap responden terpilih dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISA PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN DI KOTA MAGELANG

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian dengan metode baik secara kuantitatif maupun kualitatif melalui alat analisa distribusi frekuensi. Penyajian analisa akan dilakukan baik melalui tabel-tabel, diagram maupun perhitungan secara kuantitatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Magelang di dalam melaksanakan pembangunan, khususnya pada pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP).

BAB II

KAJIAN LITERATUR PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

2.1 Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, perception yang artinya : persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987:343)

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff dalam Walgito, 2000:53).

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrateed, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut

(Walgito, 2000:54). Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah : stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang

bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Soelaiman, dalam Musadun, 2000:86)

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

2.2 Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu usaha untuk memperbaiki pada kondisi yang lebih baik bagi suatu masyarakat untuk menuju ke arah kemajuan. Maju mundurnya suatu masyarakat dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Pembangunan fisik belum dapat dijadikan sebagai suatu jaminan bahwa masyarakatnya sudah maju, demikian pula sebaliknya kemajuan suatu masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Pembangunan yang terpadu dari berbagai bidang akan lebih menguntungkan dibandingkan pembangunan yang dilaksanakan secara sektoral. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1988), pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu.

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial

budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining proces*) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu “*innerwill*”, proses emansiapsi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan (Soedjatmoko, 1972).

Todaro dalam Bryant dan White (1982) mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses multidemensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Sejalan dengan pendapat tersebut *Dudley Seers*, menyatakan bahwa pembangunan menuju pada tiga sasaran penting yaitu mengurangi: kemiskinan (*poverty*), pengangguran (*unemployment*), dan ketimpangan (*inequality*).

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga nampak peranan manusia dalam pembangunan baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan. Secara ringkas pembangunan dapat diartikan sebagai proses rekayasa untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendukungnya melalui perubahan tatanan lingkungan hidup serta kehidupan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan pembangunan tersebut maka dilaksanakan berbagai program yang terdiri dari berbagai jenis kegiatan pembangunan.

2.3 Prasarana Dasar Permukiman

2.3.1 Pengertian Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:880), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur (Jayadinata: 1992), adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. Pendapat lain berkenaan dengan sarana dan prasarana adalah dari Grigg, 1988 yang menyatakan bahwa prasarana dan sarana atau *infrastruktur* merupakan suatu fasilitas fisik suatu kota atau negara yang sering disebut pekerjaan umum. Dengan demikian prasarana kota merupakan suatu fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan ikut menentukan perkembangan kota.

Hal senada juga dikemukakan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (CBUM, 2002) yang mendefinisikan prasarana dan sarana sebagai suatu bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya.

Fungsi prasarana sendiri adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya permukiman dan lingkungannya agar dapat berperan sesuai dengan

fungsinya. Untuk memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah/kawasan pada suatu waktu tertentu. Keseimbangan diantara keduanya akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryono, 1996:1).

Dari pengertian diatas maka yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah sesuatu yang akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan guna mendukung kegiatan manusia yang dilakukan secara bersama-sama agar dapat bermukim dengan nyaman, aman dan dapat bergerak dengan mudah.

2.3.2 Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kota sebagai suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen dengan penduduknya yang heterogen kedudukan sosialnya sebagai permukiman identik dengan kumpulan dari perumahan yang luas dengan berbagai fasilitas lingkungan didalamnya (Daldjoeni, 1997:29). Beragamnya dinamika dan kegiatan masyarakat perkotaan, menurut Rukmana (1993:7) membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar tercipta suatu lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya dalam menjalani kegiatan hidupnya. Senada dengan hal tersebut Djoko Sujarto, 2005 menyatakan bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja, serta kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efisien dan tercipta lingkungan sehat,

rapi, aman dan nyaman. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana umum yang layak.

Komarudin, (1997:92) menyatakan bahwa tujuan pembangunan prasarana permukiman adalah :

- a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur.
- b. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- c. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana dari pengertian diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.

2.3.3 Komponen Sarana dan Prasarana

Budiharjo, 1993 menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan perumahan adalah sarana dan prasarana, yang meliputi:

- Pelayanan Sosial (*social services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
- Fasilitas Sosial (*social facilities*), seperti tempat peribadatan, persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan sebagainya.
- Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.

Prasarana dasar sendiri menurut Dirjen Cipta Karya meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan serta jaringan saluran air hujan untuk pematuan (*drainase*) dan pencegahan banjir. Senada dengan tersebut diatas Grigg menyatakan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Departemen Pekerjaan Umum didalam Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Permukiman Kota menyatakan bahwa prasarana dasar perkotaan adalah merupakan suatu fasilitas pelayanan prasarana lingkungan perumahan kota yang meliputi komponen jalan lingkungan, jalan setapak, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah/sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat. Sejalan dengan tersebut diatas menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development*

(1991:19) menyatakan bahwa prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Dari komponen prasarana tersebut, prasarana yang benar-benar dikelola oleh masyarakat pada dasarnya hanya ada tiga komponen, yaitu:

- a. Prasarana jalan, yaitu jalan lokal sekunder tipe I dan tipe II. Jalan lokal sekunder tipe I merupakan jalan setapak di dalam permukiman yang berfungsi untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter. Sedangkan jalan lokal sekunder tipe II dengan lebar 3,5 meter berfungsi sebagai jalan kendaraan roda empat dan berada di lingkungan permukiman. Kedua jenis jalan tersebut pembangunan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.
- b. Prasarana drainase, yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan air yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
- c. Prasarana pembuangan sampah, yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka komponen prasarana dan sarana permukiman pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam kelompok, yaitu:

- Komponen yang memberikan input kepada penduduk, termasuk dalam kategori ini adalah komponen prasarana air bersih dan listrik.
- Komponen yang mengambil output dari penduduk, termasuk dalam kelompok ini adalah prasarana drainase, pembuangan air kotor/ sanitasi dan pembuangan sampah.
- Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun mengambil output, yaitu meliputi prasarana jalan dan telepon.

2.3.4 Stakeholder yang Terlibat dalam Pembangunan

Didalam pelaksanaan pembangunan ada tiga komponen utama agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil dan berjalan dengan baik, yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiganya mempunyai peranan sendiri-sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya mereka haruslah saling berkoordinasi, bekerjasama dan saling melengkapi. Secara lebih jelas peranan ketiga komponen tersebut adalah:

a. Peranan Pemerintah

Sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah maka pemerintah sekarang ini dalam melaksanakan program pembangunannya tidak dapat menerapkan pola-pola yang bersifat arahan, instruksi, binaan maupun pedoman pelaksanaan beserta petunjuk teknisnya namun lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator. Guna mempercepat keberhasilan pembangunan prasarana dasar permukiman maka peranan pemerintah dapat berupa pemberian stimulan yang berupa konsultasi dan kemudahan berkomunikasi, material dan dana.

Menurut *World Bank* peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang melibatkan masyarakat apabila dilihat dari segi pengadaan meliputi:

- Menyediakan prasarana untuk lahan perumahan, yaitu mengkoordinasikan berbagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana jalan, drainase, air bersih, pembuangan air kototr dan listrik di daerah perumahan, terutama untuk daerah-daerah yang kurang berkembang agar menjadi daerah permukiman yang berkembang dengan efisien.
- Mengatur lahan dan pembangunan rumah, yaitu menyeimbangkan biaya dan keuntungan dalam peraturan yang mempengaruhi pengadaan lahan perkotaan, pasar perumahan dan terutama tataguna lahan. Penghapusan terhadap peraturan-peraturan yang menghalangi pembangunan perumahan dan permukiman juga perlu dilakukan.
- Mengorganisir industri bangunan, yaitu menciptakan kompetisi yang lebih besar dalam dunia industri bangunan, menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengembangan dan penggunaan bahan bangunan lokal serta mengurangi penghalang dalam pergagangan yang berkaitan dengan pengadaan perumahan dan permukiman.

b. Peranan Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena mereka dapat berperan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan sangat mendorong terciptanya suatu hasil pembangunan yang baik, karena biar bagaimanapun

masyarakatlah yang mengetahui sekaligus memahami kondisi apa yang ada di wilayahnya. Disamping itu, dengan melibatkan mereka dalam proses pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan.

c. Peranan Swasta

Secara umum peranan swasta tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat, namun demikian peranan mereka sangat besar terhadap laju pembangunan. Adanya kewenangan suatu daerah untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, akan membuka peluang bagi para investor pemegang modal untuk menanamkan usahanya. Perlu disadari bersama bahwa anggaran pemerintah untuk pembangunan sangat terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang boleh dikata tidak mempunyai batas. Munculnya investor akan sangat membantu pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Apabila hal ini benar-benar bisa terwujud maka pemerintah sangat diuntungkan, karena modal yang akan dikeluarkan akan relatif sedikit dan percepatan pembangunan dapat dicapai dengan merata.

2.4 Permukiman

2.4.1 Pengertian Permukiman

Permukiman menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan pengertian perumahan menurut undang-undang ini adalah suatu kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Untuk mendukung aktifitas didalam suatu permukiman maka dibutuhkan prasarana dan sarana permukiman. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Pada undang-undang ini juga menyatakan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup. Penataan perumahan dan permukiman juga bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
- c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.
- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Sudharto P. Hadi (2005:104) berpendapat bahwa permukiman merupakan perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada didalamnya. Perumahan merupakan wadah fisik, sedangkan permukiman merupakan paduan antara wadah dengan isinya yakni manusia yang hidup bermasyarakat dengan unsur budaya dan lingkungannya. Dari pendapat ini kemudian memunculkan permukiman berwawasan lingkungan, yaitu permukiman yang mampu mengakomodasikan dan mendorong proses perkembangan kehidupan di dalamnya secara wajar dan seimbang dengan memadukan kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial.

Permukiman yang nyaman menjadi dambaan bagi setiap anggota masyarakat untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar ini. Pada kenyataannya permukiman yang ideal sangat jauh untuk dapat dicapai, lebih-lebih oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah melihat permukiman sebagai kebutuhan dasar dan sekaligus sebagai suatu sumber daya modal yang berguna untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan mereka. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah permukiman harus memenuhi syarat sebagai berikut:

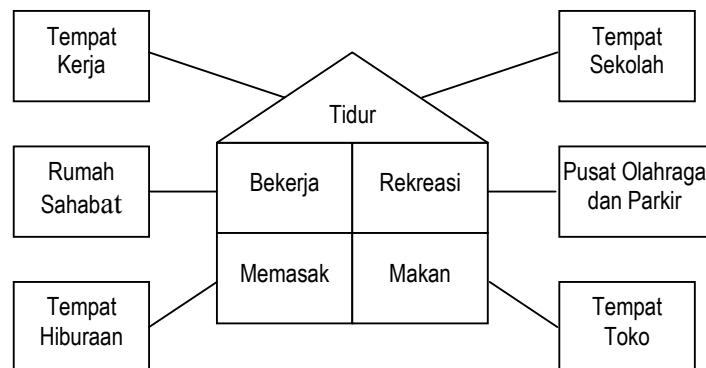
- a. Dekat dengan tempat kerja atau berlokasi di tempat yang berpeluang dalam mendapatkan pekerjaan, minimal pekerjaan di sektor informal.
- b. Kualitas fisik hunian dan lingkungan tidak penting sejauh mereka masih mungkin menyelenggarakan kehidupan mereka.
- c. Hak-hak penguasaan atas tanah dan bangunan khususnya hak milik tidak penting. Yang penting mereka tidak diusir atau digusur. Ini sesuai dengan

cara pikir mereka bahwa permukiman adalah sebuah fasilitas (*Center for Urban Studies*, 2002:41)

Dalam pengertian tradisional, perumahan dan permukiman merupakan tempat untuk berlindung, tetapi dalam dunia modern permukiman dipergunakan untuk melayani berbagai kebutuhan dan bukan hanya melindungi manusia dari berbagai elemen (White, 1982:391). Perumahan dan permukiman diharapkan dapat menyediakan ruang untuk berbagai kegiatan seperti memasak, makan, bekerja, rekreasi dan tidur. Permukiman juga menyediakan lokasi yang menentukan jarak relatif ke sekolah, tempat bekerja, tempat parkir, tempat pedagang eceran, rumah sahabat dan fasilitas lainnya.

GAMBAR 2.1

UNSUR PERMUKIMAN MODERN



Sumber: Sammis B. White: 1982:391

2.4.2 Pembangunan Permukiman Bertumpu pada Masyarakat

Timbulnya permasalahan permukiman menuntut pemerintah untuk ikut campur tangan dalam penanganan masalah permukiman. Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum dalam menangani masalah permukiman di

perkotaan telah menerapkan suatu pendekatan yang dikenal dengan Tribina, yaitu penangan suatu permukiman secara terpadu dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek pembinaan, yaitu:

- a. Bina Manusia (Sosial)
- b. Bina Usaha (Ekonomi) dan
- c. Bina Lingkungan (Ekologi).

Pendekatan Tribina ini dilakukan dengan kerjasama diantara departemen terkait dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan permukiman. Dengan demikian didalam penangan permukiman ada tiga aspek yang penanganannya harus dilakukan secara terpadu, yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan fisik. Lingkungan fisik dimaksudkan adalah suatu lingkungan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Lingkungan yang digunakan untuk permukiman diharapkan dapat memberikan manfaat (Kodoatie, 2005:321):

- a. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan infrastruktur permukiman.
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung.
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah.

- g. Menyediakan kesempatan kerja.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk lain sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat adalah melalui program pembangunan perumahan yang bertumpu pada kelompok. Program ini mengharapkan adanya inisiatif pembangunan dari masyarakat sendiri sehingga mereka terlibat secara langsung baik dalam tahap persiapan, pencarian dan pembebasan lahan, perencanaan teknis dan pengelolaannya pasca huni. Dengan demikian pembangunan perumahan beserta prasarananya adalah suatu pembangunan perumahan yang dilakukan masyarakat yang terorganisasi dengan baik dalam wadah lembaga seperti paguyuban, koperasi, kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau hanya tradisi kebersamaan dalam gotong royong. Program ini lebih memungkinkan untuk dikembangkan sebagai program pembangunan bebantuan (*aided housing programe*) yang memfasilitasi warga masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat menyelenggarakan perumahan mereka secara kooperatif/gotong royong.

Pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok, sesuai Kepmenpera Nomor 06/SKPTS/1994 : 13-14 mempunyai tujuan :

- a. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal secara mandiri dan terorganisasi, serta berkurangnya kemiskinan melalui keterpaduan program yakni bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

- b. Terjadinya gerakan pembangunan perumahan dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga setiap keluarga dapat mendiami rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat.
- c. Penyediaan perumahan melalui upaya bersama dapat dilaksanakan dengan mudah, murah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tata tertib pembangunan.

Di dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang bertumpu pada kelompok ini, sumber pendanaannya merupakan upaya bersama dari peserta yang digalang melalui kegiatan pemupukan potensi kelompok termasuk kemungkinan adanya subsidi silang antar anggota yang berbeda penghasilan. Adapun bentuk pendanaan tersebut adalah:

- a. Swadaya Murni, adalah dana yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan adalah dana swadana yang diperoleh, dikumpulkan dan dimobilisasi oleh kelompok tanpa menutup kemungkinan subsidi silang anggota kelompok, contoh arisan rumah.
- b. Kerjasama, seluruh pembangunan dilakukan secara gotong royong dimana tiap pihak yang terlibat punya obligasi yang sama untuk berkontribusi sumber daya yang dikuasai, contoh : perumahan gotong royong.
- c. Pinjaman, dana yang dipergunakan pada dasarnya diperoleh dari pihak lain. Pinjaman ini bisa bersifat non institusional dan non formal (dari kerabat) sampai yang bersifat institusional dan formal (dari bank/lembaga keuangan).
- d. Dana mitra dan dana solidaritas, dana ini diperlukan untuk modal awal bagi KSM sebagai modal untuk menunjang kegiatan kelompok, mengikat seluruh

anggota untuk secara kongkrit mempunyai rasa kebersamaan, membuat anggota disiplin menabung secara tetap sekaligus sebagai gambaran kemampuan kelompok dalam penyediaan dana sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan kredit, penyertaan modal untuk mendapatkan/memancing dari pihak luar.

Dari pengertian diatas maka dapat dinyatakan bahwa permukiman merupakan suatu kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal dengan segala isi dan kegiatan di dalamnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan guna mendukung perikehidupan dan penghidupannya. Permukiman dalam dunia modern tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi juga untuk melayani berbagai kebutuhannya. Untuk mewujudkan permukiman yang aman dan nyaman maka didalam penanganannya harus memperhatikan keterpaduan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan fisiknya.

2.4.3 Tipe-tipe permukiman

Menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat (1983), ciri-ciri permukiman di kota-kota yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi 3 kelompok:

- a. Permukiman yang direncanakan dengan baik (*planned*), adalah suatu permukiman yang dibangun dengan baik, teratur, serta memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas yang baik.
- b. Permukiman tanpa direncanakan dahulu (*unplanned*), adalah suatu permukiman yang tumbuh dengan pola yang tidak teratur dan minimnya

fasilitas sarana prasarana permukiman yang dimilikinya. Permukiman ini sering disebut juga dengan permukiman yang tidak teratur.

- c. Permukiman yang tidak sepenuhnya di rencanakan dengan baik, yaitu suatu permukiman yang tumbuh dan berkembang dengan jalan-jalan dan rumah dilapis pertama dengan baik, namun di lapis kedua tumbuh permukiman tidak teratur. Permukiman ini sering disebut dengan permukiman setengah teratur.

Pada permukiman yang telah direncanakan, pola-pola permukimannya terbentuk dari pola-pola jalan yang dibuat berdasarkan klasifikasi jalan lingkungannya dan perbedaan klasifikasi jalan seringkali menunjukkan adanya perbedaan tingkat sosial penghuni atau aktifitas yang dibentuk di kawasan tersebut. Sedangkan permukiman yang tidak teratur terbagi dalam dua tipe, yaitu tipe kampung dan tipe perumahan liar. Perbedaan keduanya terletak pada status legalitas baik tanah maupun bangunan. Selain itu di perkotaan dikenal adanya permukiman kumuh, yaitu berupa kampung dan perumahan liar yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan yang tinggi.

2.5 Swadaya Masyarakat

2.5.1 Pengertian Swadaya

Swadaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kekuatan sendiri atau kemampuan sendiri (1997:728). Dengan demikian swadaya masyarakat dapat diartikan sebagai kekuatan masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan lebih mengutamakan kemampuan dari diri masyarakat

sendiri. Kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri seoptimal mungkin dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama.

2.5.2 Pembangunan Bertumpu pada Swadaya Masyarakat

Pembangunan yang bertumpu pada swadaya masyarakat sangat berbeda dengan pembangunan yang dilakukan dengan melalui pendekatan *top-down*. Pembangunan yang bertumpu pada swadaya masyarakat lebih mengutamakan pembangunan dengan potensi internal sebagai sumber kekuatan. Sebaliknya pembangunan yang dilakukan secara *top-down*, berdasarkan pengalaman cara semacam ini kurang dapat mencapai sasaran, karena:

- a. Dari awal proses pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat kurang diikutsertakan sehingga masyarakat merasa tidak ikut memiliki.
- b. Walaupun suatu kegiatan pembangunan sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi masyarakat masih berkecenderungan mengharapkan pengembangannya tetap dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah.
- c. Mengingat kegiatan pembangunan yang tidak dikelola dengan baik, maka secara teknis umur kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu pembangunan prasarana dasar permukiman harus tetap melibatkan peranserta masyarakat dari awal sampai akhir. Partisipasi masyarakat tersebut sekurang-kurangnya mencerminkan dua unsur yaitu keterlibatan fisik dan mental atau rasa ikut bertanggung jawab. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman, maka peran pemerintah hanya bersifat fasilitator yang berfungsi untuk mendorong proses

pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya. Proses pembangunan proyek dari mulai perencanaan sampai dengan pengoperasiannya dilakukan sendiri oleh masyarakat sendiri.

Sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi swadaya masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan terhadap pemimpin formal (kepala desa, pamong desa dan sebagainya), pemimpin non-formal (tokoh masyarakat) dan pendekatan langsung kepada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini instansi yang dalam tugasnya berkaitan erat dengan pembangunan prasarana dasar permukiman. Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut hasil-hasil yang diharapkan di antaranya adalah :

- a. Masyarakat mampu mengadakan identifikasi permasalahan mereka di bidang pembangunan prasarana permukiman.
- b. Masyarakat mampu mengadakan evaluasi sumber daya yang ada di daerah bersangkutan.
- c. Masyarakat mampu melaksanakan pengkajian kebutuhan prasarana permukiman, baik untuk kini maupun masa mendatang.
- d. Masyarakat mampu membuat semacam perencanaan bersama untuk menentukan pengembangan yang mereka butuhkan.
- e. Masyarakat mampu menghimpun dana, baik yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari sumber dana setempat lainnya.

2.5.3 Pengembangan Dana

Pelaksanaan pembangunan dapat diartikan selalu melekat dengan kebutuhan akan dana yang diperlukan. Dana merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman. Langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan meningkatkan peranserta masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan potensi pendanaan setempat, sehingga tidak terlalu tergantung pada sumber dana dari pusat. Beberapa alternatif yang dapat ditempuh dalam hubungannya dengan sistem pendanaan ini adalah :

- a. Dana diperoleh sepenuhnya (100 %) dari masyarakat setempat. Dana tersebut dapat dikelola melalui suatu lembaga yang dibentuk dan disepakati oleh masyarakat setempat. Sistem pendanaan semacam ini merupakan sistem yang sangat ideal karena tidak diperlukan lagi dana dari pemerintah pusat. Hal juga akan berdampak pada masyarakat yang akan memeliharanya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil yang telah dibangunnya.
- b. Dana diperoleh dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat.

2.6 Partisipasi Masyarakat

2.6.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi secara harfiah mengandung arti ikut serta yang berasal dari kata asing “*take a part*” atau ambil bagian. Secara lebih umum lagi kata partisipasi dapat berarti ikut sertanya suatu kesatuan untuk ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar. Sejalan dengan hal tersebut istilah partisipasi masyarakat juga sering diartikan sebagai keikutsertaan,

keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan (Wibisana, 1989:41).

Partisipasi menurut PBB dalam Slamet (1994), adalah sebagai bentuk keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda (a) dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela, dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek. Dari sini nampak bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan serta manfaat yang akan diperolehnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Slamet, 1994). Dengan demikian partisipasi akan ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Lebih lanjut Hoofsteede (dalam Khairuddin, 1992:124-125) menyatakan bahwa peran serta berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Terkandung makna dalam peran serta terdapat proses tindakan pada

suatu kegiatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan kata lain keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan untuk mengambil bagian.

Pengertian diatas mengandung maksud bahwa partisipasi merupakan proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut sudah dapat dianggap sebagai suatu peran serta masyarakat dalam berpartisipasi.

2.6.2 Tipe Partisipasi

Dalam partisipasi masyarakat dikenal adanya tiga tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diantaranya yaitu:

- a. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan, dapat atau layak dioperasikan).
- b. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi).
- c. Dalam kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial dan personel).

Dalam kegiatan evaluasi termasuk keterlibatan dalam proses yang berjalan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Cohen dan Uphoff, dalam Komarudin, 1997:320).

2.6.3 Tingkatan Partisipasi

Tingkat pelibatan masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya terbagi dalam delapan tingkatan, dari yang bersifat non-partisipasi sampai pada

kekuasaan warga. Menurut Arnstein (dalam Panudju, 1999:72-76) tingkatan tersebut adalah:

a. *Manipulation* atau manipulasi

Merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat. Pada tingkat ini tidak ada peran masyarakat secara nyata karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa.

b. *Therapy* atau terapi

Pada tingkat ini, dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

c. *Informing* atau pemberian informasi

Tingkat ini merupakan tahap pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan. Pada tingkat ini, biasanya informasi diberikan secara utuh satu arah dari penguasa kepada rakyat tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik, sehingga kecil kesempatan rakyat untuk mempengaruhi dalam menentukan suatu rencana.

d. *Consultation* atau konsultasi

Pada tingkat ini bertujuan untuk mengundang opini masyarakat setelah mereka diberi informasi. Cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya

jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pertemuan lingkungan, survey tentang pola pikir masyarakat dan dengan dengar pendapat publik.

e. *Placation* atau perujukan

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh meskipun dalam berbagai hal masih ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya merupakan wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat sudah mendapat perhatian, tetapi suara masyarakat itu sering tidak didengar karena keududukannya relatif rendah dan jumlahnya terlalu sedikit dibanding dengan anggota yang berasal dari instansi pemerintah.

f. *Partnership* atau kemitraan

Pada tingkatan ini, atas kesepakatan bersama kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian tanggungjawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

g. *Delegated Power* pelimpahan kekuasaan

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak

menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan suatu permasalahan, maka pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tanpa memberikan tekanan-tekanan.

h. *Citizen Control* atau masyarakat yang mengontrol

Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan ataupun pinjaman dana tanpa melalui pihak ketiga.

2.6.4 Faktor Internal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Didalam pembangunan prasarana dasar permukiman tingkat keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat setempat. Secara teoritis semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman maka akan semakin cepat pula pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan prasarana dasarnya. Dengan demikian semakin tinggi potensi/kekuatan internal yang dimiliki masyarakat maka akan semakin mempercepat proses pelaksanaan pembangunannya. Kemampuan individu dengan sendirinya akan sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk keterlibatannya dalam pembangunan prasarana dasar. Faktor-faktor intern yang akan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian (Slamet 1994:97).

a. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno (1992), mengatakan bahwa didalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi.

b. Usia

Faktor usia memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Penemuan menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa usia sangat berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta (Slamet, 1994:142).

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam program penataan lingkungan permukiman. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan dapat ikut berperan pada tahap perencanaan sampai tahap pengembangan, sementara penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah akan dapat berperan pada tahap pelaksanaan

dan pemanfaatan. Dengan pendidikan yang semakin tinggi, seseorang akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, cepat tanggap dan inovatif.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Baross (dalam Suparlan 1993:122) menyatakan bahwa banyak hal tampak bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk termiskin kebanyakan melakukan pekerjaan dan tidak mengkontribusi uang, sementara buruh yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

e. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan sangat berkaitan dengan tingkat penghasilan masyarakat. Jenis pekerjaan akan sangat berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu (Slamet, 1994:115-116). Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Budihardjo (1993:113) menyatakan bahwa bahwa banyak warga yang telah disibukkan oleh kegiatan sehari-hari kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar.

Bentuk partisipasi masyarakat sendiri dapat dikategorikan ke dalam bentuk pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian serta barang dan uang. Menurut

Keith Davis (dalam Sastrosaputro, 1988:16) menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga.
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri.
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja.
- f. Aksi massa.
- g. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga.
- h. Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonomi.

Sedangkan menurut Whyte (dalam UNICEF, 1999:15), klasifikasi bentuk peran serta yang dikembangkan dalam tahun 1981 adalah sebagai berikut:

- a. Konsultasi.
- b. Sumbangan finansial oleh masyarakat.
- c. Proyek untuk menolong diri sendiri oleh kelompok yang memanfaatkan.
- d. Proyek untuk menolong diri sendiri yang melibatkan seluruh masyarakat.
- e. Masyarakat dengan keahlian tertentu.
- f. Aksi massa.
- g. Kesepakatan kolektif untuk merubah lingkungan sekitar.
- h. Endogenous development.
- i. Proyek autonomous community.
- j. Pendekatan kebutuhan dengan pemenuhan sendiri.

Untuk mengukur peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan dapat dilakukan dengan mengukur tingkat peran serta individu dengan skala yang dikemukakan oleh Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet, 1994:82-89). Chapin mengungkapkan bahwa skala peran serta dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat peran sosial yaitu:

- a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial.
- b. Kehadiran dalam pertemuan.
- c. Membayar iuran/ sumbangan.
- d. Keanggotaan dalam kepengurusan.
- e. Kedudukan anggota dalam kepengurusan.

Sedangkan peran serta menurut Goldhamer dapat diukur melalui lima variabel, yaitu:

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki.
- b. Frekuensi kehadiran.
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memegang jabatan.
- d. Lamanya menjadi anggota.
- e. Tipe asosiasi yang dimasuki.

2.7 Pembangunan Prasarana Berbasis pada Masyarakat

Pembangunan prasarana dasar permukiman akan lebih efektif dengan melibatkan masyarakat. Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerjasama yang berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Menurut Habitat, peran serta masyarakat bukanlah untuk :

- menyuruh masyarakat untuk melakukan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.
- menanyakan pendapat masyarakat tentang program yang telah dipersiapkan, untuk selanjutnya membuat perubahan-perubahan kecil.
- meminta masyarakat untuk membayar sebagian biaya proyek atau kegiatan yang dilakukan (Habitat-Citynet: 1997:32).

Bentuk peran serta masyarakat merupakan bentuk sumbangan untuk berperan serta yang dapat berupa pikiran, tenaga, uang, material dan berupa kegiatan. Bentuk peran serta yang berupa kegiatan dapat dilakukan dengan:

- melaksanakan sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
- Aksi bersama oleh sebagian masyarakat tertentu yang ahli.
- Aksi massa/gotong royong.
- Membuat kesepakatan/aturan-aturan tertentu untuk mengelola prasarana lingkungannya.
- Diserahkan dalam bentuk proyek/kontrak kerja baik ke perseorangan, pihak lain atau oleh masyarakat sendiri dengan dana dari pihak ketiga, masyarakat yang memanfaatkan atau seluruh masyarakat.

Pembangunan prasarana dasar permukiman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga bersama masyarakat dan swasta. Ketiganya dalam pelaksanaan pembangunan akan saling membutuhkan dan melengkapi, kekurangan salah satu komponen akan ditutup dengan kelebihan komponen lainnya. Demikian juga pada tahap pemeliharaannya, kerjasama diantara ketiganya mutlak diperlukan. Pemeliharaan pembangunan prasarana

permukiman yang telah dibangun antara masyarakat dan swasta seharusnya diserahkan kepada pemerintah, tetapi dengan tetap melibatkan masyarakat kondisi fisik bangunan akan lebih mempunyai usia yang panjang dan lebih terawat.

Penyerahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan telah diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 1987 dan Inmendagri nomor 30 tahun 1990. Tujuan penyerahan ini adalah untuk kelangsungan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan agar berfungsi sebagaimana mestinya dan mempunyai kualitas sesuai dengan rencana pengembangan. Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial adalah penyerahan seluruh atau sebagian prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial berupa tanah atau tanpa bangunannya dalam bentuk asset dan atau pengelolaan dan atau tanggungjawab dari Perum Perumnas atau Perusahaan Pembangunan Perumahan kepada Pemerintah Daerah. Didalam upaya penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial tersebut diperlukan persiapan penanganan dalam pengelolaan pemeliharaannya lebih lanjut dari pemerintah daerah yang bersangkutan dengan dilandasi pada kemampuan pengelolaan serta penggalan sumber daya bagi pengembangannya. Karena kemampuan pemerintah daerah mengenai penyediaan dana dan perangkat administrasi sangat terbatas sementara di lain pihak pertumbuhan lingkungan permukiman semakin pesat, sehingga perlu diatur hal-hal yang menyadarkan kepentingan semua pihak terutama mengenai syarat penyerahan, tata penyerahan, anggaran penyerahan dan pengelolaan serta pengawasan dari pemerintah daerah. Secara lebih lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Syarat penyerahan:

- a. Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penyediaan tanah untuk fasilitas sosial telah selesai dilaksanakan dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh pemerintah daerah.
- b. Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penyediaan tanah untuk fasilitas sosial telah memenuhi standar sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana tidak Bersusun.
- c. Telah mengalami pemeliharaan dan Perum Perumnas atau Perusahaan Pembangunan Perumahan paling lama 1 tahun terhitung sejak selesainya pembangunan prasarana termaksud dengan ketentuan:
 - minimal 50% dari tahapan pembangunan rumah yang direncanakan telah dibangun.
 - luas minimal tahapan pembangunan adalah 5 ha.
 - untuk luas areal lebih kecil dari 5 ha penyerahannya dilakukan sekaligus.
- d. Masa pemeliharaan paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara pendahuluan kedua dan atau Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Kriteria penilaian terhadap prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah meliputi:

- a. Penilaian dasar, yaitu untuk menilai seberapa jauh kebenaran atau penyimpangan antara yang telah ditetapkan di dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan. Penilaian berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

- luas areal terbangun dan tidak terbangun.
 - lokasi/ tata letak menurut peruntukannya.
 - kelengkapan unit.
 - sistem jaringan jalan.
- b. Kelengkapan Teknik, yaitu menilai baku mutu teknik prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial. Penilaian dilakukan atas beberapa faktor, antara lain:
- konstruksi.
 - dimensi
 - pematangan dan pemanfaatan lahan.

Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk prasarana lingkungan, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- b. Untuk utilitas umum, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- c. Untuk fasilitas sosial dan tanah telah siap untuk dibangun.

Proses penyerahan dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- a. penyerahan biasa, yaitu penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang telah selesai dikerjakan dan telah habis masa pemeliharaannya kepada pemerintah daerah.

- b. Penyerahan khusus, yaitu penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang telah lama selesai namun belum juga dilakukan penyerahan kepada pemerintah daerah.

Dalam waktu dua bulan setelah penyerahan, pemerintah daerah wajib menyerahkan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial kepada instansi yang membidangnya.

2.8 Rangkuman Kajian Teori

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka konsep-konsep yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dasar permukiman dirangkum untuk memudahkan dalam menentukan variabel-variabel penelitian. Hasil rangkuman konsep dan jenis variabel penelitian dapat dilihat pada tabel II.1.

TABEL II.1
VARIABEL PENELITIAN

No	VARIABEL	SUMBER	KRITERIA
1.	Persepsi	Kartono dan Gulo (1987:343)	persepsi, penglihatan, tanggapan adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera
2.	Pembangunan	Bintoro Tjokroamidjojo, 1988	Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu.
		Soedjatmoko, 1972	Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (<i>self sustaining proses</i>) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu "innerwill", proses emansiapsi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan
3.	Tujuan Pembangunan	Komarudin, (1997:92)	Tujuan pembangunan prasarana permukiman adalah: a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur. b. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya. c. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien untuk memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan.
4.	Prasarana	Grigg, 1988	Prasarana dan sarana atau <i>infrastruktur</i> merupakan suatu fasilitas fisik suatu kota atau negara yang sering disebut pekerjaan umum. infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
5.	Pelibatan Masyarakat	Slamet, 1994	Pelibatan masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

No	VARIABEL	SUMBER	KRITERIA
6.	Peran Serta	Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet, 1994)	Untuk mengukur peran serta masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilakukan dengan mengukur tingkat peran serta individu yang diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat peran sosial
7.	Jenis Peran Serta	Whyte (dalam UNICEF, 1999:15)	Klasifikasi bentuk peran serta yang dikembangkan dalam tahun 1981 adalah sebagai berikut : konsultasi, sumbangan finansial oleh masyarakat, proyek untuk menolong diri sendiri oleh kelompok yang memanfaatkan, proyek untuk menolong diri sendiri yang melibatkan seluruh masyarakat, masyarakat dengan keahlian tertentu dan aksi massa.
8.	Partisipasi	Wibisana (1989:41)	partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung (tenaga) maupun tidak langsung (keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan)
9.	Faktor Internal	Slamet (1993: 97).	Faktor-faktor intern yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian

Sumber: Hasil Analisis

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG

3.1 Kondisi Umum Kota Magelang

3.1.1 Letak Geografis

Kota Magelang pada umumnya berada pada ketinggian 380 m diatas permukaan laut dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 m diatas permukaan laut. Keberadaan Gunung Tidar selain sebagai kawasan hutan lindung juga berfungsi sebagai paru-paru Kota yang menjadikan iklim Kota Magelang selalu berhawa sejuk. Secara administrasi Kota Magelang di kelilingi oleh Wilayah Kabupaten Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
- Sebelah Timur : Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang

Selain berbatasan dengan wilayah tersebut diatas, Kota Magelang juga dibatasi dengan batas alam berupa Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo untuk batas di sebelah Barat.

Secara Geografis Kota Magelang terletak pada posisi $7^{\circ}26'18''$ - $7^{\circ}30'9''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}12'30''$ - $110^{\circ}12'52''$ Bujur Timur yang letaknya hampir di tengah-tengah Pulau Jawa. Kondisi inilah yang memudahkan jalur perhubungan Kota Magelang dengan kota-kota di sekitarnya yaitu pada jalur transportasi antara Semarang – Yogyakarta, Semarang – Purwokerto, Wonosobo - Salatiga dan kota-

kota di sekitarnya. Dari Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, Semarang berjarak 75 km sehingga akan memudahkan pemerintah Kota Magelang dalam berkoordinasi dalam Bidang Pemerintahan. Kota Magelang juga menjadi daerah tujuan bagi penduduk sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dari Kabupaten Temanggung yang berjarak 22 km, Kabupaten Purworejo berjarak 43 km, Kabupaten Wonosobo berjarak 62 km.

Kota Magelang merupakan salah satu Kota yang berada di Wilayah Propinsi Jawa Tengah diantara 35 Kabupaten/Kota lainnya. Sebagai Kota terkecil di Jawa Tengah yang hanya mempunyai luas 0,06% dari keseluruhan luas Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang mempunyai luas wilayah 18,12 km². Penggunaan lahan terbesar berupa pekarangan dan bangunan yaitu sebesar 72,73%, sawah dengan pengairan teknis 12,09%, perkebunan 5,49% dan perindustrian 2,87%. Secara lebih jelas penggunaan lahan di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

TABEL III.1
LUAS TANAH MENURUT PENGGUNAANNYA
DI KOTA MAGELANG TAHUN 2004

JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS TANAH (Ha)
Tanah Sawah - Pengairan Tehnis	219,03
Tanah Kering	
1. Pekarangan/lahan untuk Bangunan dan Halaman	1.317,89
2. Tegul/Kebun/Ladang/Huma	13,94
3. Kolam/Tebat/Empang	6,68
4. Perkebunan/Hutan Rakyat	99,56
5. Industri	51,97
6. Lainnya (Makam, Jalan dll)	102,93
JUMLAH 2004	1.812,00

Sumber: Dinas Pertanian Kota Magelang

3.1.2 Pemerintahan

Berlakunya Otonomi daerah membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Setiap daerah dituntut untuk menyesuaikan dengan segala peraturan-peraturan baru yang berlaku. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah melaksanakan penataan wilayah dalam bentuk Pemekaran Kecamatan. Pemekaran Kecamatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Jumlah Kecamatan di Kota Magelang sebelum dimekarkan berjumlah 2 Kecamatan, setelah diadakan Pemekaran Kecamatan bertambah 1 Kecamatan sehingga jumlah Kecamatan di Kota Magelang menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan.

Meskipun pembentukan Kecamatan yang baru telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah, maka sambil menunggu sarana dan prasarana bagi kecamatan yang baru, secara administrasi dalam melayani masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan masih meggunakan 2 Kecamatan dan 14 Kelurahan yang lama, yaitu:

Kecamatan Magelang Selatan:

- a. Kelurahan Jurangombo
- b. Kelurahan Magersari
- c. Kelurahan Tidar
- d. Kelurahan Rejowinangun Selatan

- e. Kelurahan Rejowinangun Utara
- f. Kelurahan Kemirirejo
- g. Kelurahan Cacaban

Kecamatan Magelang Utara:

- a. Kelurahan Magelang
- b. Kelurahan Panjang
- c. Kelurahan Gelangan
- d. Kelurahan Wates
- e. Kelurahan Potrobangsari
- f. Kelurahan Kedungsari
- g. Kelurahan Kramat

3.1.3 Penduduk Kota Magelang

Pada Tahun 2004 jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 116.839 jiwa yang terdiri dari 56.418 laki-laki dan 60.421 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46%. Dari jumlah penduduk se-eks Karesidenan Kedu, maka jumlah penduduk Kota Magelang mempunyai jumlah yang terkecil yaitu 2,49%. Kepadatan rata-rata penduduk Kota Magelang pada tahun 2004 adalah 6.448 jiwa/km² dengan kepadatan di Kecamatan Magelang Utara sebesar 7.617 jiwa/km² dan di Kecamatan Magelang Selatan sebesar 5.671 jiwa/km². Di tingkat kelurahan, kepadatan tertinggi dimiliki oleh Kelurahan Gelangan dengan kepadatan penduduk 13.953 jiwa/km² sedangkan kelurahan dengan kepadatan terendah adalah Kelurahan Jurangombo yaitu sebesar 2.635 jiwa/km². Secara

lebih rinci kepadatan penduduk Kota Magelang dapat dilihat pada tabel III.2 berikut.

TABEL III.2
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATANNYA DI
KOTA MAGELANG TAHUN 2004

KECAMATAN / KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS DAERAH (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK PER KM ²
Magelang Selatan	61.723	10.884	5.671
1. Jurangombo	8.683	3.295	2.635
2. Magersari	8.514	1.025	8.306
3. Tidar	12.032	2.050	5.869
4. Rejowinangun Selatan	8.711	0.880	9.899
5. Rejowinangun Utara	11.026	2.150	5.128
6. Kemirirejo	5.549	0.977	5.680
7. Cacaban	7.208	0.507	14.217
Magelang Utara	55.116	7.236	7.617
1. Magelang	7214	0.829	8.702
2. Panjang	6.159	0.452	13.626
3. Gelangan	7.088	0.508	13.953
4. Wates	6.928	0.893	7.758
5. Potrobangsari	8.957	1.375	6.514
6. Kedungsari	6.916	0.898	7.702
7. Kramat	11.854	2.281	5.197
JUMLAH 2004	116.839	18,120	6.448
JUMLAH 2003	116.307	18,120	6.419
JUMLAH 2002	116.033	18,120	6.404

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Sejalan dengan potensi Kota Magelang sebagai hinterland untuk daerah sekitarnya maka membawa konsekunsi mengalirnya penduduk sekitar untuk mencari penghidupan di Kota Magelang. Tidaklah mengherankan apabila di siang hari Kota Magelang mempunyai penduduk yang dapat mencapai dua kali lebih besar dibanding malam hari. Dengan demikian telah membawa konsekuensi bahwa segala fasilitas yang ada di Kota Magelang tidak hanya penduduk Kota Magelang saja yang menikmatinya, tetapi penduduk sekitarnya juga akan ikut merasakan dan menikmatinya.

3.2 Kondisi Umum Obyek Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup spasial penelitian terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman ini, maka untuk pelaksanaan penelitian telah dipilih tiga kelurahan dari empat belas kelurahan yang ada di Kota Magelang sebagai obyek penelitian, yaitu Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari. Untuk memperoleh gambaran kondisi dari ketiga kelurahan tersebut, berikut akan di jelaskan potensi yang ada di masing-masing kelurahan.

3.2.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Dari tiga kelurahan yang dijadikan obyek penelitian, Kelurahan Kramat mempunyai luas wilayah terluas dibanding dengan dua kelurahan lainnya yaitu seluas 2,28 Km² dan berturut-turut Kelurahan Potrobangsari seluas 1,37 Km² dan Kelurahan Magersari seluas 1,03 Km². Mengingat kecilnya wilayah kelurahan, disisi lain sangat menguntungkan untuk penyelenggaraan pemerintahan karena masing-masing kelurahan akan sangat mudah untuk saling berkoordinasi baik dengan Kantor Kecamatan maupun Kantor Pemerintahan lainnya.

Untuk batas wilayah administrasi, Kelurahan Magersari berbatasan langsung dengan kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Magelang, kecuali sebelah selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Untuk Kelurahan Kramat, selain berbatasan dengan kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Magelang, sebelah barat dibatasi dengan Sungai Progo yang sekaligus sebagai batas administrasi dengan Wilayah Kabupaten Magelang dan sebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk Kelurahan

Potrobangsari, selain berbatasan dengan kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Magelang, sebelah barat di batasi dengan Sungai Progo yang keberadaannya sekaligus sebagai batas antara Wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

3.2.2 Penduduk pada Obyek Penelitian

Dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian penduduk Kelurahan Kramat merupakan penduduk terbanyak diantara dua kelurahan lainnya, yaitu sebesar 11.854 jiwa. Sedangkan kelurahan Potrobangsari berpenduduk 8.957 jiwa dan Kelurahan Magersari berpenduduk 8.514 jiwa. Meskipun mempunyai penduduk yang terbanyak diantara kelurahan lainnya, Kelurahan Kramat apabila dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya malah menduduki urutan ketiga yaitu sebanyak 5.197 jiwa/km². Sedangkan Kelurahan Magersari mempunyai tingkat kepadatan tertinggi sebanyak 8.306 jiwa/km², dan Kelurahan Potrobangsari dengan tingkat kepadatan sebanyak 6.514 jiwa/km². Hal ini bisa terjadi karena wilayah Kelurahan Kramat lebih luas dibanding dengan dua kelurahan lainnya.

Apabila dilihat dari jenis mata pencaharian dari masing-masing kelurahan ternyata jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduknya sangatlah bervariasi. Di Kelurahan Magersari yang terdiri dari 2.111 KK, ternyata sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai pedagang yaitu sebanyak 1.409 orang. Hal ini sangat memungkinkan karena wilayah Kelurahan Magersari berdekatan dengan pusat perdagangan Kota Magelang khususnya Pasar Rejowinangun yang merupakan pasar induk bagi penduduk Kota Magelang maupun wilayah hinterlandnya. Selain berdagang, penduduk Kelurahan Magersari juga bermata

pencapaian sebagai buruh bangunan (1.092 orang) dan sebagai buruh industri (386 orang).

Kelurahan Kramat dengan 2.854 KK sebagian besar penduduknya bermatapencapaian sebagai PNS/ABRI, yaitu sebanyak 2.304 orang. Sedangkan dua terbanyak lainnya adalah sebagai buruh tani sebanyak 864 orang dan sebagai pedagang sebanyak 761 orang. Mengingat luasnya wilayah Kelurahan Kramat, tidak mengherankanlah apabila peruntukannya sebagian besar berupa tanah pertanian.

Sama halnya dengan Kelurahan Kramat, Kelurahan Potrobangsari dengan 2.286 KK, sebagian besar penduduknya bermata pencapaian sebagai PNS/ABRI, yaitu sebanyak 1.057 orang. Sebanyak 529 orang bermata pencapaian yang tidak jauh berbeda dengan sebagian besar penduduknya yaitu merupakan pensiunan PNS/ABRI. Jumlah penduduk yang bermata pencapaian sebagai PNS/ABRI ataupun pensiunan di Kelurahan Potrobangsari yang sangat besar ini (45,66%) menjadikan salah satu alasan dipilihnya kelurahan ini menjadi salah satu obyek penelitian. Jenis pekerjaan terbanyak ketiga yang banyak dikerjakan oleh penduduk Kelurahan Potrobangsari adalah sebagai pedagang, yaitu sebanyak 437 orang.

Untuk lebih jelasnya mata pencapaian penduduk dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.3 sebagaimana berikut:

TABEL III.3
JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT
MATA PENCAHARIAN DI KELURAHAN MAGERSARI, KELURAHAN
KRAMAT DAN KELURAHAN POTROBANGSAN TAHUN 2004

No.	JENIS MATA PENCAHARIAN	KELURAHAN MAGERSASI	KELURAHAN KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN
1.	Pertanian	5	97	51
2.	Buruh Tani	2	864	125
3.	Pengusaha	5	178	299
4.	Buruh :			
	- Industri	386	212	386
	- Bangunan	1.092	506	113
5.	Pedagang	1.409	761	437
6.	Angkutan	299	241	164
7.	PNS / ABRI	229	2.304	1.057
8.	Pensiunan	174	460	526
9.	Lain-Lain	264	581	309
Jumlah		3.865	6.204	3.467

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang diolah

3.2.3 Tingkat Pendidikan Penduduk

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di ketiga kelurahan obyek penelitian maka prosentase terbanyak adalah berpendidikan setingkat SMA. Di Kelurahan Magersari jumlah penduduk yang telah menamatkan sampai ke jenjang setingkat SMA adalah sebanyak 1.722 orang atau 22,13%, Kelurahan Kramat sebanyak 3.170 orang (29,32%) dan Kelurahan Potrobangsang sebanyak 2.793 orang (33,81%). Pemberian kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi oleh Pemerintah Kota Magelang telah didukung dengan penyediaan berbagai fasilitas pendidikan yang memadai mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 5 tahun keatas di Kota Magelang tahun 2004 dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.4
BANYAKNYA PENDUDUK 5 TAHUN KEATAS MENURUT
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI KELURAHAN
MAGERSARI, KELURAHAN KRAMAT DAN KELURAHAN
POTROBANGSAN TAHUN 2004

No.	PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	KELURAHAN MAGERSASI	KELURAHAN KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN
1.	Universitas / Akademi	351	1.211	790
2.	SLTA	1.722	3.170	2.793
3.	SLTP	1.526	1.812	1.685
4.	SD	2.494	2.616	1.625
5.	Tidak / Belum Tamat	1.690	2.003	1.368
Jumlah		7.783	10.812	8.261

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang diolah

3.2.4 Banyaknya Rumah

Kondisi rumah dari ketiga kelurahan sebagai obyek penelitian ternyata di setiap kelurahan rumah yang bersifat permanen merupakan jenis yang paling banyak. Kelurahan Magersari jenis rumah permanen berjumlah 695 buah atau 43,79%, di Kelurahan Kramat sebanyak 1.953 buah atau 76,44% dan di Kelurahan Potrobangsari berjumlah 50,16%. Terhadap rumah yang masih berjenis semi permanen dan terutama sekali yang masih berdinding kayu/papan dan bambu Pemerintah Kota Magelang dalam program peningkatan rumah yang tidak layak huni telah memberikan bantuan untuk peningkatan/pemugaran rumah yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya banyaknya rumah menurut jenis bangunan rumah dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.5
BANYAKNYA RUMAH MENURUT JENIS BANGUNANNYA
DI KELURAHAN MAGERSARI, KELURAHAN KRAMAT DAN
KELURAHAN POTROBANGSAN TAHUN 2004

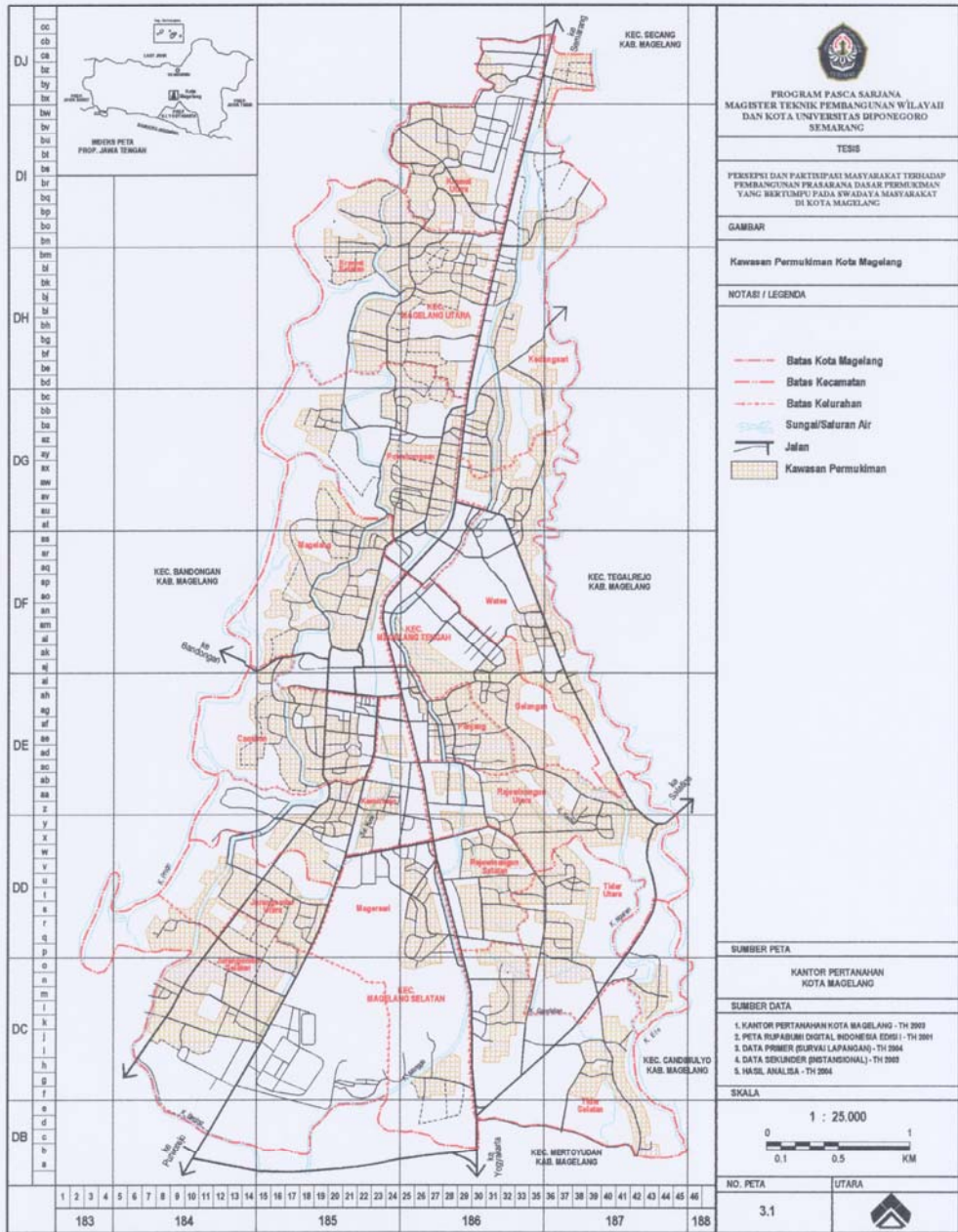
No.	JENIS BANGUNAN RUMAH	KELURAHAN MAGERSASI	KELURAHAN KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN
1.	Permanen	695	1.953	1.108
2.	Semi Permanen	677	491	586
3.	Papan / Kayu	139	94	356
4.	Bambu / Lainnya	76	17	160
Jumlah		1.587	2.555	2.210

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang diolah

3.3 Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP)

3.3.1 Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Sama seperti dengan kota-kota lainnya, Kota Magelang juga menghadapi berbagai permasalahan dalam membangun prasarana permukiman. Kompleksnya permasalahan yang harus segera diselesaikan menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih berhati-hati dalam menentukan program-program kerja yang akan dipilih menjadi program prioritas. Salah satu cara yang efektif dan sekarang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah dengan berusaha menyusun skala prioritas dari berbagai permasalahan, kebutuhan maupun keinginan dari berbagai pihak baik itu yang berasal dari masyarakat, swasta maupun pemerintah sendiri. Untuk menjaring aspirasi dari masyarakat maka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan sampai dengan kota sangatlah efektif untuk digunakan sebagai ajang untuk menentukan daftar urutan skala prioritas.



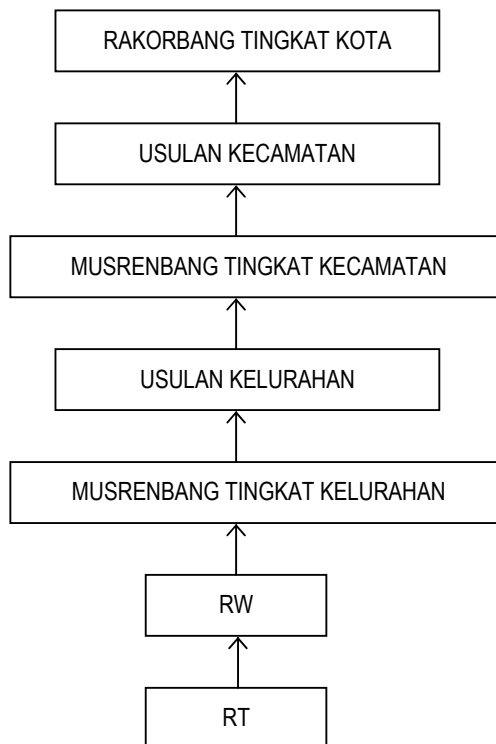
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Hasil dari forum ini diantaranya adalah tersusunnya dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Hasil penyusunan skala prioritas ini seharusnya Pemerintah Kota Magelang tinggal mengimplementasikan ke dalam berbagai jenis kegiatan, tetapi pada kenyataannya jumlah usulan yang dihimpun dari pelaksanaan musrenbang selalu jauh melebihi estimasi anggaran, karena itu kebanyakan usulan tidak akan terdani. Kondisi semacam ini akan menjadi beban pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah bagaimana cara memenuhi sisa besar dari skala prioritas yang penentuannya juga telah melalui berbagai tahap perencanaan dan proses penyaringan yang selektif.

Sesuai dengan hasil penyusunan skala prioritas terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman maka prioritas dengan nomor urutan teratas otomatis mendapat prioritas untuk di realisasikan. Disini akan menjadi dilema apabila kegiatan yang menduduki prioritas awal memerlukan anggaran yang besar, yang dengan sendirinya akan mengurangi porsi pembiayaan pada urutan kegiatan dibawahnya. Untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Kota Magelang telah mengambil kebijakan, diantaranya bahwa untuk jenis pekerjaan dengan skala besar (termasuk didalamnya berkenaan dengan volume dan anggaran) diserahkan kepada unit teknis yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang,

sebaliknya adanya jumlah usulan dengan skala kecil yang banyak diusulkan melalui musrenbang akan di salurkan melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP). Secara garis besar mekanisme penyusunan skala prioritas dalam pembangunan prasarana dasar permukiman pada setiap kelurahan di Kota Magelang dapat terlihat pada gambar 3.1 berikut.

BAGAN 3.2
MEKANISME USULAN DALAM MUSRENBANG



3.3.2 Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program P2DP

Pembangunan prasarana dasar permukiman perlu ditingkatkan kualitasnya sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Program ini akan berdampak pada manfaat otonomi daerah yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Magelang. Sedangkan sasaran program yang lebih dititik beratkan kepada

kelurahan didasarkan pada pertimbangan bahwa kelurahan merupakan institusi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Alokasi dana yang digunakan adalah berdasarkan pada prinsip pemerataan, dimana masing-masing kelurahan mendapatkan dana yang sama yang diarahakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas fisik prasarana dasar permukiman di kelurahan.

Tujuan Program P2DP adalah untuk mengajak masyarakat Kota Magelang agar lebih peduli terhadap peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program yang diwujudkan dalam bentuk dukungan material dan non material. Sejalan dengan aspek pemberdayaan yang terkandung didalamnya, program ini juga ditujukan untuk melatih masyarakat dan aparat di tingkat kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana dasar permukiman di wilayahnya. Sedangkan sasaran Program P2DP adalah terciptanya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman di semua kelurahan yang berada di Kota Magelang. Sasaran lainnya adalah terwujudnya masyarakat dan aparat kelurahan yang lebih mampu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman di wilayahnya.

Secara umum, dalam pelaksanaan program ini mengandung maksud suatu pemberdayaan masyarakat kelurahan. Aspek pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasilnya. Sedangkan setelah pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan prasarana dasar permukiman

maka masyarakat juga dituntut untuk mampu memelihara prasarana permukiman yang telah dibangun bersama dengan pemerintah kota.

Prioritas penggunaan dana pada prinsipnya adalah penggunaan yang memberikan nilai manfaat secara komunal, yaitu dana yang telah diterima oleh setiap kelurahan harus diupayakan untuk dapat dinikmati orang banyak. Sebagai contoh pada suatu kelurahan yang masih terdapat jalan yang belum diperkeras (jalan tanah) maka jalan lingkungan tersebut menjadi prioritas untuk ditingkatkan/ diperkeras. Prioritas lain adalah untuk jalan-jalan lingkungan yang menghubungkan pusat produksi dan distribusi.

3.3.3 Ruang Lingkup Program P2DP

Ruang lingkup Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman adalah peningkatan prasarana dasar lingkungan permukiman masyarakat. Sedangkan komponen-komponen program adalah meliputi:

- a. Peningkatan/ perkerasan jalan lingkungan.
- b. Peningkatan dan atau perbaikan saluran drainase.
- c. Pembangunan/ peningkatan sanitasi lingkungan.
- d. Pembangunan/ penyediaan sarana air bersih.
- e. Penyediaan sarana prasarana persampahan.
- f. Pembangunan jembatan kecil atau jembatan yang telah terbangun dengan konstruksi sederhana.

Didalam pelaksanaannya, jika dipandang perlu dan untuk keperluan yang sangat mendesak, dana langsung tersebut masih dimungkinkan untuk digunakan sebagai dana stimulan dalam peningkatan rumah kumuh. Namun hal ini bukan menjadi

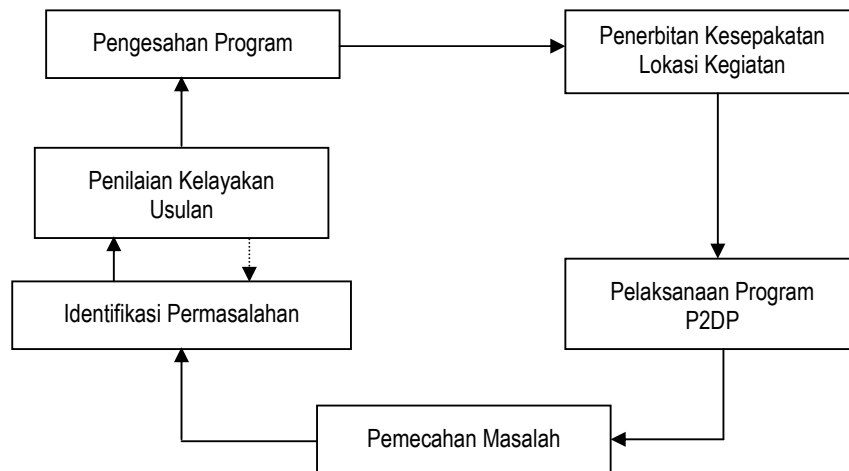
prioritas, karena dari nilai kemanfaatannya hanya bersifat perorangan dan bukan bersifat komunal.

3.3.4 Mekanisme Pengelolaan Program P2DP

Untuk mengelola pelaksanaan program diperlukan suatu kelembagaan yang menangani program di tingkat kota maupun di tingkat kelurahan. Di tingkat pemerintah kota terdapat tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari berbagai unit kerja yang terkait, dimana dalam pengelolaannya di rinci lagi menjadi tim penyusunan petunjuk pelaksanaan, tim survey lapangan, tim evaluasi, monitoring dan tim pelaporan. Sedangkan di tingkat kelurahan pembentukan tim diserahkan kepada masing-masing kepala kelurahan dan Ketua LPM.

Kegiatan yang direncanakan ditangani dalam program ini adalah bersifat sederhana dan tidak menuntut penerapan teknologi yang rumit, sehingga masyarakat setempat dipandang mampu melaksanakannya secara swakelola. Untuk itu diharapkan masing-masing kelurahan untuk menyerahkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada warga setempat dimana proyek tersebut berlokasi. Secara garis besar mekanisme pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP) tersebut dapat dijelaskan pada tahap-tahap sebagai berikut:

BAGAN 3.3
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM P2DP



Sumber: Badan Perencanaan Kota Magelang

a. Identifikasi Permasalahan

Karena program ini bermakna pemberdayaan masyarakat, maka dalam tahap perencanaan, masyarakat diminta untuk ikut mengidentifikasi permasalahan prasarana dasar yang ada di lingkungannya, yaitu identifikasi terhadap prasarana dasar permukiman yang dinilai perlu untuk ditingkatkan. Dalam menentukan usulan harus dilakukan secara musyawarah mufakat diantara anggota masyarakat. Usulan yang akan diajukan sebagai bentuk kegiatan tersebut haruslah memuat lokasi pembangunan, peruntukannya dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap lokasi kegiatan. Setelah usulan tersusun dalam skala prioritas maka Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan di ketahui Kepala Kelurahan setempat mengusulkan bentuk kegiatannya melalui Camat setempat kepada Walikota Magelang dalam hal ini Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan tembusan kepada Kepala Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Magelang.



GAMBAR 3.4
SUASANA PENYUSUNAN DAFTAR SKALA PRIORITAS UNTUK
PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

b. Penilaian Kelayakan Usulan.

Setelah diterimanya usulan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat maka Bagian Tata Pemerintah segera membuat penilaian akan kelayakan usulan tersebut. Untuk menilai kelayakan lokasi maka telah dibentuk tim survey lapangan yang beranggotakan unit kerja terkait untuk menilai kelayakannya. Apabila usulan tersebut masih perlu penyempurnaan maka usulan tersebut akan dikembalikan untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengesahannya, sebaliknya apabila usulan tersebut sudah memenuhi syarat dan tidak ada kekurangan lainnya maka usulan tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan pengesahan.





GAMBAR 3.5
BEBERAPA TIM SURVEY SEDANG MENINJAU KELAYAKAN
USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PROGAM P2DP
DI LOKASI USULAN

c. Pengesahan Program

Pengesahan program akan dilakukan apabila usulan-usulan pembangunan prasarana dasar permukiman sudah benar-benar memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hasil peninjauan lapangan oleh Tim Survey akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan terhadap kelayakan suatu kegiatan.

d. Penerbitan Kesepakatan Lokasi Kegiatan

Penilaian akan kelayakan usulan kegiatan dan pengesahan program akan dijadikan pegangan untuk penerbitan kesepakatan lokasi kegiatan. Pengesahan kegiatan dan penerbitan kesepakatan lokasi kegiatan yang sudah selesai diproses tersebut selanjutnya akan dikembalikan kepada LPM. Bersamaan dengan itu pula LPM diminta untuk segera membuat tagihan kepada Pemerintah Kota Magelang sebelum Bagian Tata Pemerintahan mentransfer dana ke tiap-tiap kelurahan yang telah memenuhi persyaratan tersebut.

e. Pelaksanaan Program P2DP

Setelah dana diterima oleh Kelurahan, maka LPM segera melaksanakan kegiatannya sesuai dengan rencana / usulan yang telah diajukan dengan tetap berkoordinasi dengan Ketua RW dan Ketua RT dimana lokasi kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Didalam pelaksanaannya Ketua LPM secara periodik harus membuat laporan kemajuan fisik kepada Kepala Kelurahan dan setelah kegiatan tersebut selesai Ketua LPM juga harus membuat laporan pelaksanaan kepada Kepala Kelurahan yang diteruskan kepada Walikota Magelang melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

f. Pemecahan Masalah

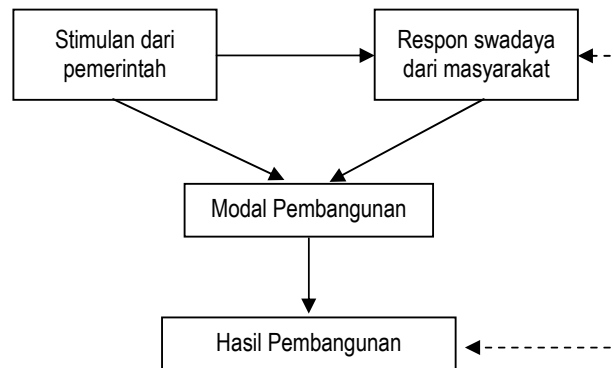
Apabila didalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman mengalami hambatan, maka Ketua LPM untuk segera melaporkannya kepada Kepala Kelurahan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Dan apabila permasalahan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan pada tingkat kelurahan maka permasalahan tersebut akan dibawa pada jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu pada tingkat kecamatan dan kalau perlu pada jenjang di tingkat pemerintah kota. Guna kesempurnaan pelaksanaan Program P2DP pada tahun-tahun yang akan datang maka segala permasalahan dan hambatan yang ditemui dilapangan akan dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Program P2DP.

3.3.5 Pelaksanaan Program P2DP pada Lokasi Penelitian

Pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat melalui Program Peningkatan Prasarana Dasar

permukiman (P2DP) di Kota Magelang ini merupakan pembangunan prasarana yang bersifat pembangunan, peningkatan ataupun perbaikan fasilitas prasarana dasar permukiman dengan skala kecil yang telah diusulkan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan di Tingkat Kelurahan (Musrenbangkel). Setiap kelurahan diberikan anggaran yang sama tanpa melihat jumlah kegiatan yang akan diusulkan.

Terbatasnya dana yang diberikan Pemerintah Kota Magelang kepada setiap kelurahan tersebut tentunya tidak akan dapat memenuhi semua usulan pembangunan dari masyarakat. Agar dapat lebih merata dan dapat terlaksana dengan cepat maka swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang dikehendaki sangatlah dibutuhkan. Bentuk swadaya tersebut dapat dilakukan berupa pemikiran, bantuan material, bantuan dana, tanah yang terkena kegiatan, bantuan tenaga dan sebagainya. Disisi lain menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan semakin mempermudah pelaksanaan pembangunan. Program P2DP selain memberikan bantuan berupa dana kepada setiap kelurahan sebenarnya juga mempunyai maksud sebagai suatu upaya pancingan/stimulus dari Pemerintah Daerah agar masyarakat mau berswadaya dalam meningkatkan kualitas sarana dasar permukimannya.



Sumber: Badan Perencanaan Kota Magelang

GAMBAR 3.6 PARTISIPASI SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA PERMUKIMAN

Pada awal pelaksanaan program pada tahun 2001 setiap kelurahan mendapat bantuan dana stimulus yang bersifat *blockgrand* sebesar Rp 20.000.000,- dan pada tahun kedua sampai dengan sekarang seiring dengan banyaknya usulan pembangunan prasarana dasar dari masyarakat maka dana yang diberikan kepada setiap kelurahan meningkat menjadi Rp 40.000.000,-. Dana yang diterimakan tersebut, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dulunya bernama LKMD. Didalam menentukan jenis maupun lokasi pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat sesuai dengan daftar prioritas pembangunan di Tingkat Kelurahan.

Dari pelaksanaan program selama ini pada setiap tahunnya, pelaksanaan jenis kegiatan P2DP di Tingkat Kelurahan pada dasarnya terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan utama yaitu berupa perbaikan jalan, perbaikan saluran/gorong-gorong, pembangunan talud dan MCK. Hampir semua kelurahan telah mengalokasikan anggarannya untuk keempat kegiatan tersebut. Sedangkan diluar

kegiatan tersebut adalah pembuatan gerobag sampah, peningkatan jembatan dan perbaikan-perbaikan yang bersifat kecil, pengecatan dan perbaikan balai kelurahan, pembuatan lampu penerangan, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tiga kelurahan sebagai obyek penelitian dapat dilihat pada tabel III.6.

Dari tabel III.6 dapat dinyatakan bahwa dari pelaksanaan Program P2DP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 ternyata dana yang ada paling banyak digunakan untuk kegiatan pembangunan saluran, baik itu berupa perbaikan, peningkatan maupun pembangunan saluran yang bersifat baru. Dana yang terserap untuk pembangunan saluran tersebut adalah sebesar Rp 154.767.500,- atau 36,85% dari dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian. Dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan maupun peningkatan saluran di 37 lokasi yang tersebar di tiga kelurahan.



GAMBAR 3.7
PEMBUATAN SALURAN DAN GORONG-GORONG DI RW 08,
KELURAHAN MAGERSARI PADA KONDISI FISIK 50% DAN 100%

TABEL III.6
JENIS KEGIATAN PROGRAM P2DP DI KELURAHAN MAGERSARI, KELURAHAN KRAMAT DAN
KELURAHAN POTROBANGSAN KOTA MAGELANG TAHUN 2001 - 2004

KELURAHAN	JALAN		SALURAN		MCK		TALUD		GEROBAK		LAIN-LAIN	
	VOL	NILAI	VOL	NILAI	VOL	NILAI	VOL	NILAI	VOL	NILAI	VOL	NILAI
Tahun 2001	8	26,500,000	3	7,500,000	3	10,500,000	0	0	2	1,500,000	4	14,000,000
- Kelurahan Magersari	2	6,000,000	3	7,500,000	2	2,500,000					1	4,000,000
- Kelurahan Kramat	5	12,500,000							2	1,500,000	2	6,000,000
- Kelurahan Potrobangsari	1	8,000,000			1	8,000,000					1	4,000,000
Tahun 2002	9	32,265,500	12	62,234,500	3	8,500,000	1	2,500,000	15	12,000,000	1	2,500,000
- Kelurahan Magersari	5	11,000,000	7	20,500,000	2	6,000,000	1	2,500,000				
- Kelurahan Kramat	3	13,000,000	4	14,000,000	1	2,500,000			10	8,000,000	1	2,500,000
- Kelurahan Potrobangsari	1	8,265,500	1	27,734,500					5	4,000,000		
Tahun 2003	12	66,711,000	11	35,533,000	1	2,901,000	12	8,105,000	8	6,750,000	0	0
- Kelurahan Magersari	3	14,211,000	7	20,783,000	1	2,901,000	4	2,105,000				
- Kelurahan Kramat	5	12,500,000	4	14,750,000			8	6,000,000	8	6,750,000		
- Kelurahan Potrobangsari	4	40,000,000										
Tahun 2004	4	40,500,000	11	49,500,000	1	3,500,000	2	23,500,000	4	3,000,000	0	0
- Kelurahan Magersari	1	5,000,000	6	27,000,000			1	5,000,000	4	3,000,000		
- Kelurahan Kramat	1	3,500,000	4	14,500,000	1	3,500,000	1	18,500,000				
- Kelurahan Potrobangsari	2	32,000,000	1	8,000,000								
Jumlah	33	204,976,500	37	154,767,500	8	25,401,000	15	34,105,000	29	23,250,000	5	16,500,000
Persentase	25,98	37,96	29,13	36,85	6,30	6,05	11,81	8,12	22,83	5,54	3,94	3,93

Sumber: Badan Perencanaan Kota Magelang diolah



GAMBAR 3.8
PEMBUATAN SALURAN DI RW 11 (RSJ), KELURAHAN KRAMAT
DENGAN KONDISI FISIK 0% DAN 100%.



GAMBAR 3.9
REHAB SALURAN DI RT 10/ RW 02, KELURAHAN POTROBANGSAN
DENGAN KONDISI FISIK 0% DAN 100%.



GAMBAR 3.10
PENGERUKAN WALET DI RT 01/RW 01, KELURAHAN
POTROBANGSAN, DENGAN KONDISI FISIK 25% DAN 100%.

Urutan kedua pemanfaatan dana P2DP adalah untuk pembangunan prasarana jalan, yaitu sebesar Rp 204.976.500,- atau 37,96% dari dana yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian. Dana tersebut telah digunakan untuk mendanai pembangunan jalan di 38 lokasi kegiatan yang tersebar di tiga kelurahan obyek penelitian.



GAMBAR 3.11
BETONISASI JALAN DI RT 11 RW 01, KELURAHAN
POTROBANGSAN, DENGAN KONDISI FISIK 0% DAN 100%.



GAMBAR 3.12
PAVINGISASI JALAN DI RT 08 RW 07, KELURAHAN
POTROBANGSAN, DENGAN KONDISI FISIK 0% DAN 100%.



GAMBAR 3.13
PENGASPALAN JALAN DI RT 01 RW 04, KELURAHAN
POTROBANGSAN, DENGAN KONDISI FISIK 0% DAN 100%.



**GAMBAR 3.14 :
PAVINGISASI JALAN DI RW VI, KELURAHAN KRAMAT DENGAN
KONDISI FISIK 0%, 50% DAN 100%**

Penggunaan terbanyak ketiga adalah penggunaan untuk pembangunan talud dengan dana yang terserap sebesar Rp 34.105.000,- atau 8,12%. Talud tersebut telah dibangun di 15 lokasi yang tersebar di tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian. Talud yang dibangun melalui program ini peruntukannya berupa talud untuk perkerasan sungai/saluran maupun untuk tebing.



**GAMBAR 3.15
REHAB SALURAN DAN TALUD DI RT 10/RW 02, KELURAHAN
POTROBANGSAN, DENGAN KONDISI FISIK 0% DAN 100%.**



**GAMBAR 3.16 :
PEMBANGUNAN TALUD DI RW 12, KELURAHAN MAGERSARI
DENGAN KONDISI FISIK 0%, 50% DAN 100%**

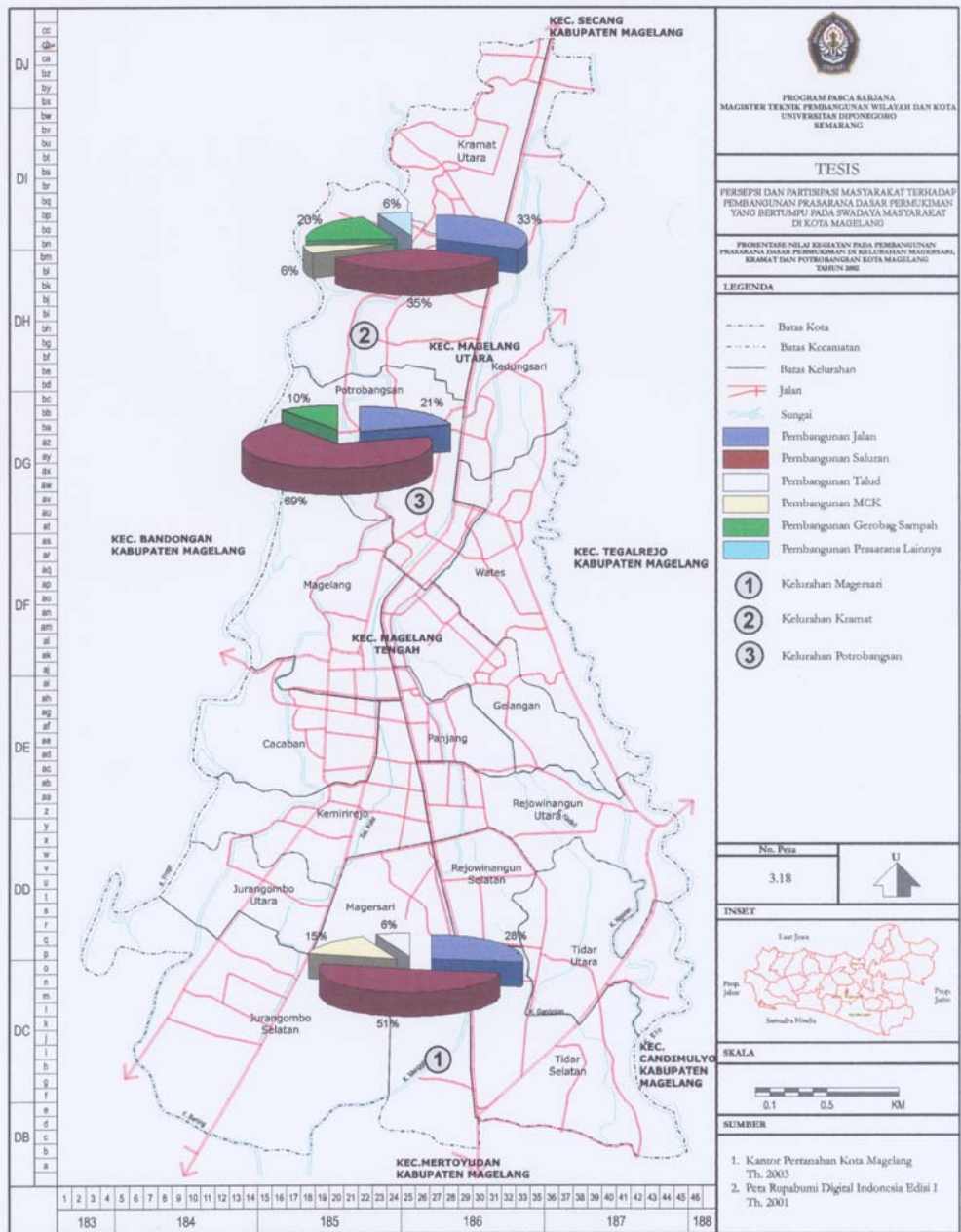
Untuk pembangunan 8 buah MCK telah menyerap dana sebesar Rp 25.401.000,- atau sebesar 6,05% dari dana yang disalurkan di tiga kelurahan sebagai obyek penelitian. Sedangkan sisanya telah digunakan untuk kegiatan seperti disebutkan diatas.

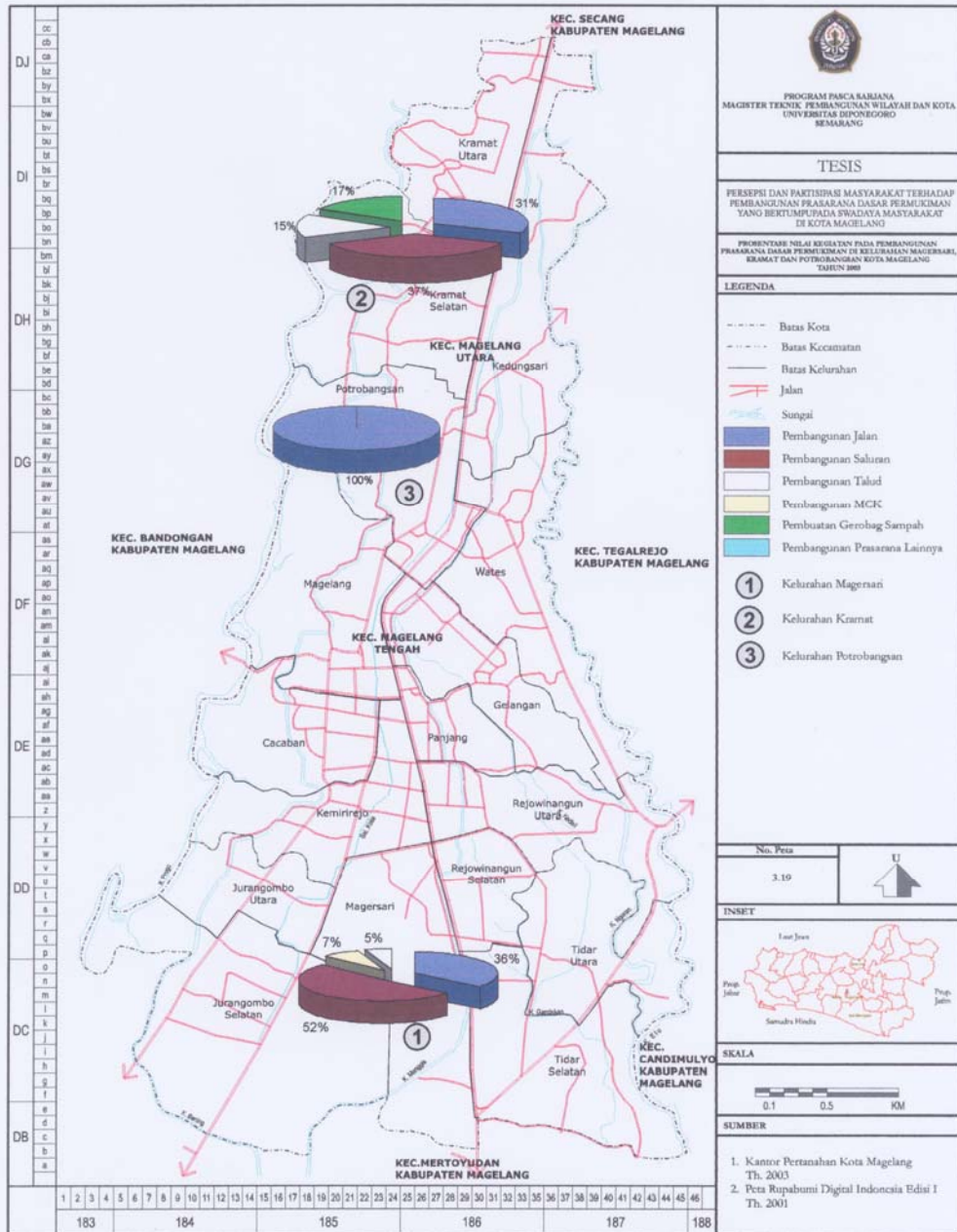
Salah satu tujuan pelaksanaan Program P2DP adalah Pemerintah Kota Magelang memberikan dana stimulan kepada masyarakat secara terbatas untuk pembangunan prasarana dasar permukiman. Untuk memenuhi kekurangan dalam pembangunan prasarana tersebut diharapkan dapat tercukupi melalui swadaya masyarakat, terutama kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan dilaksanakan. Secara umum swadaya masyarakat yang telah terkumpul selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dalam perkembangannya malah semakin menurun. Pada tahun 2002 swadaya masyarakat yang telah terkumpul sebesar 13,63% dari dana stimulan yang telah diberikan kepada setiap kelurahan. Pada tahun 2003 swadaya masyarakat yang telah terkumpul sebesar 10,33% dan pada tahun 2004 jumlah swadaya masyarakat yang telah terkumpul juga mengalami penurunan, yaitu menjadi 8,79%. Kondisi ini juga terjadi pada tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian, kecuali Kelurahan Kramat yang pada tahun 2003 sempat mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2004 juga mengalami penurunan. Swadaya yang telah terkumpul pada tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian dapat dilihat pada tabel III.7.

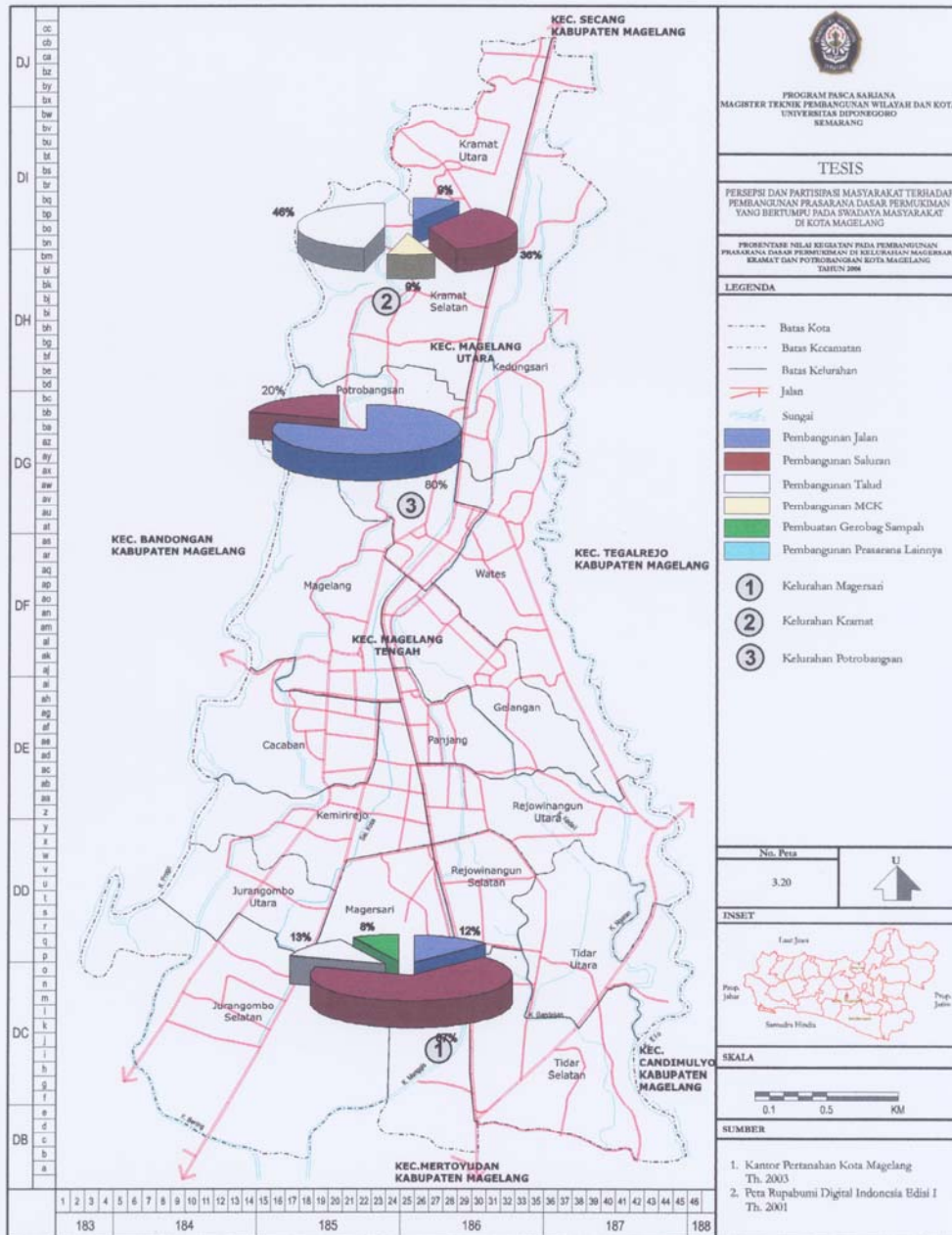
TABEL III.7
REKAPITULASI SWADAYA MASYARAKAT PADA PROGRAM P2DP
DI KELURAHAN MAGERSARI, KELURAHAN KRAMAT DAN
KELURAHAN POTROBANGSAN TAHUN 2002 – 2004

NO	KELURAHAN	SWADAYA MASYARAKAT		
		2002	2003	2004
1	Kel. Magersari	16,310,000	13,850,000	13,000,000
2	Kel. Kramat	5,150,000	8,000,000	3,543,000
3	Kel. Potrobangsari	2,500,000	2,000,000	1,800,000

Sumber: Badan Perencanaan Kota Magelang







3.4 Deskripsi Responden

Deskripsi responden bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi yang ada dari setiap responden yang terpilih dengan melihat potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimiliki pada setiap responden akan memberikan warna terhadap hasil penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengambilan sampel, maka jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini adalah sejumlah 100 responden yang tersebar di tiga lokasi obyek penelitian, yaitu masyarakat di Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari. Sedangkan untuk penentuan responden yang akan diteliti digunakan teknik purposive sampling dimana responden dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau obyek studi yang selektif dan yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik yang dalam hal ini adalah masyarakat yang benar-benar mengetahui dan terkait dengan permasalahan dari obyek penelitian. Adapun deskripsi yang akan dikemukakan meliputi jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, status kepemilikan rumah, luas tanah, luas bangunan, jenis bangunan, lama tinggal, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Untuk lebih jelasnya deskripsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin menjadi salah satu faktor internal yang akan ikut menentukan keberhasilan dalam pembangunan prasarana dasar permukiman. Menurut Soedarno (1992), mengatakan bahwa didalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria

akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi. Pada penelitian ini jumlah responden juga didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan yang perempuan. Dari 100 responden yang tersebar di tiga kelurahan ternyata sebanyak 84 orang (84,00%) berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 16 orang (16,00%) berjenis kelamin perempuan. Meskipun demikian peranan masyarakat yang berjenis perempuan tidak boleh diabaikan. Mereka dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman kebanyakan akan berperan sebagai penyedia konsumsi baik berupa makanan maupun minuman. Persentase jumlah responden menurut jenis kelaminnya secara rinci dapat dilihat pada tabel III.8.

TABEL III.8
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	Laki-laki	84	84,00
2.	Perempuan	16	16,00
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

b. Usia

Faktor usia bagi seseorang akan sangat berpengaruh terhadap keaktifan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Semakin banyak usia yang dimiliki oleh seseorang akan mengurangi peran sertanya untuk terlibat dalam kegiatan di masyarakat terutama yang berbentuk fisik. Untuk responden terbanyak pada penelitian ini ternyata justru yang memiliki usia antara 50 tahun sampai dengan 59 tahun. Mereka lebih banyak mengurus kegiatan yang ada di masyarakat, karena selain mempunyai waktu luang yang lebih banyak juga pada usia mereka mempunyai kearifan dalam berpikir. Sesuai dengan Tabel

III.9 maka usia jumlah responden terbanyak adalah pada mereka yang berumur 50 sampai dengan 59 tahun, yaitu sebanyak 36 orang (36,00%) dari jumlah responden yang ada. Urutan terbanyak selanjutnya adalah responden yang berumur 40 – 49 tahun dengan jumlah 26 orang (26,00%), disusul dengan responden yang berusia 30 – 39 tahun dengan jumlah sebanyak 20 orang (20,00%). Dari 100 responden yang ada ternyata yang berusia 60 tahun keatas sebanyak 13 orang (13,00%) dan hal ini lebih banyak daripada responden yang berusia lebih muda yaitu 20 – 29 tahun, yaitu sebanyak 5 orang (5,00%). Apabila dilihat dari komposisi umur, ternyata kelompok umur yang lebih tua belum tentu lebih sedikit peranannya dalam pembangunan prasarana dasar permukiman daripada mereka yang berusia lebih muda. Secara lebih jelas jumlah responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel III.9.

TABEL III.9
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN UMUR

NO	UMUR	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	20 – 29 tahun	5	5,00
2.	30 – 39 tahun	20	20,00
3.	40 – 49 tahun	26	26,00
4.	50 – 59 tahun	36	36,00
5.	60 tahun keatas	13	13,00
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

c. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan akan sangat mempengaruhi seseorang untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan, terutama sekali terhadap penyediaan waktu luang seseorang. Mereka yang telah disibukkan dengan urusan sehari-hari

kadangkala kurang tertarik dengan kegiatan kemasyarakatan. Dari 100 responden yang dipilih pada penelitian ini ternyata sebagian besar mempunyai pekerjaan sebagai PNS / ABRI yaitu sebanyak 35 orang (35,00%). Disusul urutan terbanyak berikutnya adalah mereka yang bekerja di sektor swasta yaitu sebanyak 24 orang (24,00%), pensiunan sebanyak 16 orang (16,00%) dan sebagai wiraswasta sebanyak 10 orang (10,00%). Sedangkan sisanya sebanyak 15 responden (15,00%) masuk pada kategori bermatapencaharian lain-lain, yaitu sebagai ibu rumah tangga, buruh, serabutan dan sebagainya. Secara lebih jelas jumlah responden menurut jenis pekerjaannya dapat dilihat pada tabel III.10.

TABEL III.10
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	PNS / ABRI	35	35,00
2.	Pensiunan	16	16,00
3.	Swasta	24	24,00
4.	Wiraswasta	10	10,00
5.	Lain-lain	15	15,00
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

d. Jumlah Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

Jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dalam suatu keluarga akan ikut pula mempengaruhi dalam berpartisipasi pada pembangunan prasarana dasar di lingkungannya. Karena semakin banyak jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungannya akan masih besar pula biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga apabila ada iuran pembangunan mereka akan mempunyai

kecenderungan untuk memberikan sumbangan dengan nilai yang belum maksimal. Dari responden terpilih pada penelitian ini ternyata terbanyak pada responden yang memiliki 3 orang jumlah anggota keluarga yang masih ditanggungnya yaitu sebanyak 29 orang (29,00%). Urutan terbanyak berikutnya adalah responden yang memiliki 2 orang tertanggung yaitu sebanyak 20 responden (20,00%), disusul kemudian responden yang memiliki tanggungan keluarga 1 orang yaitu sebanyak 18 responden (18,00%) dan sebanyak 17 responden (17,00%) menyatakan masih memiliki 4 orang anggota keluarga yang masih menjadi tanggungannya. Secara lebih rinci jumlah responden berdasarkan jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dapat dilihat pada tabel III.11 sebagaimana tersebut dibawah ini.

TABEL III.11
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA
KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	1 orang	18	18,00
2.	2 orang	20	20,00
3.	3 orang	29	29,00
4.	4 orang	17	17,00
5.	Lebih dari 5 orang	16	16,00
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

e. Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi swadaya masyarakat. Mereka yang hanya menyewa/kontrak rumah akan berbeda dengan mereka yang telah mempunyai rumah sendiri dalam hal rasa memiliki terhadap lingkungannya. Dari tabel III.12 didapatkan bahwa

sebanyak 79 responden (79,00%) telah memiliki rumah sendiri. Terbanyak selanjutnya adalah responden dengan status kepemilikan rumahnya adalah menumpang, yaitu sebanyak 11 orang (11,00%), disusul kemudian sebanyak 6 orang responden (6,00%) menyatakan bahwa mereka masih menjadi satu dengan orang tuanya. Jumlah responden terkecil adalah mereka dengan status kepemilikan rumahnya masih menyewa/kontrak, yaitu sebanyak 4 orang (4,00%) dari jumlah responden terpilih. Secara lebih jelasnya jumlah responden berdasarkan status kepemilikan rumahnya dapat dilihat pada tabel III.12 berikut.

TABEL III.12
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN
STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

NO	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	Rumah Sendiri	79	79,00
2.	Sewa / Kontrak	4	4,00
3.	Menumpang	11	11,00
4.	Masih Jadi Satu Orang Tua	6	6,00
5.	Lain-lain	-	-
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

f. Luas Tanah

Kepemilikan akan tanah juga ikut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam berswadaya pembangunan, karena semakin luas tanah yang dimilikinya maka akan semakin besar pula pembangunan prasarana yang dibutuhkan. Adanya pembangunan prasarana secara swadaya seharusnya mereka akan sangat terbantu untuk mewujudkannya dan sudah selayaknyalah apabila mereka juga memberi swadaya yang lebih besar pula dibanding mereka yang mempunyai luas tanah lebih kecil. Dari 100 responden yang terpilih, ternyata sebagian

besar dari mereka memiliki tanah dengan luas antara 100 – 149 m², yaitu sebanyak 39 orang (39,00%). Sebanyak 26 orang (26,00%) memiliki luas tanah lebih dari 200 m², selanjutnya urutan terbanyak berikutnya adalah responden dengan kepemilikan luas tanah antara 50 – 99 m² dan 150 – 199 m², yaitu masing-masing sebanyak 15 responden (15,00%). Sedangkan sisanya adalah responden dengan kepemilikan tanah seluas antara 0 – 49 m², yaitu sebanyak 5 orang (5,00%) dari jumlah responden yang ada. Secara lebih jelas komposisi dari kepemilikan lahan yang dimiliki oleh para responden dapat dilihat pada tabel III.13 berikut.

TABEL III.13
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN
LUAS TANAH YANG DIMILIKI

NO	LUAS TANAH YANG DIMILIKI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	0 – 49 m ²	5	5,00
2.	50 – 99 m ²	15	15,00
3.	100 – 149 m ²	39	39,00
4.	150 – 199 m ²	15	15,00
5.	Lebih dari 200 m ²	26	26,00
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

g. Luas Bangunan

Dari 100 responden yang terpilih di tiga kelurahan sebagai obyek penelitian ternyata bahwa sebagian besar dari mereka telah menempati bangunan rumahnya seluas lebih dari 100 m² yaitu sebanyak 42 orang (42,00%). Urutan terbanyak selanjutnya adalah mereka yang menempati rumah dengan luas bangunan fisiknya seluas antara 75 – 99 m², yaitu sebanyak 29 orang (29,00%). Selanjutnya 20 orang responden (20,00%) menyatakan bahwa mereka menempati rumah dengan keluasan antara 75 – 99 m², sebanyak 7

orang (7,00%) lainnya menyatakan bahwa bangunan rumah yang mereka tempati mempunyai keluasan antara 25 – 49 m² dan sisanya sebanyak 2 responden (2,00%) menyatakan bahwa bangunan rumah yang mereka tempati sekarang ini mempunyai keluasan kurang dari 25 m². Secara lebih jelas komposisi luas bangunan yang ditempati oleh para responden dapat dilihat pada tabel III.14 berikut.

TABEL III.14
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN
LUAS BANGUNAN YANG DIMILIKI

NO	LUAS BANGUNAN YANG DIMILIKI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	0 – 24 m ²	2	2,00
2.	25 – 49 m ²	7	7,00
3.	50 – 74 m ²	20	20,00
4.	75 – 99 m ²	29	29,00
5.	Lebih dari 100 m ²	42	42,00
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

h. Jenis Bangunan

Jenis bangunan untuk tempat tinggal yang dihuni oleh responden, sebagian besar telah telah permanen. Berdasarkan tabel III.15 maka dapat dinyatakan bahwa sebanyak 81 orang (81,00%) menyatakan bahwa rumah yang sedang ditempati sekarang ini telah dibangun secara permanen, sebanyak 13 orang responden (13,00%) menyatakan bahwa rumah yang sedang ditempati sekarang ini jenis bangunannya adalah semi permanen dan sebanyak 5 responden (5,00%) menyatakan bahwa rumah yang ditempati sekarang ini jenis bangunannya masih terbuat dari kayu. Untuk bangunan rumah yang masih terbuat dari bambu terdapat 1 orang (1,00%) yang memilihnya. Apabila dilihat dari tabel yang III.15 maka pada umumnya rumah yang sedang di

tempati oleh para responden adalah rumah yang sudah layak huni. Namun beberapa rumah yang masih terbuat dari kayu dan bambu perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya komposisi responden terhadap jenis bangunan rumah yang sedang ditempati oleh para responden dapat dilihat pada tabel III.15 berikut.

TABEL III.15
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN
JENIS BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	Permanen	81	81,00
2.	Semi Permanen	13	13,00
3.	Kayu	5	5,00
4.	Bambu	1	1,00
5.	Lain-lain	-	-
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

i. Lama Tinggal

Lama tinggal seseorang dalam menempati rumah dalam suatu lingkungan juga mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Semakin lama seseorang tinggal dalam suatu lingkungan maka dia akan semakin besar pula rasa memiliki dan kepeduliannya terhadap pembangunan di lingkungannya. Rasa kepedulian tersebut akan semakin lekat apabila masa hidupnya yaitu mulai dari lahir sampai berumah tangga juga tinggal pada lingkungan yang ditempatinya sekarang ini. Dari tabel III.16 maka dapat dinyatakan bahwa lama tinggal responden dilingkungannya terbanyak adalah pada komposisi lebih dari 25 tahun, yaitu sebanyak 41 responden (41,00%). Komposisi ini merupakan urutan teratas yang dipilih oleh para responden, hal ini dimungkinkan karena sampai dengan berkeluarga mereka tetap tinggal di rumah orang tuanya

dimana mereka juga dilahirkan. Sedangkan urutan terbanyak selanjutnya adalah para responden yang telah menempati rumahnya selama 15 – 19 tahun, yakni sebanyak 20 orang (20,00%), sebanyak 13 responden (13,00%) menyatakan bahwa mereka tinggal dilingkungannya sudah selama 10 – 14 tahun, responden lainnya sebanyak 11 responden (11,00%) menyatakan bahwa mereka telah tinggal dilingkungannya sudah selama 5 – 9 tahun, sebanyak 8 responden (8,00%) telah tinggal dilingkungannya selama 0 – 4 tahun dan sisanya sebanyak 7 responden (7,00%) menyatakan bahwa mereka telah menempati rumahnya sudah selama 20 – 24 tahun. Secara lebih jelas komposisi lama tinggal responden dapat dilihat pada tabel III.16 berikut.

TABEL III.16
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN
LAMA TINGGAL

NO	LAMA TINGGAL	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	0 – 4 tahun	8	8,00
2.	5 – 9 tahun	11	11,00
3.	10 – 14 tahun	13	13,00
4.	15 – 19 tahun	20	20,00
5.	20 – 24 tahun	7	7,00
6.	Lebih dari 25 tahun	41	41,00
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

j. **Tingkat Pendidikan**

Penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Penduduk tersebut diharapkan akan dapat ikut berperan pada tahap perencanaan sampai tahap pengembangan, sementara penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah akan dapat berperan pada

tahap pelaksanaan dan pemanfaatan. Dengan pendidikan yang semakin tinggi, diharapkan seseorang akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, cepat tanggap dan inovatif. Apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan responden maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden mempunyai pendidikan tertinggi setingkat SMU yakni sebanyak 45 orang (45,00%). Urutan terbesar selanjutnya sebanyak 26 responden (26,00%) telah memiliki tingkat pendidikan pada Perguruan Tinggi, selanjutnya sebanyak 19 responden (19,00%) mempunyai tingkat pendidikan setara SMP dan sisanya sebanyak 10 responden (10,00%) mempunyai tingkat pendidikan Tamat SD. Untuk responden dengan tingkat pendidikan SD yang tidak ditamatkan dan tidak pernah bersekolah jumlahnya tidak ada.

Dengan melihat komposisi tingkat pendidikan dari para responden maka diharapkan partisipasi mereka dalam pembangunan prasarana dasar permukiman dapat lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan seseorang selain akan memudahkan untuk berkomunikasi diharapkan pula dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pembangunan lingkungannya. Secara rinci tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.17.

TABEL III.17
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	Tidak Tamat SD	-	-
2.	Tamat SD	10	10,00
3.	Tamat SMP	19	19,00
4.	Tamat SMU	45	45,00
5.	Tamat Perguruan Tinggi	26	26,00
6.	Tidak Sekolah	-	-
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

k. Tingkat Pendapatan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Baross (dalam Suparlan 1993: 122) menyatakan bahwa banyak hal tampak bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk termiskin melakukan kebanyakan pekerjaan dan tidak berkontribusi uang, sementara buruh yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Dari 100 responden pada penelitian didapat bahwa sebanyak 41 orang (41,00%) mempunyai penghasilan antara Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000,- dan ini merupakan jumlah terbanyak diantara responden terpilih. Urutan terbanyak berikutnya adalah responden yang berpenghasilan lebih dari Rp 1.000.000,- yaitu sebanyak 32 orang (32,00%), selanjutnya 17 orang (17,00%) menyatakan bahwa mereka mempunyai penghasilan antara Rp 300.000,- s/d Rp 500.000,- setiap bulannya dan sisanya sebanyak 10 orang (10,00%) berpenghasilan dibawah Rp 300.000,-. Untuk lebih jelasnya maka komposisi tingkat pendapatan dari masing-masing responden dapat dilihat pada tabel III.18 berikut.

TABEL III.18
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN
TINGKAT PENDAPATAN

NO	TINGKAT PENDAPATAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1.	< Rp 300.000,-	10	10,00
2.	Rp 300.000,- s/d Rp 500.000,-	17	17,00
3.	Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000,-	41	41,00
4.	Lebih dari Rp 1.000.000,-	32	32,00
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Kuesioner, diolah

Apabila dilihat dari komposisi tingkat penghasilan para responden maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar penghasilan mereka sudah memadai, yaitu melebihi Upah Minimal Regional yang berlaku di Kota Magelang yaitu sebesar Rp 485.000,- . Dari para responden yang berpenghasilan memadai tersebut ternyata sebagian besar adalah mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ ABRI. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah memberikan gaji terkecil bagi para PNS minimal satu juta rupiah.

Dari gambaran deskripsi para responden yang terpilih menjadi obyek penelitian di tiga kelurahan terpilih secara lebih jelas dapat dilihat pada rangkuman tabel III.19 berikut:

TABEL III.19
REKAPITULASI KARAKTERISTIK RESPONDEN

NO	KARAKTERISTIK	JUMLAH RESPONDEN	(%)
1.	Berdasarkan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	84	84,00
	Perempuan	16	16,00
2.	Berdasarkan Usia		
	20 – 29 tahun	5	5,00
	30 – 39 tahun	20	20,00
	40 – 49 tahun	26	26,00
	50 – 59 tahun	36	36,00
	60 tahun keatas	13	13,00
3.	Berdasarkan Jenis Pekerjaan		
	PNS / ABRI	35	35,00
	Pensiunan	16	16,00
	Swasta	24	24,00
	Wiraswasta	10	10,00
	Lain-lain	15	15,00
4.	Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang Masih Menjadi Tanggungan		
	1 orang	18	18,00
	2 orang	20	20,00
	3 orang	29	29,00
	4 orang	17	17,00
	Lebih dari 5 orang	16	16,00

NO	KARAKTERISTIK	JUMLAH RESPONDEN	(%)
5.	Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah		
	Rumah Sendiri	79	79,00
	Sewa / Kontrak	4	4,00
	Menumpang	11	11,00
	Masih Jadi Satu Orang Tua	6	6,00
	Lain-lain	-	-
6.	Berdasarkan Luas Tanah		
	0 – 49 m ²	5	5,00
	50 – 99 m ²	15	15,00
	100 – 149 m ²	39	39,00
	150 – 199 m ²	15	15,00
	Lebih dari 200 m ²	26	26,00
7.	Berdasarkan Luas Bangunan		
	0 – 24 m ²	2	2,00
	25 – 49 m ²	7	7,00
	50 – 74 m ²	20	20,00
	75 – 99 m ²	29	29,00
	Lebih dari 100 m ²	42	42,00
8.	Berdasarkan Jenis Bangunan		
	Permanen	81	81,00
	Semi Permanen	13	13,00
	Kayu	5	5,00
	Bambu	1	1,00
	Lain-lain	-	-
9.	Berdasarkan Lama Tinggal		
	0 – 4 tahun	8	8,00
	5 – 9 tahun	11	11,00
	10 – 14 tahun	13	13,00
	15 – 19 tahun	20	20,00
	20 – 24 tahun	7	7,00
	Lebih dari 25 tahun	41	41,00
10	Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	Tidak Tamat SD	-	-
	Tamat SD	10	10,00
	Tamat SMP	19	19,00
	Tamat SMU	45	45,00
	Tamat Perguruan Tinggi	26	26,00
	Tidak Sekolah	-	-
11.	Berdasarkan Tingkat Pendapatan		
	< Rp 300.000,-	10	10,00
	Rp 300.000,- s/d Rp 500.000,-	17	17,00
	Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000,-	41	41,00
	Lebih dari Rp 1.000.000,-	32	32,00

Sumber: Kuesioner, diolah

Apabila dilihat dari potensi masyarakat seperti pada tabel III.19 diatas maka dapat dinyatakan bahwa untuk berswadaya dalam pembangunan prasarana dasar permukiman sebenarnya bukanlah merupakan suatu hambatan. Dari tingkat

pendapatan masyarakat 73,00% telah mempunyai pendapatan diatas Upah Minimal Regional, sedangkan dari tingkat pendidikan 71,00% telah pernah mengenyam bangku pendidikan yang cukup memadai, yaitu tingkat SMU dan Perguruan Tinggi. Lamanya tinggal seseorang akan mempengaruhi rasa memiliki dan kepedulian terhadap pembangunan prasarana di lingkungannya, hal juga bukanlah menjadi suatu hambatan karena 81,00% telah menempati di lingkungannya minimal 10 tahun dan bahkan ada yang telah menempati rumahnya mulai dari dilahirkan hingga berumah tangga.

BAB IV

ANALISA PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN DI KOTA MAGELANG

Sesuai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka untuk memudahkan analisisnya secara garis besar akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk menganalisa persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman dan pada bagian kedua untuk menganalisa partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman. Adapun tahapan analisa yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

- a. Persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman,
- b. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman,
- c. Persepsi masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman dan
- d. Partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman.

4.1 Persepsi Masyarakat terhadap Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman dilakukan dengan berusaha mengikutsertakan masyarakat pada setiap tahapan, yaitu mulai dari penjangkaran

aspirasi, penyusunan usulan kegiatan sampai dengan realisasi bentuk kegiatan yang disetujui. Penjaringan aspirasi dilakukan dengan memberi kesempatan sebesar dan seluas mungkin kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan dan keinginannya. Usulan dan pendapat mereka akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan didalam memutuskan jenis kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan. Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan akan semakin memudahkan didalam menentukan jenis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, terutama sekali didalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana permukiman seharusnya diimbangi juga dengan kemudahan dalam pengurusannya. Tidak jarang kelengkapan administrasi hanya akan menghambat dan memperlambat dalam pengusulan kegiatan. Banyaknya formulir-formulir yang harus di isi justru akan menambah beban kerja mereka. Prosedur hendaknya dibuat semudah dan sesederhana mungkin, janganlah karena prosedur yang berbelit-belit akan menghambat pelibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana di lingkungannya. Waktu untuk merealisasikan suatu jenis kegiatan sebaiknya juga tidak terlalu lama, karena semakin lama menunggu akan menjadikan masyarakat tidak sabar, frustasi yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap ketidakpercayaan lagi kepada pemerintah.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan pada sub bahasan persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman adalah persepsi pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan, persepsi masyarakat terhadap prosedur

penyusunan usulan kegiatan pembangunan, persepsi masyarakat terhadap kesesuaian rencana dengan realisasi kegiatan dan persepsi masyarakat terhadap waktu yang diperlukan untuk merealisasikan usulan kegiatan.

a. Frekuensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan

Didalam menentukan jenis kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman yang sudah berjalan selama ini sebenarnya kesempatan luas telah diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Usulan, saran ataupun pendapat dari masyarakat telah di fasilitasi oleh pemerintah melalui forum musyawarah rencana pembangunan yang setiap tahunnya selalu diselenggarakan mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan ke tingkat kota.

Terhadap pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya didapat kenyataan bahwa sebagian besar warga masyarakat pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dari tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian, sebanyak 34,48% masyarakat di Kelurahan Magersari menyatakan bahwa mereka selalu dilibatkan dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Sedangkan di Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Kramat masing-masing sebanyak 45,16% dan 42,50% masyarakatnya menyatakan hanya kadang-kadang saja mereka dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Sebaliknya masyarakat yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya, pada Kelurahan Magersari sebanyak 24,14%, di

Kelurahan Potrobangsas sebanyak 12,90% dan di Kelurahan Kramat sebesar 5,00%. Frekuensi pelibatan masyarakat didalam menyusun usulan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.1.

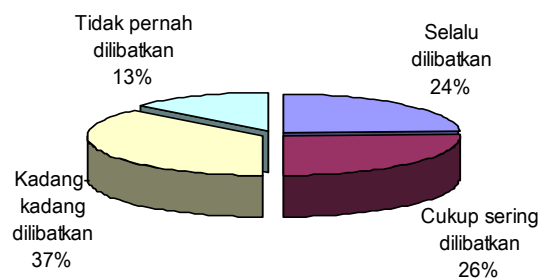
TABEL IV.1
FREKUENSI PELIBATAN MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

NO	FREKUENSI PELIBATAN MASYARAKAT	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Selalu dilibatkan	10 (34,48%)	6 (15,00%)	8 (25,81%)	24 (24,00%)
2.	Cukup sering dilibatkan	6 (20,69%)	15 (37,50%)	5 (16,13%)	26 (26,00%)
3.	Kadang-kadang dilibatkan	6 (20,69%)	17 (42,50%)	14 (45,16%)	37 (37,00%)
4.	Tidak pernah dilibatkan	7 (24,14%)	2 (5,00%)	4 (12,90%)	13 (13,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat merasakan bahwa mereka hanya kadang-kadang saja dilibatkan didalam menyusun rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar yang ada di lingkungannya dan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyatakan bahwa mereka selalu dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana di lingkungannya. Masyarakat yang selalu terlibat dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan sebagian besar adalah mereka yang menduduki kepengurusan dalam organisasi kemasyarakatan di lingkungannya baik di tingkat RT, RW maupun organisasi LPM. Sebaliknya sangat kecil sekali masyarakat yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan

prasarana di lingkungannya. Dari masyarakat yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana permukiman sebagian besar mempunyai penghasilan dibawah upah minimal regional yang berlaku di Kota Magelang. Sibuknya mereka dalam mencari penghasilan menjadikan waktu mereka sangat terbatas. Waktu yang mereka miliki lebih banyak digunakan untuk mencari tambahan penghasilan. Secara lebih jelas persentase dari frekuensi pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan dapat dilihat pada gambar 4.1.



GAMBAR 4.1
PERSENTASE FREKUENSI PELIBATAN MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

b. Persepsi Masyarakat terhadap Prosedur Penyusunan Usulan Kegiatan Pembangunan

Didalam melaksanakan prosedur pembuatan usulan pembangunan prasarana dasar permukiman, dari masyarakat Kelurahan Magersari sebanyak 79,31% menyatakan bahwa prosedur yang harus di ikuti untuk memperoleh dana stimulan prosedurnya biasa saja, demikian juga di Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Kramat masing-masing sebanyak 64,52% dan 55,00%. Sebaliknya sebanyak 5,00% masyarakat di Kelurahan Kramat menyatakan bahwa prosedur yang harus dilakukan aturannya sangat rumit sekali dan 25,00% masyarakat

lainnya di Kelurahan Kramat menyatakan bahwa prosedur yang harus mereka ikuti cukup rumit untuk diikuti. Persepsi masyarakat terhadap prosedur pembuatan usulan pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.2.

TABEL IV.2
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROSEDUR
PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

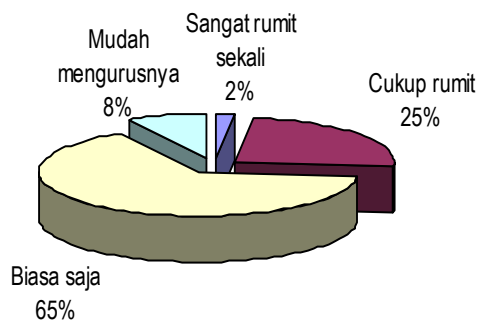
NO	PROSEDUR PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat rumit sekali	0 (00,00%)	2 (5,00%)	0 (00,00%)	2 (2,00%)
2.	Cukup rumit	3 (10,34%)	14 (35,00%)	8 (25,81%)	25 (25,00%)
3.	Biasa saja	23 (79,31%)	22 (55,00%)	20 (64,52%)	65 (65,00%)
4.	Mudah mengurusnya	3 (10,34%)	2 (5,00%)	3 (9,67%)	8 (8,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa prosedur untuk mengurus usulan kegiatan pembangunan bagi mereka bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan pembuatan usulan pembangunan ini selalu berulang-ulang dari tahun ke tahun, sehingga bagi mereka merupakan kegiatan rutin tahunan yang harus dilakukan. Sebaliknya hanya sebagian kecil saja masyarakat yang merasa kesulitan untuk mengikuti prosedur didalam pembuatan usulan pembangunan, padahal sebagian besar dari mereka memiliki pendidikan yang memadai yaitu setingkat SMU dan Perguruan Tinggi yang seharusnya mereka lebih mampu untuk mengikuti prosedur tersebut. Kenyataan ini disebabkan dari mereka sebagian besar berusia produktif, sehingga tidaklah

mengherankan apabila kemampuan mereka lebih dicurahkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan mereka.

Kesulitan didalam mengikuti prosedur penyusunan usulan kegiatan pembangunan akan berakibat pada penyerahan usulan kegiatan menjadi terlambat. Untuk menyesuaikan waktu agar didalam penyerahan usulan kegiatan pembangunan tidak terlambat maka tidak jarang ada kelurahan yang melaksanakan jaring aspirasinya dengan memajukan jadwal waktunya, sehingga waktu yang diperlukan akan menjadi lebih longgar. Secara lebih jelas persentase dari persepsi masyarakat terhadap prosedur penyusunan usulan kegiatan pembangunan dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.2
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PROSEDUR PENYUSUNAN USULAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN

c. Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan

Terhadap realisasi usulan kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman dengan kegiatan yang telah diusulkan oleh masyarakat, didapat kenyataan bahwa sebanyak 67,74% masyarakat di Kelurahan Potrobangsari menyatakan bahwa antara usulan dengan realisasi pembangunan sudah cukup

sesuai dengan usulan mereka, demikian pula di Kelurahan Kramat dan Kelurahan Magersari masing-masing sebanyak 65,00% dan 62,07%. Sebaliknya di Kelurahan Kramat sebanyak 2,50% masyarakatnya menyatakan bahwa antara usulan kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya dengan realisasi pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini dimungkinkan usulan yang telah mereka usulkan tidak dapat disetujui oleh forum pada waktu musrenbang atau usulan mereka yang telah disetujui tidak segera direalisasikan. Persepsi masyarakat terhadap kesesuaian usulan dengan realisasi kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel IV.3.

TABEL IV.3
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESESUAIAN
RENCANA KEGIATAN DENGAN
REALISASI KEGIATAN

NO	KESESUAIAN RENCANA DENGAN REALISASI KEGIATAN	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat sesuai	0 (00,00%)	6 (15,00%)	1 (3,23%)	7 (7,00%)
2.	Cukup sesuai	18 (62,07%)	26 (65,00%)	21 (67,74%)	65 (65,00%)
3.	Kurang sesuai	11 (37,93%)	7 (17,50%)	8 (25,81%)	26 (26,00%)
4.	Tidak sesuai	0 (00,00%)	1 (2,50%)	1 (3,23%)	2 (2,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

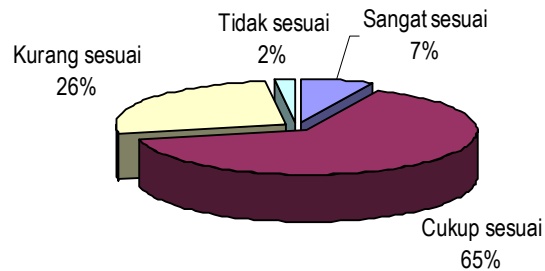
Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa antara rencana usulan kegiatan dengan realisasi pembangunan sudah cukup sesuai dengan usulan mereka. Masyarakat merasa puas karena apa yang mereka inginkan dapat direalisasikan, meskipun tidak selalu anggaran yang mereka usulkan dapat disetujui semuanya. Terhadap hal ini

masyarakat sudah dapat memaklumi dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Sebaliknya sebagian kecil masyarakat lainnya menyatakan bahwa apa yang telah direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan masih kurang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

Ketidaksesuaian tersebut terutama berkaitan dengan masalah pendanaan yang tidak terealisasi sesuai dengan yang mereka usulkan. Akibat pengurangan biaya pembangunan tersebut menjadikan masyarakat harus ikut menanggung sejumlah kekurangannya, meskipun nilainya tidak begitu besar. Hal ini terjadi karena mereka masih beranggapan bahwa semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan suatu kegiatan proyek yang biayanya telah ditanggung oleh pemerintah sampai dengan selesainya kegiatan pembangunan. Masyarakat tahunya tinggal memanfaatkan prasarana tersebut, karena untuk membangun prasarana sudah merupakan tanggung jawab, kewajiban dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Tetapi sebaliknya di sisi lain, pemerintah justru menghendaki adanya bentuk swadaya masyarakat untuk mencukupi kekurangan biaya tersebut.

Kondisi tersebut diatas dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap program pembangunan prasarana dasar permukiman di masyarakat, sehingga masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam program ini. Pemerintah daerah seharusnya sudah mulai memikirkan jalan keluarnya agar persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman dapat sepaham dengan yang dikehendaki pemerintah. Secara lebih jelas persentase persepsi masyarakat

terhadap kesesuaian rencana dengan realisasi kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.3
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KESESUAIAN RENCANA KEGIATAN
DENGAN REALISASI KEGIATAN

d. Persepsi Masyarakat terhadap Waktu yang Diperlukan untuk Merealisasikan Usulan Kegiatan.

Untuk merealisasikan usulan kegiatan tentunya tidak sekaligus langsung dapat diwujudkan, dengan pertimbangan pada skala prioritas tentunya butuh waktu dan pertimbangan untuk mewujudkan suatu usulan kegiatan. Di Kelurahan Potrobangsari sebanyak 67,74% masyarakatnya menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan usulan kegiatan pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya dibutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk mewujudkannya. Sedangkan di Kelurahan Magersari sebanyak 51,72% masyarakatnya menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk merealisasikan usulan pembangunan prasarana dasar di lingkungannya dibutuhkan waktu hanya satu tahun. Sebaliknya sebanyak 10,34% masyarakat di Kelurahan Magersari menyatakan bahwa untuk merealisasikan suatu usulan kegiatan pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya di butuhkan waktu sekitar 4 tahun atau bahkan lebih. Persepsi masyarakat terhadap waktu yang diperlukan untuk

merealisasikan suatu kegiatan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagaimana berikut.

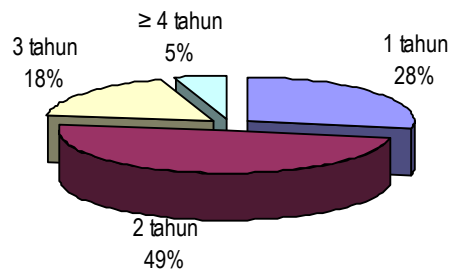
TABEL IV.4
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WAKTU YANG
DIPERLUKAN UNTUK MEREALISASIKAN USULAN KEGIATAN

NO	WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK REALISASI KEGIATAN	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Cepat (1 tahun)	15 (51,72%)	11 (27,50%)	2 (6,45%)	28 (28,00%)
2.	Cukup Cepat (2 tahun)	8 (27,59%)	20 (50,00%)	21 (67,74%)	49 (49,00%)
3.	Kurang Cepat (3 tahun)	3 (10,34%)	7 (17,50%)	8 (25,81%)	18 (18,00%)
4.	Lama (\geq 4 tahun)	3 (10,34%)	2 (5,00%)	0 (0,00%)	5 (5,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa usulan pembangunan dari masyarakat dapat direalisasikan dengan cukup cepat dan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyatakan bahwa usulan mereka cepat direalisasikan. Kalaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu usulan pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya membutuhkan waktu yang agak lama, itu karena disebabkan banyaknya usulan-usulan lainnya yang lebih prioritas untuk direalisasikan. Pembangunan yang bersifat mendadak dan memerlukan kecepatan untuk segera penanganannya seringkali juga menggeser urutan prioritas dalam urutan daftar skala prioritas yang telah ditetapkan.

Secara lebih jelas persentase persepsi masyarakat terhadap waktu yang diperlukan untuk merealisasikan suatu usulan kegiatan dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.4
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK
MEREALISASIKAN USULAN KEGIATAN

Berdasarkan uraian-uraian pada sub bahasan persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman, maka secara garis besar dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat berpersepsi hanya kadang-kadang saja dilibatkan dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan prasarana di lingkungannya. Masyarakat yang sering dan selalu dilibatkan dalam menyusun usulan rencana kegiatan pembangunan adalah anggota masyarakat yang sebagian besar menjadi pengurus pada organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat RT, RW atau LPM. Tidaklah mengherankan kalau mereka sering dilibatkan dalam kegiatan ini karena bagaimanapun juga kelancaran, keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan pembangunan menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Seringnya pengurus terlibat dalam penyusunan usulan rencana pembangunan menjadikan didalam mengikuti aturan

dan prosedur tidak mengalami kesulitan, karena sudah merupakan kegiatan rutin yang selalu berulang dan harus dilakukan pada setiap tahunnya.

Terhadap realisasai jenis pembangunan dengan rencana usulan yang telah disusun selama ini bagi sebagian besar masyarakat merasa sudah cukup sesuai meskipun harus menunggu waktu paling tidak dua tahun. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman masih diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap program P2DP. Kegiatan sosialisasi terutama sekali dapat diberikan kepada masyarakat yang kebetulan lingkungannya terpilih untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Dengan timbulnya kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah maka kelancaran pelaksanaan program pembangunan prasarana dasar permukiman akan dapat lebih berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

4.2 Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman akan lebih mudah diwujudkan dengan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin. Pelibatan masyarakat akan sangat mendorong terwujudnya suatu hasil pembangunan yang lebih efektif dan efisien, karena biar bagaimanapun masyarakatlah yang mengetahui sekaligus memahami kondisi yang ada di lingkungannya. Disamping itu, dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan memiliki terhadap program-program pembangunan. Bentuk pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan

dengan kehadirannya pada pertemuan-pertemuan yang membahas pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Kehadiran mereka merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kondisi prasarana di lingkungannya. Kehadiran mereka akan memberikan gambaran kondisi sarana permukiman di lingkungannya secara lebih rinci dan bentuk-bentuk pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat di lingkungannya. Untuk memperoleh gambaran kondisi prasarana yang sesungguhnya diharapkan mereka yang hadir dapat terlibat secara aktif dalam berdiskusi. Dari keaktifan berdiskusi akan memperjelas tingkat kepentingan dan keinginan masyarakat dari suatu jenis pembangunan yang diusulkan.

Bentuk kehadiran dalam kegiatan kerja bakti yang dilakukan di lingkungannya dapat juga digunakan sebagai salah satu untuk menilai kepedulian masyarakat dalam pembangunan prasarana di lingkungannya. Kehadiran mereka dalam kegiatan kerja bakti akan mendorong antar sesama anggota masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap prasarana yang telah ada. Rasa memiliki dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana permukiman ini pada akhirnya akan menumbuhkan keinginan mereka untuk berswadaya dalam mewujudkan prasarana yang mereka inginkan.

Pada sub pembahasan pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman pada penelitian ini indikator yang akan digunakan adalah frekuensi kehadiran dalam pertemuan, keaktifan dalam berdiskusi, keanggotaan dalam organisasi sosial kemasyarakatan, frekuensi kegiatan kerja bakti dan frekuensi kehadiran dalam kegiatan kerja bakti. Secara lebih jelas masing-masing indikator tersebut diatas akan diuraikan sebagaimana berikut.

4.2.1 Peran Serta Masyarakat

a. Frekuensi Kehadiran dalam Pertemuan

Peranan setiap anggota masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan partisipasi. Kehadiran dalam suatu pertemuan dapat digunakan sebagai salah satu untuk menilai kepedulian dari anggota masyarakat terhadap kondisi prasarana dilingkungannya. Untuk menghadiri pertemuan yang membahas pembangunan prasarana permukiman di wilayahnya sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kramat (45,00%) dan Kelurahan Magersari (37,93%) menyatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk menghadirinya. Di Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya (38,71%) menyatakan bahwa apabila mendapatkan undangan pertemuan yang membahas pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya mereka sering menghadirinya. Sebaliknya sebanyak 6,90% masyarakat Kelurahan Magersari menyatakan bahwa mereka tidak pernah menghadiri ketika mendapat undangan pertemuan yang membahas pembangunan prasarana dasar permukiman. Frekuensi kehadiran masyarakat dalam pertemuan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana permukiman secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.5.

Dari tabel IV.5 dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka sering menghadiri pertemuan yang membahas pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya, meskipun tidak selalu menghadiri secara rutin pada setiap pertemuan yang diadakan di lingkungannya. Kehadiran setiap anggota masyarakat pada setiap

pertemuan sebenarnya akan memberi manfaat yang besar, karena selain sebagai wujud kepeduliannya terhadap pembangunan di lingkungannya juga akan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan prasarana di lingkungannya.

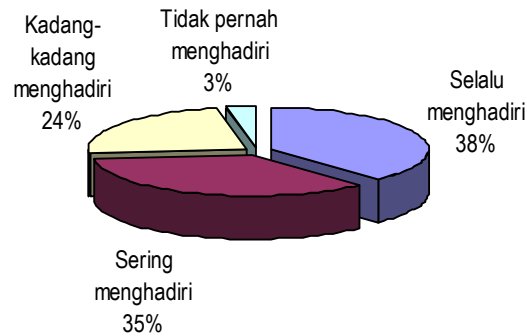
Sebaliknya hanya sebagian kecil masyarakat lainnya yang kadang-kadang menghadiri pertemuan ataupun yang tidak pernah menghadiri sama sekali pada pertemuan yang diadakan oleh lingkungannya. Dari masyarakat yang tidak pernah hadir tersebut seharusnya mereka mempunyai rasa kepedulian yang lebih tinggi, karena mereka sudah puluhan tahun tinggal di lingkungannya. Selain itu pendidikan mereka juga sudah cukup memadai yang pemikirannya sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan-masukan.

TABEL IV.5
FREKUENSI KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN

NO	FREKUENSI KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Selalu menghadiri	11 (37,93%)	18 (45,00%)	9 (29,03%)	38 (38,00%)
2.	Sering menghadiri	9 (31,03%)	14 (35,00%)	12 (38,71%)	35 (35,00%)
3.	Kadang-kadang menghadiri	7 (24,14%)	8 (20,00%)	9 (29,03%)	24 (24,00%)
4.	Tidak pernah menghadiri	2 (6,90%)	0 (0,00%)	1 (3,23%)	3 (3,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Persentase frekuensi kehadiran masyarakat dalam pertemuan yang membahas pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.5
PERSENTASE FREKUENSI KEHADIRAN
DALAM PERTEMUAN

b. Keaktifan dalam Berdiskusi

Didalam pelaksanaan pertemuan antar warga yang membahas pembangunan prasarana permukiman diharapkan banyak usulan yang akan dilontarkan masyarakat. Banyaknya usulan dari masyarakat akan memberikan pertimbangan yang lebih matang terhadap keputusan yang akan diambil, sehingga selain mendapat dukungan dari masyarakat keputusan tersebut juga dapat diambil secara lebih cepat dan tepat. Dengan semakin banyaknya anggota masyarakat yang memberikan masukan juga akan semakin mencerminkan jenis pembangunan yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat.

Dari data kuesioner diperoleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kramat (45,00%) dan Kelurahan Potrobangsari (35,48%) menyatakan bahwa mereka didalam pertemuan yang membahas pembangunan prasarana dasar permukiman sering berusaha untuk terlibat aktif berdiskusi dalam pertemuan tersebut. Di Kelurahan Magersari sendiri sebanyak 37,93% masyarakatnya menyatakan bahwa didalam pertemuan yang membahas pembangunan prasarana permukiman mereka selalu berusaha untuk aktif

berdiskusi mengikuti pertemuan tersebut dan disisi lain pada Kelurahan Magersari juga dengan jumlah yang sama mereka menyatakan bahwa mereka jarang sekali terlibat secara aktif dalam pertemuan yang membahas pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya.

Sebaliknya diperoleh kenyataan bahwa di Kelurahan Potrobangsari sebanyak 19,35% masyarakatnya tidak pernah berusaha untuk terlibat aktif dalam pertemuan yang membahas pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Di Kelurahan Kramat sendiri sebanyak 15,00% masyarakatnya dalam setiap kesempatan diskusi yang membahas pembangunan prasarana permukiman memilih diam atau tidak berusaha untuk terlibat secara aktif dalam memberikan pendapatnya. Secara lebih jelasnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif berdiskusi didalam pertemuan yang membahas pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya dapat dilihat pada tabel IV.6.

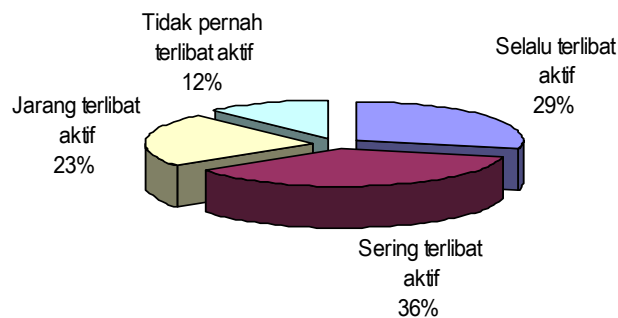
TABEL IV.6
KEAKTIFAN DALAM BERDISKUSI

NO	KEAKTIFAN DALAM BERDISKUSI	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Selalu berusaha terlibat aktif	11 (37,93%)	9 (22,50%)	9 (29,03%)	29 (29,00%)
2.	Sering terlibat aktif	7 (24,14%)	18 (45,00%)	11 (35,48%)	36 (36,00%)
3.	Jarang terlibat aktif	11 (37,93%)	7 (17,50%)	5 (16,13%)	23 (23,00%)
4.	Tidak pernah terlibat aktif	0 (0,00%)	6 (15,00%)	6 (19,35%)	12 (12,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian masyarakat yang tidak begitu besar menyatakan bahwa pada setiap pertemuan yang

membahas pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya mereka sering terlibat aktif berdiskusi meskipun sebagian kecil lainnya ada masyarakat yang menyatakan bahwa mereka jarang berusaha untuk terlibat secara aktif dan bahkan ada yang tidak pernah berusaha untuk terlibat secara aktif. Dari mereka yang tidak pernah terlibat aktif sebagian besar mempunyai latar belakang berpendidikan cukup memadai yang kalau untuk berdiskusi sudah mempunyai wawasan yang luas. Keengganan mereka untuk berdiskusi karena lebih banyak disebabkan mereka kurang biasa untuk berdiskusi dan bahkan mereka merasa tidak mempunyai kepercayaan diri terhadap usulan-usulan yang akan dilontarkan kepada forum. Mereka lebih menyerahkan hasil keputusan kepada anggota masyarakat lainnya yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dan yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Persentase frekuensi keaktifan masyarakat dalam berdiskusi dapat dilihat pada gambar 4.6 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.6
PERSENTASE KEAKTIFAN DALAM BERDISKUSI

c. Keanggotaan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Proses pembangunan yang melibatkan partisipasi swadaya masyarakat biasanya akan digerakkan melalui organisasi yang ada dalam masyarakat, baik

organisasi formal maupun in formal. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai organisasi akan mempermudah pemerintah untuk menyampaikan keinginan-keinginannya dan mempermudah pula untuk menampung aspirasi keinginan warga masyarakatnya.

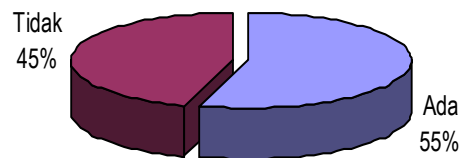
Didalam kehidupan berorganisasi pada Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya yakni sebanyak 74,19% menyatakan bahwa mereka telah mengikuti organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang ada lingkungannya, meskipun sebagian besar dari mereka hanya sebagai anggota biasa. Demikian pula di Kelurahan Magersari sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 55,17% menyatakan bahwa mereka telah mengikuti berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang ada lingkungannya. Sebaliknya sebanyak 60,00% masyarakat di Kelurahan Kramat menyatakan mereka tidak aktif didalam organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungannya. Organisasi kemasyarakatan yang hampir ada di setiap kelurahan adalah organisasi kepengurusan RT, RW, LPM, Majelis Taklim, PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Secara lebih jelas komposisi masyarakat dalam mengikuti keanggotaan organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungannya dapat dilihat pada tabel IV.7.

TABEL IV.7
KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI
SOSIAL KEMASYARAKATAN

NO	KEANGGOTAAN ORGANISASI	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Ada	16 (55,17%)	16 (40,00%)	23 (74,19%)	55 (55,00%)
2.	Tidak Ada	13 (44,83%)	24 (60,00%)	8 (25,81%)	45 (45,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengikuti berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungannya, meskipun sebagian besar diantaranya keanggotaannya hanya menjadi anggota biasa saja. Sebaliknya dengan jumlah yang cukup besar pula masyarakat lainnya yang tidak mengikuti organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungannya. Keikutsertaan masyarakat dalam organisasi sosial kemasyarakatan sebenarnya akan memudahkan pemerintah dalam menyampaikan program-programnya melalui organisasi yang ada. Secara jelas persentase keanggotaan dalam organisasi sosial kemasyarakatan dapat dilihat pada gambar 4.7 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.7
PERSENTASE KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI
SOSIAL KEMASYARAKATAN

4.2.2 Jenis kegiatan

a. Frekuensi Kegiatan Kerja Bakti.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman dapat berupa pikiran, tenaga, uang, material dan berupa kegiatan. Bentuk peran serta yang berupa kegiatan dapat dilakukan dengan melaksanakan sendiri di lingkungan tempat tinggal maupun aksi bersama oleh seluruh atau sebagian masyarakat melalui kegiatan kerja bakti maupun gotong royong. Di Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 61,29%

menyatakan bahwa untuk memenuhi pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya kadang-kadang saja dilakukan kerjabakti. Untuk Kelurahan Kramat dan Kelurahan Magersari sebagian besar masyarakatnya yakni 57,50% dan 48,28% menyatakan bahwa kegiatan kerja bakti untuk membangun prasarana dasar permukiman di lingkungannya sering diadakan. Sebaliknya di Kelurahan Magersari sebanyak 6,90% masyarakatnya menyatakan bahwa untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya tidak pernah diadakan kerjabakti. Untuk jelasnya frekuensi pelaksanaan kerja bakti untuk pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada tabel IV.8.

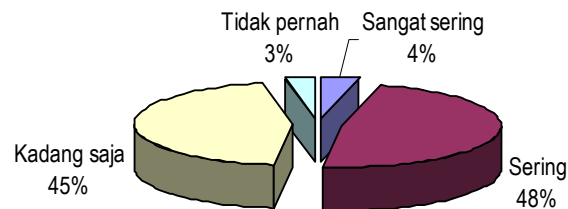
TABEL IV.8
FREKUENSI KEGIATAN KERJA BAKTI

NO	FREKUENSI KEGIATAN KERJA BAKTI	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat sering	0 (0,00%)	4 (10,00%)	0 (0,00%)	4 (4,00%)
2.	Sering	14 (48,28%)	23 (57,50%)	11 (35,48%)	48 (48,00%)
3.	Kadang saja	13 (44,83%)	13 (32,50%)	19 (61,29%)	45 (45,00%)
4.	Tidak pernah	2 (6,90%)	0 (0,00%)	1 (3,23%)	3 (3,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa di lingkungannya sering diadakan kerja bakti untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya dan dengan jumlah yang hampir sama masyarakat menyatakan bahwa dilingkungannya hanya kadang-kadang saja diadakan kerja bakti antar sesama anggota masyarakat. Kegiatan kerja bakti bagi mereka selain akan menumbuhkan rasa kekeluargaan

diantara sesama anggota masyarakat, juga akan menimbulkan rasa memiliki terhadap prasarana yang ada dilingkungannya. Sebaliknya hanya sebagian kecil saja masyarakat menyatakan bahwa dilingkungannya sama sekali belum pernah diadakan kerja bakti untuk pembangunan prasarana dasar permukiman. Secara lebih jelas persentase dari frekuensi kegiatan kerja bakti dapat dilihat pada gambar 4.8 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.8
PERSENTASE FREKUENSI KEGIATAN KERJA BAKTI

b. Frekuensi Kehadiran dalam Kegiatan Kerja Bakti.

Terhadap kehadiran warga masyarakat dalam mengikuti kegiatan kerja bakti untuk membangun prasarana dasar permukiman di lingkungannya, di Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 55,00% dan 54,84% menyatakan bahwa mereka sering mengikuti kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan di lingkungannya. Di Kelurahan Magersari sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 37,93% menyatakan bahwa mereka selalu mengikuti kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya.

Sebaliknya sebanyak 6,45% masyarakat di Kelurahan Potrobangsari menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti kerja bakti yang diselenggarakan untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di

lingkungannya. Sedangkan di Kelurahan Magersari sebanyak 3,45% masyarakatnya menyatakan mereka tidak pernah mengikuti kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan di lingkungannya. Untuk lebih jelasnya frekuensi kehadiran warga masyarakat dalam mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungannya dapat dilihat pada tabel IV.9 sebagaimana berikut.

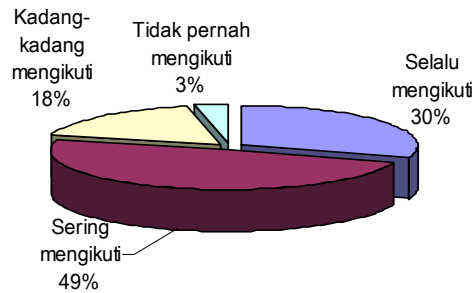
TABEL IV.9
FREKUENSI KEHADIRAN DALAM
KEGIATAN KERJA BAKTI

NO	FREKUENSI KEHADIRAN DALAM KEGIATAN KERJA BAKTI	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Selalu mengikuti	11 (37,93%)	12 (30,00%)	7 (22,58%)	30 (30,00%)
2.	Sering mengikuti	10 (34,48%)	22 (55,00%)	17 (54,84%)	49 (49,00%)
3.	Kadang-kadang mengikuti	7 (24,14%)	6 (15,00%)	5 (16,13%)	18 (18,00%)
4.	Tidak pernah mengikuti	1 (3,45%)	0 (0,00%)	2 (6,45%)	3 (3,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar warga masyarakat sering mengikuti kerja bakti yang diadakan di lingkungannya dan sebagian kecil lainnya masyarakat menyatakan bahwa mereka hanya kadang-kadang saja mengikuti kegiatan kerja bakti untuk pembangunan prasarana permukiman yang diselenggarakan di lingkungannya. Sebaliknya ada sejumlah kecil masyarakat lainnya yang menyatakan tidak pernah mengikuti kerja bakti untuk membangun prasarana permukiman di lingkungannya. Jumlah ini juga sangat signifikan dengan data pada tabel IV.8 yang menyatakan bahwa di lingkungannya tidak pernah sama sekali diadakan kerja bakti untuk membangun

prasarana permukiman. Secara lebih jelas persentase dari frekuensi kehadiran dalam kegiatan kerja bakti dapat dilihat pada gambar 4.9 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.9
PERSENTASE FREKUENSI KEHADIRAN DALAM
KEGIATAN KERJA BAKTI

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada sub bahasan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman, maka secara garis besar dapat dipersepsikan bahwa untuk frekuensi kehadiran masyarakat dalam pertemuan yang membahas pembangunan prasarana dasar permukiman masih kurang maksimal masyarakat yang selalu menghadirinya. Ketidakhadiran mereka lebih banyak disebabkan karena kesibukan mereka dalam bekerja sehingga tidak cukup tersedia waktu untuk menghadiri pertemuan. Dari kehadiran masyarakat dalam pertemuan ternyata keaktifan mereka dalam berdiskusi juga masih kurang mendukung untuk memberikan masukan baik berupa saran maupun pendapat karena hanya orang-orang tertentu saja yang sering terlibat secara aktif.

Dalam memberikan masukan terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman tidak jarang ada anggota masyarakat yang merasa kurang percaya diri untuk mengemukakan ide-idenya, sehingga hal ini perlu adanya dorongan bahwa untuk menghasilkan suatu keputusan yang baik perlu dilakukan

pembahasan yang matang. Semakin banyak usulan dan ide-ide yang dilontarkan oleh sesama anggota masyarakat akan semakin mempermudah dan mempercepat terhadap keputusan yang akan diambil.

Untuk keaktifan berdiskusi sebenarnya dari masyarakat mempunyai potensi untuk dapat lebih ditingkatkan mengingat sebagian besar masyarakatnya telah mengikuti berbagai organisasi kemasyarakatan di lingkungannya yang secara otomatis juga menuntut mereka untuk aktif menyumbangkan pemikiran, ide-ide dan usulannya untuk kemajuan organisasi. Terhadap kegiatan kerja bakti untuk pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya yang sering diadakan sebagian besar masyarakat menyatakan mereka sering mengikuti kegiatan tersebut.

4.3 Persepsi Masyarakat terhadap Hasil Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Pembangunan yang bertumpu pada swadaya masyarakat sangat berbeda dengan pembangunan yang dilakukan dengan melalui pendekatan *top-down*. Pembangunan yang bertumpu pada swadaya masyarakat lebih mengutamakan pembangunan dengan potensi internal sebagai sumber kekuatan. Keterbatasan potensi yang ada sudah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi pembangunan prasarana di lingkungannya. Keterbatasan potensi yang ada pada masyarakat menuntut kehati-hatian didalam menentukan jenis pembangunan, karena meskipun kecil potensi yang dimiliki tetap merupakan milik bersama. Pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena dengan demikian hasil pembangunan nantinya akan memberi manfaat dan

kepuasan bagi masyarakat. Terhadap Program P2DP yang telah digulirkan oleh Pemerintah Kota Magelang yang merupakan salah satu usaha untuk mempercepat pemenuhan akan kebutuhan prasarana permukiman diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi pembangunan prasarana lingkungannya. Keterbatasan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat hendaknya dapat dikelola semaksimal mungkin penggunaannya dan dipikirkan pula cara untuk memenuhi kekurangan pembangunan prasarana tersebut.

Pada sub pembahasan persepsi masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman, indikator pengukuran yang akan digunakan adalah persepsi masyarakat terhadap kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, kepuasan hasil pembangunan, manfaat program, jumlah dana stimulan dan terhadap kelanjutan program.

a. Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Hasil Pembangunan dengan Kebutuhan Masyarakat

Dari data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan hasil wawancara di lapangan diperoleh kenyataan bahwa di Kelurahan Magersari sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 82,76% menyatakan bahwa pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan di Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari dengan pendapat yang sama diperoleh persentase sebesar 77,50% dan 51,61%. Sebaliknya di Kelurahan Magersari ada sebesar 3,45% masyarakatnya yang menyatakan bahwa pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

setempat. Di Kelurahan Potrobangsang sendiri sebanyak 9,68% masyarakatnya menyatakan bahwa pembangunan prasarana dasar permukiman yang telah dilakukan melalui Porgram P2DP kurang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat setempat. Persepsi masyarakat terhadap kesesuaian hasil pembangunan prasarana dasar permukiman dengan kebutuhan masyarakat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.10.

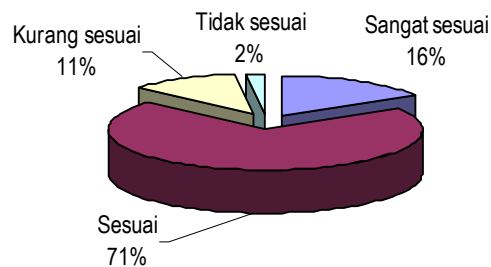
TABEL IV.10
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESESUAIAN HASIL
PEMBANGUNAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

NO	KESESUAIAN HASIL PEMBANGUNAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat sesuai	1 (3,45%)	3 (7,50%)	12 (38,71%)	16 (16,00%)
2.	Sesuai	24 (82,76%)	31 (77,50%)	16 (51,61%)	71 (71,00%)
3.	Kurang sesuai	3 (10,34%)	5 (12,50%)	3 (9,68%)	11 (11,00%)
4.	Tidak sesuai	1 (3,45%)	1 (2,50%)	0 (0,00%)	2 (2,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa hasil pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sebaliknya hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyatakan bahwa hasil pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya masih kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dari masyarakat yang menyatakan ketidaksesuaian antara pembangunan prasarana dasar permukiman dengan kebutuhan masyarakat sebagian besar mempunyai penghasilan diatas UMR yang seharusnya dengan meningkatnya prasarana di lingkungannya akan membantu

aktivitas mereka sehari-hari terutama dalam mencari penghasilan. Apalagi mereka juga telah tinggal pada lingkungannya minimal 10 tahun dengan status kepemilikan rumah sudah milik sendiri dan juga sudah permanen. Secara lebih jelas persentase dari persepsi masyarakat terhadap kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada gambar 4.10.



GAMBAR 4.10
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KESESUAIAN HASIL PEMBANGUNAN DENGAN
KEBUTUHAN MASYARAKAT

b. Persepsi Masyarakat terhadap Kepuasan Hasil Pembangunan

Meskipun ada responden yang menyatakan bahwa pembangunan prasarana dasar permukiman tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi disisi lain terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap prasarana yang telah dibangun. Di Kelurahan Potrobangsari sebesar 83,87% masyarakatnya menyatakan cukup puas terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya, sedangkan pada Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kramat dengan persentase masing-masing sebesar 75,86% dan 75,00%.

Sebaliknya untuk masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap hasil pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya tidak ada

sama sekali. Kalaupun ada, di Kelurahan Magersari sebesar 20,69% masyarakatnya menyatakan masih kurang puas terhadap hasil pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Di Kelurahan Kramat juga terdapat masyarakat (20,00%) yang juga menyatakan kurang puas terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya. Sedangkan di Kelurahan Potrobangsari dengan persentase yang lebih kecil yaitu 16,13% masyarakatnya juga masih kurang puas terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman melalui Program P2DP yang telah dilaksanakan di lingkungannya. Secara lebih jelas dan rinci persepsi masyarakat terhadap kepuasan hasil pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya dapat dilihat pada tabel IV.11.

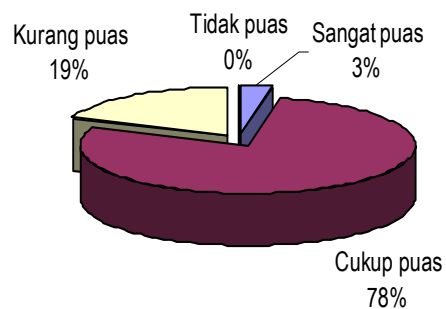
TABEL IV.11
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEPUASAN HASIL PEMBANGUNAN

NO	KEPUASAN TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat puas	1 (3,45%)	2 (5,00%)	0 (0,00%)	3 (3,00%)
2.	Cukup puas	22 (75,86%)	30 (75,00%)	26 (83,87%)	78 (78,00%)
3.	Kurang puas	6 (20,69%)	8 (20,00%)	5 (16,13%)	19 (19,00%)
4.	Tidak puas	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat sudah cukup puas terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman yang telah dilaksanakan di lingkungannya. Sebaliknya hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyatakan masih kurang puas terhadap

hasil pembangunan prasarana permukiman yang telah dilaksanakan di lingkungannya. Dari masyarakat yang kurang puas terhadap hasil pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya sebagian besar telah tinggal minimal 10 tahun pada lingkungannya dengan pendapatan diatas rata-rata upah minimal. Secara lebih jelas persentase persepsi masyarakat terhadap kepuasan hasil pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada gambar 4.11.



GAMBAR 4.11
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEPUASAN HASIL PEMBANGUNAN

c. Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Program P2DP

Salah satu kebijakan dari Pemerintah Kota Magelang untuk memenuhi pembangunan prasaran dasar permukiman di masyarakat telah ditetapkan Program P2DP. Program ini memberikan dana stimulan terbatas kepada masyarakat untuk membangun prasarana dasar permukimannya. Kekurangan biaya untuk membangun prasarana tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui swadaya masyarakat setempat terutama masyarakat yang ketempatan lokasi pembangunan. Dengan program ini seharusnya masyarakat akan merasa sangat terbantu untuk secepat mungkin mewujudkan prasarana yang dinginkannya.

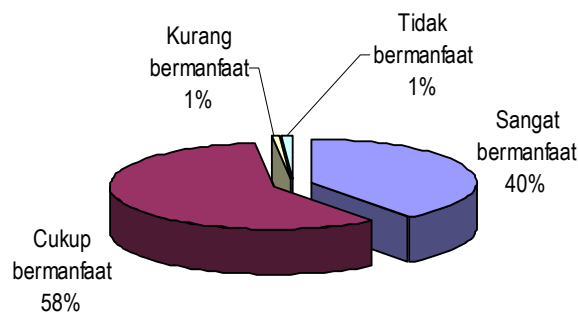
Sesuai dengan hasil kuesioner yang telah disebarkan di tiga kelurahan sebagai obyek penelitian sebagian besar masyarakatnya menyatakan telah merasakan manfaatnya. Di Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 67,74% menyatakan bahwa keberadaan pembangunan prasarana dasar permukiman yang dilaksanakan melalui Program P2DP di lingkungannya keberadaannya cukup bermanfaat bagi masyarakat setempat. Untuk Kelurahan Kramat dan Kelurahan Magersari sebagian besar masyarakatnya juga menyatakan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya keberadaannya cukup bermanfaat bagi masyarakat setempat dengan persentase masing-masing sebesar 55,00% dan 51,72%. Sebaliknya di Kelurahan Kramat sebesar 2,50% masyarakatnya menyatakan bahwa pembangunan prasarana permukiman yang telah dibangun di lingkungannya melalui Program P2DP tidak bermanfaat. Di Kelurahan Kramat juga sebanyak 2,50% masyarakatnya menyatakan tingkat kemanfaatan Program P2DP masih kurang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Penilaian masyarakat terhadap manfaat Program P2DP secara jelas dapat dilihat pada tabel IV.12.

TABEL IV.12
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
MANFAAT PROGRAM P2DP

NO	MANFAAT PROGRAM P2DP	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat bermanfaat	14 (48,28%)	16 (40,00%)	10 (32,26%)	40 (40,00%)
2.	Cukup bermanfaat	15 (51,72%)	22 (55,00%)	21 (67,74%)	58 (58,00%)
3.	Kurang bermanfaat	0 (0,00%)	1 (2,50%)	0 (0,00%)	1 (1,00%)
4.	Tidak bermanfaat	0 (0,00%)	1 (2,50%)	0 (0,00%)	1 (1,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi hampir semua masyarakat menyatakan merasakan manfaatnya terhadap keberadaan Program P2DP. Program ini sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan pembangunan prasarana dasar di lingkungannya, meskipun masyarakat harus tetap menambah kekurangan biaya pembangunannya. Meskipun kekurangan diambilkan dari swadaya masyarakat, tetapi apabila dari segi manfaatnya masyarakat akan lebih merasakan manfaat dan keuntungannya. Kekurangan dana yang dipenuhi oleh swadaya masyarakat tersebut merupakan salah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dilaksanakannya Program P2DP ini.

Secara lebih jelas persentase dari persepsi masyarakat terhadap manfaat Program P2DP dapat dilihat pada gambar 4.12 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.12
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
MANFAAT PROGRAM P2DP

d. Persepsi Masyarakat terhadap Jumlah Dana Stimulan

Terhadap besarnya dana bantuan stimulan yang telah diberikan dari pemerintah kepada masyarakat, di Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kramat sebagian besar masyarakatnya menyatakan bahwa dana stimulan yang telah diberikan pemerintah untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di

wilayahnya sudah cukup memadai, yakni masing-masing dengan persentase sebesar 55,17% dan 50,00%. Di Kelurahan Potrobangsang sendiri sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 38,71% menyatakan dana stimulan tersebut masih perlu ditambah. Sebaliknya di Kelurahan Potrobangsang 29,03% masyarakatnya menyatakan bahwa dana stimulan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat masih kurang memadai untuk pembangunan prasarana dasar permukiman. Demikian juga di Kelurahan Kramat, sebanyak 20,00% masyarakatnya menyatakan bahwa dana stimulan yang telah diberikan dari pemerintah kepada masyarakat masih belum memadai untuk pembangunan prasarana dasar permukiman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara lebih jelas persentase penilaian masyarakat terhadap jumlah dana stimulan yang diberikan untuk pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada tabel IV.13.

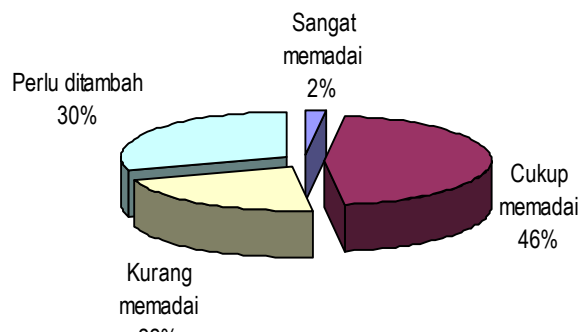
TABEL IV.13
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
JUMLAH DANA STIMULAN

NO	JUMLAH DANA STIMULAN	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat memadai	0 (0,00%)	2 (5,00%)	0 (0,00%)	2 (2,00%)
2.	Cukup memadai	16 (55,17%)	20 (50,00%)	10 (32,26%)	46 (46,00%)
3.	Kurang memadai	5 (17,24%)	8 (20,00%)	9 (29,03%)	22 (22,00%)
4.	Perlu ditambah	8 (27,59%)	10 (25,00%)	12 (38,71%)	30 (30,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat

untuk pembangunan prasarana permukiman sudah memadai dan sebagian besar lainnya masyarakat menginginkan kenaikan terhadap jumlah dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena sudah beberapa kali kenaikan harga BBM tidak ada penyesuaian terhadap nilai dana stimulan. Sebagaimana biasanya apabila ada kenaikan harga BBM secara otomatis akan diikuti juga oleh kenaikan harga barang-barang lainnya termasuk diantaranya harga material bangunan. Dengan naiknya harga bahan bangunan maka dana yang diperlukan jumlahnya menjadi berkurang apabila untuk pembelian bahan material bangunan. Secara lebih jelas persentase dari persepsi masyarakat terhadap jumlah dana stimulan dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut.



GAMBAR 4.13
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
JUMLAH DANA STIMULAN

e. Persepsi Masyarakat terhadap Kelanjutan Program

Terhadap keberlanjutan Program P2DP sebagian besar masyarakat ternyata masih mengharapkan akan keberlanjutannya program ini. Di Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 65,00% dan 51,61% menyatakan bahwa Program P2DP masih perlu dilanjutkan,

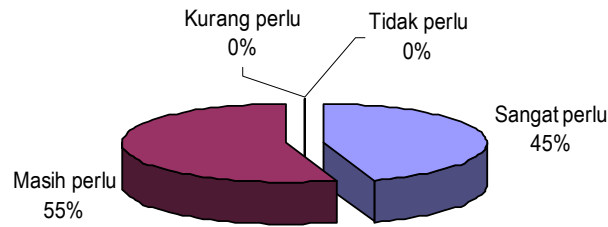
sedangkan di Kelurahan Magersari sebesar 55,17% masyarakatnya menyatakan Program P2DP masih sangat perlu untuk dilanjutkan. Sebaliknya tidak ada satupun masyarakat yang menyatakan ketidasetujuan akan keberlanjutannya program ini. Secara lebih jelas persepsi masyarakat terhadap kelanjutan program P2DP dapat dilihat pada tabel IV.14.

TABEL IV.14
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KELANJUTAN PROGRAM P2DP

NO	KELANJUTAN PROGRAM P2DP	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat perlu	16 (55,17%)	14 (35,00%)	15 (48,39%)	45 (45,00%)
2.	Masih perlu	13 (44,83%)	26 (65,00%)	16 (51,61%)	55 (55,00%)
3.	Kurang perlu	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
4.	Tidak perlu	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa bahwa keberlanjutan Program P2DP bagi sebagian besar masyarakat masih menginginkan untuk tetap dilanjutkan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan akan pembangunan prasarana dasar permukiman. Bahkan sebagian besar lainnya masyarakat menyatakan masih sangat perlu Program P2DP untuk dilanjutkan untuk memenuhi pembangunan prasarana dasar permukiman di masyarakat. Secara lebih jelas persentase persepsi masyarakat terhadap kelanjutan Program P2DP dapat dilihat pada gambar 4.14.



GAMBAR 4.14
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KELANJUTAN PROGRAM P2DP

Berdasarkan uraian-uraian diatas pada sub bahasan persepsi masyarakat terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman, maka secara garis besar dapat dinyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap hasil pembangunan prasarana permukiman pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasa cukup puas terhadap hasil pembangunan yang telah diwujudkannya. Terhadap keberadaan Program P2DP masyarakat telah merasakan manfaatnya dan mengharapkan agar program ini dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang dan apabila memungkinkan besarnya dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat dapat ditambah. Penambahan besarnya stimulan ini perlu mendapat perhatian, karena dengan kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa kali selama ini jumlah dana stimulan belum ada penyesuaian.

4.4 Partisipasi Swadaya Masyarakat Sebagai Respon dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai ikut sertanya suatu kesatuan untuk ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar. Sejalan dengan hal tersebut istilah partisipasi masyarakat juga sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan (Wibisana, 1989: 41).

Untuk mengetahui partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman, pada penelitian ini akan digunakan indikator pengukuran antara lain persepsi masyarakat terhadap kesesuaian antara hasil pembangunan dengan usulan dan pendapat masyarakat, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui kerja bakti, frekuensi masyarakat dalam memberikan bantuan/sumbangan berupa uang, frekuensi masyarakat dalam memberikan bantuan/sumbangan berupa bahan material, frekuensi masyarakat dalam memberikan bantuan/sumbangan berupa makanan dan minuman serta kemampuan masyarakat dalam membayar iuran pembangunan.

a. Kesesuaian Hasil Pembangunan dengan Usulan dan Pendapat Masyarakat

Pemikiran-pemikiran dengan melontarkan usulan dan pendapat dalam suatu pertemuan sudah dapat merupakan bagian dari salah satu bentuk partisipasi. Pertemuan dengan berbagai gagasan hendaknya dapat disatukan sebagai bentuk pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Di Kelurahan Kramat sebagian besar masyarakatnya, yakni sebesar 70,00% menyatakan bahwa keputusan yang telah diambil untuk menentukan jenis kegiatan pembangunan di lingkungannya sudah sesuai dengan usulan dan pendapat dari mereka. Sedangkan untuk Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Magersari masyarakatnya juga

menyatakan hal yang sama dengan persentase masyarakatnya sebesar 67,74% dan 65,52%. Sebaliknya sebanyak 3,45% masyarakat di Kelurahan Magersari menyatakan bahwa hasil keputusan untuk menentukan jenis kegiatan prasarana dasar permukiman yang harus dibangun tidak sesuai dengan usulan dan pendapat warga masyarakat setempat. Persepsi masyarakat terhadap kesesuaian antara hasil pembangunan dengan usulan dan pendapat masyarakat dapat dilihat pada tabel IV.15 sebagaimana berikut.

TABEL IV.15
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESESUAIAN
HASIL PEMBANGUNAN DENGAN
USULAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT

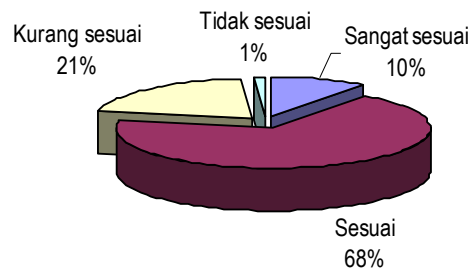
NO	KESESUAIAN HASIL PEMBANGUNAN DENGAN USULAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat sesuai	0 (0,00%)	2 (5,00%)	8 (25,81%)	10 (10,00%)
2.	Sesuai	19 (65,52%)	28 (70,00%)	21 (67,74%)	68 (68,00%)
3.	Kurang sesuai	9 (31,03%)	10 (25,00%)	2 (6,45%)	21 (21,00%)
4.	Tidak sesuai	1 (3,45%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1 (1,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel IV.15 ini dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa hasil pembangunan prasarana dasar permukiman dilingkungan mereka sudah sesuai dengan usulan dan pendapat mereka. Masyarakat merasa senang karena sumbangan pemikirannya dalam kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman telah dipakai dan mereka juga merasa bangga karena hasil pemikiran mereka telah dihargai. Sebaliknya sebagian kecil masyarakat lainnya

menyatakan bahwa hasil pembangunan prasarana dasar permukiman masih kurang sesuai dengan usulan dan pendapat dari warga masyarakat.

Secara lebih jelas persentase kesesuaian antara hasil pembangunan prasarana dasar permukiman dengan usulan dan pendapat masyarakat dapat dilihat pada gambar 4.15 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.15
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KESESUAIAN HASIL PEMBANGUNAN DENGAN
USULAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT

b. Pelaksanaan Pembangunan melalui Kegiatan Kerja Bakti

Bentuk partisipasi masyarakat dapat pula diwujudkan dengan sumbangan swadaya berwujud tenaga. Agar sesuai dengan tujuan Program P2DP maka pengerjaan pembangunan prasarana permukiman akan lebih baik apabila dilakukan secara gotong royong antar sesama anggota masyarakat. Di Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Kramat dan Kelurahan Magersari sebagian besar masyarakatnya setuju apabila pembangunan prasarana dasar permukiman dilingkungannya dikerjakan secara gotong royong dengan sesama anggota masyarakat, dengan persentase pendapat mereka di masing-masing kelurahan sebesar 83,87%, 77,50% dan 51,72%. Sebaliknya sebanyak 6,90% masyarakat di Kelurahan Magersari menyatakan ketidaksetujuannya apabila pelaksanaan

pembangunan prasarana dasar permukiman dilakukan dengan cara gotong royong antar sesama warga masyarakat. Di Kelurahan Kramat sebesar 5,00% masyarakatnya juga tidak setuju apabila pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya dilakukan dengan cara gotong royong antar sesama warga masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui kerja bakti dapat dilihat pada tabel IV.16.

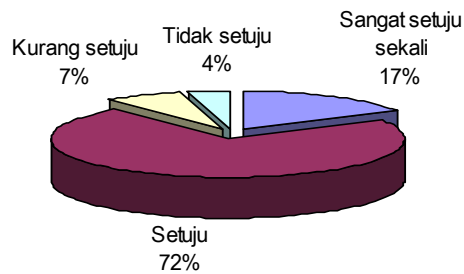
TABEL IV.16
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN KERJA BAKTI

NO	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN KERJA BAKTI	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Sangat setuju sekali	9 (31,03%)	4 (10,00%)	4 (12,90%)	17 (17,00%)
2.	Setuju	15 (51,72%)	31 (77,50%)	26 (83,87%)	72 (72,00%)
3.	Kurang setuju	3 (10,34%)	3 (7,50%)	1 (3,23%)	7 (7,00%)
4	Tidak setuju	2 (6,90%)	2 (5,00%)	0 (0,00%)	4 (4,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel IV.16 dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat setuju apabila pengerjaan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya dilakukan dengan gotong royong bersama warga masyarakat. Sebaliknya hanya sebagian kecil saja masyarakat menyatakan kurang setujunya apabila pengerjaan pembangunan prasarana permukiman dilakukan dengan gotong royong. Alasan dari mereka yang tidak setuju adalah apabila dilakukan secara gotong royong, sebagian besar waktunya hanya akan habis digunakan untuk mengobrol antar sesama anggota masyarakat. Mereka setuju apabila pengerjaan awal dilakukan secara bersama-sama dan untuk finishing diserahkan pada ahlinya

dan kalau memungkinkan tenaganya diambilkan dari lingkungan mereka. Secara lebih jelas persentase pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman melalui gotong royong dapat dilihat pada gambar 4.16 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.16
PERSENTASE PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI
KEGIATAN KERJA BAKTI

c. Frekuensi dalam Memberikan Bantuan/Sumbangan Berupa Uang.

Cara lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan prasarana dasar permukiman adalah dengan memberikan bantuan/sumbangan sejumlah uang untuk mewujudkan prasarana yang akan dibangun. Cara ini biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak dapat secara langsung ikut berpartisipasi pada pembangunan prasarana dasar di lingkungannya. Uang yang diberikan dapat dikatakan sebagai pengganti atas ketidak hadirannya dalam kegiatan bersama. Bantuan uang ini juga dapat merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap pembangunan prasarana di lingkungannya. Sesuai dengan konsep Program P2DP maka apabila ada kekurangan dana dalam pembangunan prasarana permukiman diharapkan dana tersebut dapat terpenuhi oleh swadaya masyarakat setempat yang terutama sekali warga di sekitar lokasi pembangunan dilaksanakan. Di Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Magersari sebagian besar masyarakatnya yakni

sebesar 61,29% dan 48,28% menyatakan terhadap pemberian bantuan/sumbangan yang berupa uang untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya mereka hanya kadang-kadang saja memberikan. Sedangkan di Kelurahan Kramat sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 45,00% menyatakan mereka tidak pernah memberikan bantuan/sumbangan berupa uang untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Sebaliknya sebanyak 15,00% masyarakat di Kelurahan Kramat menyatakan bahwa mereka selalu memberikan bantuan/sumbangan berupa uang terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Secara lebih rinci frekuensi pemberian bantuan berupa uang dari masyarakat terhadap pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya dapat dilihat pada tabel IV.17.

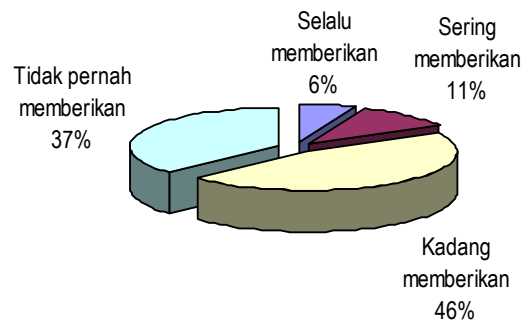
TABEL IV.17
FREKUENSI PEMBERIAN BANTUAN/
SUMBANGAN BERUPA UANG

NO	FREKUENSI PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Selalu memberikan	0 (0,00%)	6 (15,00%)	0 (0,00%)	6 (6,00%)
2.	Sering memberikan	4 (13,79%)	3 (7,50%)	4 (12,90%)	11 (11,00%)
3.	Kadang memberikan	14 (48,28%)	13 (32,50%)	19 (61,29%)	46 (46,00%)
4.	Tidak pernah memberikan	11 (37,93%)	18 (45,00%)	8 (25,81%)	37 (37,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat dalam memberikan bantuan/sumbangan berupa uang untuk membangun prasarana permukiman di lingkungannya dilakukan secara kadang-kadang saja. Mereka

yang memilih selalu memberikan bantuan berupa uang sebagian besar adalah pengurus di lingkungan baik RT maupun RW yang lebih merasa mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan prasarana permukiman tersebut. Sebaliknya dengan jumlah yang cukup besar pula masyarakat lainnya menyatakan tidak pernah memberikan bantuan berupa uang untuk pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Mereka beranggapan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup memadai untuk menyelesaikan bentuk fisik prasarana tersebut. Secara lebih jelas persentase frekuensi pemberian bantuan/sumbangan berupa uang dapat dilihat pada gambar 4.17.



GAMBAR 4.17
PERSENTASE FREKUENSI PEMBERIAN BANTUAN/
SUMBANGAN BERUPA UANG

d. Frekuensi dalam Memberikan Bantuan/Sumbangan Berupa Bahan Material.

Bentuk partisipasi lainnya dalam pembangunan prasarana permukiman adalah dengan memberikan bantuan berupa barang yang dalam hal ini adalah material bangunan maupun peralatannya. Terhadap jenis partisipasi ini di Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya, yakni sebesar 74,19% menyatakan bahwa mereka hanya kadang-kadang saja memberikan bantuan/

sumbangan berupa material bangunan yang diperuntukkan untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Sedangkan untuk Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kramat sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 58,62% dan 47,50% menyatakan untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya mereka tidak pernah memberikan bantuan/sumbangan yang berbentuk bahan material bangunan. Sebaliknya sebanyak 5,00% masyarakat Kelurahan Kramat menyatakan bahwa mereka selalu memberikan bantuan/sumbangan yang berbentuk bahan material bangunan untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Secara lebih rinci frekuensi pemberian bantuan/sumbangan oleh masyarakat yang berupa material bangunan terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya dapat dilihat pada tabel IV.18.

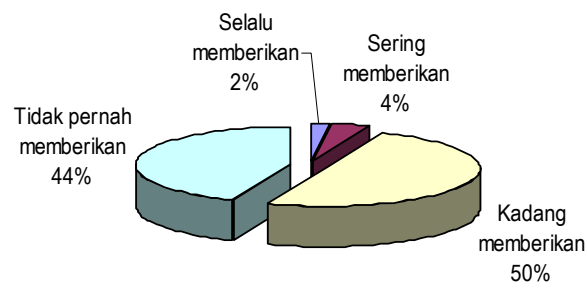
TABEL IV.18
FREKUENSI PEMBERIAN BANTUAN/SUMBANGAN
BERUPA MATERIAL BANGUNAN

NO	FREKUENSI PEMBERIAN BANTUAN BERUPA MATERIAL BANGUNAN	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSAN	JUMLAH
1.	Selalu memberikan	0 (0,00%)	2 (5,00%)	0 (0,00%)	2 (2,00%)
2.	Sering memberikan	3 (10,34%)	1 (2,50%)	0 (0,00%)	4 (4,00%)
3.	Kadang memberikan	9 (31,03%)	18 (45,00%)	23 (74,19%)	50 (50,00%)
4.	Tidak pernah memberikan	17 (58,62%)	19 (47,50%)	8 (25,81%)	44 (44,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat pernah memberikan bantuan berupa material bangunan untuk pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Sebaliknya sebagian besar lainnya

masyarakat belum pernah memberikan bantuan/sumbangan berupa material bangunan untuk pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Didalam memberikan bantuan berupa bahan/material bangunan, sebagian besar dari mereka hanya memberikan dari sisa-sisa bahan bangunan yang telah mereka miliki dan sudah tidak digunakan lagi untuk keperluan mereka. Secara lebih jelas persentase frekuensi pemberian bantuan/ sumbangan berupa material bahan bangunan dapat dilihat pada gambar 4.18 sebagaimana berikut.



GAMBAR 4.18
PERSENTASE FREKUENSI PEMBERIAN BANTUAN/
SUMBANGAN BERUPA MATERIAL BANGUNAN

e. Frekuensi Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Kerja Bakti.

Bentuk partisipasi dalam pembangunan prasarana permukiman yang berbentuk barang dapat juga diwujudkan dengan menyediakan makanan atau minuman kepada masyarakat pada waktu dilaksanakan kerja bakti. Frekuensi penyediaan makanan dan minuman kepada warga masyarakat yang sedang kerja bakti di Kelurahan Kramat sebagian besar masyarakatnya, yakni sebesar 40,00% menyatakan mereka sering menyediakan konsumsi baik makanan maupun minuman bagi warga yang sedang kerja bakti. Di Kelurahan Magersari sebagian besar masyarakatnya, yakni sebesar 37,93% menyatakan bahwa mereka hanya

kadang-kadang saja didalam menyediakan makanan dan minuman untuk kerja bakti di lingkungannya. Sedangkan di Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya yakni sebesar 35,48% menyatakan mereka selalu menyediakan konsumsi baik berupa makanan maupun minuman pada waktu diadakan kerja bakti untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya. Sebaliknya di Kelurahan Potrobangsari, sebesar 16,13% masyarakatnya menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyediakan konsumsi baik makanan maupun minuman pada waktu dilaksanakannya kerja bakti di lingkungannya. Secara lebih terperinci frekuensi masyarakat di dalam penyediaan makan dan minuman pada waktu diadakan kerja bakti untuk membangun prasarana permukiman di lingkungannya dapat dilihat pada tabel IV.19.

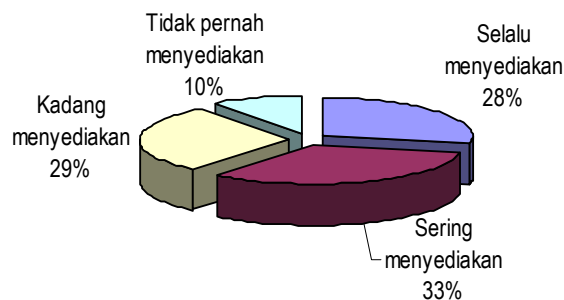
TABEL IV.19
FREKUENSI PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN UNTUK KERJA BAKTI

NO	FREKUENSI PENYEDIAAN KONSUMSI UNTUK KERJA BAKTI	KEL. MAGER-SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO-BANGSARI	JUMLAH
1.	Selalu menyediakan	10 (34,48%)	7 (17,50%)	11 (35,48%)	28 (28,00%)
2.	Sering menyediakan	6 (20,69%)	16 (40,00%)	11 (35,48%)	33 (33,00%)
3.	Kadang menyediakan	11 (37,93%)	14 (35,00%)	4 (12,90%)	29 (29,00%)
4.	Tidak pernah menyediakan	2 (6,90%)	3 (7,50%)	5 (16,13%)	10 (10,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat dengan jumlah yang cukup besar apabila di lingkungannya mengadakan kegiatan kerja bakti untuk membangun prasarana permukiman sering menyediakan konsumsi baik

berupa makanan maupun minuman, meskipun ada yang hanya kadang-kadang saja penyediaannya. Sebaliknya hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyediakan konsumsi baik makanan maupun minuman pada waktu diadakan kegiatan kerja bakti. Secara lebih jelas persentase frekuensi penyediaan makanan dan minuman untuk kerja bakti dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut.



GAMBAR 4.19
PERSENTASE FREKUENSI PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN UNTUK KERJA BAKTI

f. Kemampuan Masyarakat dalam Membayar Iuran Pembangunan

Untuk memenuhi pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya, tidak jarang warga telah berinisiatif mengumpulkan dana melalui iuran bulanan di lingkungannya. Uang yang telah terkumpul nantinya selain untuk membangun prasarana permukiman di lingkungannya juga dapat digunakan sebagai dana swadaya seperti yang di inginkan pada Program P2DP. Karena pengumpulan dana tersebut diambilkan dari warga masyarakat dengan nilai yang kecil maka kedisiplinan untuk membayar iuran tersebut haruslah dipatuhi. Di Kelurahan Kramat, Kelurahan Magersari dan Kelurahan Potrobangsari sebagian besar masyarakatnya menyatakan bahwa didalam pembayaran iuran pembangunan di

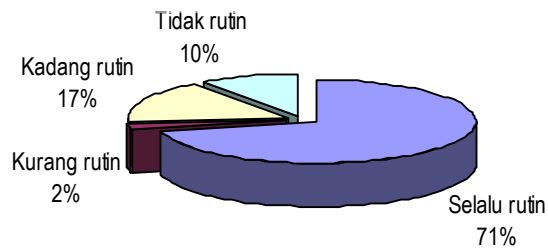
lingkungannya selalu rutin dilakukan tepat waktu, yaitu dengan persentase masing-masing kelurahan sebesar 75,00%, 68,97% dan 67,74%. Sebaliknya di Kelurahan Magersari sebanyak 24,14% masyarakatnya menyatakan mereka tidak pernah rutin didalam pembayaran iuran pembangunan di lingkungannya. Secara lebih jelas kemampuan warga dalam membayar iuran pembangunan dapat dilihat pada tabel IV.20 sebagaimana berikut.

TABEL IV.20
KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR
IURAN PEMBANGUNAN

NO	KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR IURAN PEMBANGUNAN	KEL. MAGER- SARI	KEL. KRAMAT	KEL. POTRO- BANGSAN	JUMLAH
1.	Selalu rutin	20 (68,97%)	30 (75,00%)	21 (67,74%)	71 (71,00%)
2.	Kurang rutin	0 (0,00%)	1 (2,50%)	1 (3,23%)	2 (2,00%)
3.	Kadang rutin	2 (6,90%)	6 (15,00%)	9 (29,03%)	17 (17,00%)
4.	Tidak rutin	7 (24,14%)	3 (7,50%)	0 (0,00%)	10 (10,00%)
JUMLAH		29 (100,00%)	40 (100,00%)	31 (100,00%)	100 (100,00%)

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat dalam membayar iuran pembangunan selalu berusaha untuk memenuhinya secara rutin. Sebaliknya sebagian kecil lainnya masyarakat menyatakan bahwa dalam membayar iuran pembangunan yang telah ditetapkan oleh lingkungannya tidak dapat melakukannya secara teratur, meskipun demikian mereka selalu berupaya untuk memenuhi kewajibannya. Secara lebih jelas persentase kemampuan masyarakat dalam membayar iuran pembangunan dapat dilihat pada gambar 4.20.



GAMBAR 4.20
PERSENTASE KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR IURAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas pada sub bahasan partisipasi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman, maka secara garis besar dapat dinyatakan bahwa hasil pembangunan yang ada telah sesuai dengan usulan dan pendapat masyarakat yang setuju apabila pengerjaannya dilakukan melalui kerja bakti/gotong royong. Terhadap pemberian bantuan/sumbangan berupa uang dan barang dalam hal ini material bangunan diperoleh kenyataan bahwa partisipasi masyarakat untuk berswadaya masih kurang.

Untuk pemberian bantuan berupa uang sebagian besar masyarakat hanya berpartisipasi rutin melalui iuran pembangunan bulanan yang nilainya berkisar Rp 2.000,- sampai dengan Rp 3.000,- setiap bulannya, sedangkan yang memberikan bantuan/sumbangan diluar iuran rutin hanya sedikit masyarakat yang melakukannya itupun secara kadang-kadang saja. Demikian juga dengan pemberian bantuan berupa bahan bangunan sebagian besar masyarakat melakukannya hanya sekedarnya saja. Masyarakat hanya memberikan bantuan berupa sisa-sisa bahan material yang telah mereka miliki dan sudah tidak terpakai lagi. Sebaliknya untuk pemberian bantuan/sumbangan berupa makanan atau minuman sebagian besar masyarakat pernah menyediakannya.

4.5 Analisa Perbandingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman pada Obyek Penelitian

Analisa perbandingan terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman pada ketiga kelurahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui keunggulan-keunggulan komparatif dan kekurangan-kekurangan dari masing-masing kelurahan yang menjadi obyek penelitian pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan program pembangunan. Analisa ini akan dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan cara memberikan nilai terhadap masing-masing indikator yang telah terpilih pada penelitian ini dengan jalan mengalikan persentase jumlah jawaban responden dengan bobot nilai pada masing-masing indikator penelitian. Hasil akhir dari perhitungan inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisa perbandingan di tiga kelurahan yang telah ditetapkan menjadi obyek penelitian.

4.5.1 Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Dari hasil akhir penghitungan perbandingan persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman diperoleh kenyataan bahwa masing-masing kelurahan mengumpulkan nilai yang tidak jauh berbeda diantara ketiganya. Nilai yang diperoleh dari masing-masing kelurahan adalah 1,048.28 untuk Kelurahan Magersari, 1,095.00 untuk Kelurahan Kramat dan sebanyak 1,022.58 untuk Kelurahan Potrobangsari. Dari ketiganya nilai tertinggi di miliki oleh Kelurahan Kramat kemudian tertinggi berikutnya Kelurahan Magersari dan Kelurahan Potrobangsari.

Kelurahan Kramat apabila dilihat dari proses pelibatan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan prasarana dasar permukiman mempunyai nilai tertinggi diantara dua kelurahan lainnya. Hal ini disebabkan dari data yang ada diperoleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Kramat merasakan bahwa mereka cukup sering dilibatkan didalam penyusunan rencana usulan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya dan terhadap prosedur yang harus ditempuh untuk membuat rencana usulan tersebut bagi mereka merupakan hal yang biasa dan tidak mengalami kesulitan untuk mengikutinya. Penilaian terhadap realisasi kegiatan pembangunan, sebagian besar masyarakat Kelurahan Kramat berpendapat bahwa antara rencana pembangunan dengan realisasi kegiatan pembangunan sudah cukup sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan dan usulkan, meskipun waktu yang diperlukan sampai dengan dua tahun. Secara jelas hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel IV.21.

TABEL IV.21
PERBANDINGAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PROSES PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	PROSES PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN	KELURAHAN (% x Bobot)		
		MAGER-SARI	KRAMAT	POTRO-BANGSAN
1.	Frekuensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman			
	a. Selalu dilibatkan	137.93	60.00	103.23
	b. Cukup sering dilibatkan	62.07	112.50	48.39
	c. Kadang-kadang dilibatkan	41.38	85.00	90.32
	d. Tidak pernah dilibatkan	24.14	5.00	12.90
2.	Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur Penyusunan Usulan Kegiatan Pembangunan			
	a. Sangat rumit sekali	0.00	20.00	0.00
	b. Cukup rumit	31.03	105.00	77.42
	c. Biasa saja	158.62	110.00	129.03
	d. Mudah mengurusnya	10.34	5.00	9.68

NO	PROSES PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN	KELURAHAN (% x Bobot)		
		MAGER-SARI	KRAMAT	POTRO-BANGSAN
3.	Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan			
	a. Sangat sesuai usulan	0.00	60.00	12.90
	b. Cukup sesuai usulan	186.21	195.00	203.23
	c. Kurang sesuai usulan	75.86	35.00	51.61
	d. Tidak sesuai usulan	0.00	2.50	3.23
4.	Penilaian Masyarakat Terhadap Waktu yang Diperlukan untuk Merealisasikan Usulan Kegiatan			
	a. 1 tahun	206.90	110.00	25.81
	b. 2 tahun	82.76	150.00	203.23
	c. 3 tahun	20.69	35.00	51.61
	d. ≥ 4 tahun	10.34	5.00	0.00
JUMLAH		1,048.28	1,095.00	1,022.58

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari jumlah akhir perhitungan seperti tersebut diatas maka nilai yang terkumpul dapat digunakan untuk melakukan penilaian persepsi secara kuantitatif dari masing-masing kelurahan. Kategori penilaian dilakukan dengan cara mencari selisih antara nilai tertinggi dan terendah dari jumlah keseluruhan indikator yang ada dan membaginya menjadi tiga kategori, yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Hasil penghitungan/penilaian untuk menentukan kategori persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat di tabel IV.22

TABEL IV.22
PENILAIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PROSES PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	NILAI	KATEGORI
1.	1.200 – 1.599	Baik
2.	800 – 1.199	Cukup Baik
3.	400 – 799	Kurang Baik

Sumber: Hasil Analisa

Apabila dilihat dari nilai akhir yang dimiliki oleh Kelurahan Kramat yakni sebesar 1,095.00, maka didalam pelaksanaan proses pelibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman Kelurahan Kramat masuk pada nilai diantara 800 – 1.199 dengan kategori cukup baik. Dengan penghitungan yang sama terhadap Kelurahan Kramat dan Kelurahan Potrobangsari, meskipun keduanya mempunyai nilai lebih kecil dari Kelurahan Kramat tetapi apabila dilihat dari jumlah nilai yang diperoleh keduanya juga termasuk pada kategori cukup baik. Dengan demikian proses pelibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman di ketiga kelurahan tersebut pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik.

Hasil analisa perbandingan persepsi masyarakat terhadap proses pelibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman yang diperoleh oleh masing-masing kelurahan secara jelas dapat dilihat pada tabel IV.23.

TABEL IV.23
ANALISA PERBANDINGAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	KELURAHAN	NILAI	KATEGORI
1.	Kelurahan Magersari	1,048.28	Cukup Baik
2.	Kelurahan Kramat	1,095.00	Cukup Baik
3.	Kelurahan Potrobangsari	1,022.58	Cukup Baik

Sumber: Hasil Analisa

4.5.2 Perbandingan Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Dari penghitungan akhir perbandingan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman diperoleh kenyataan bahwa masing-masing kelurahan mengumpulkan nilai yang tidak jauh berbeda

satu dengan lainnya. Nilai yang diperoleh dari masing-masing kelurahan adalah 1,413.79 untuk Kelurahan Magersari, 1,412.50 untuk Kelurahan Kramat dan 1,416.13 untuk Kelurahan Potrobangsari. Dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian nilai tertinggi ternyata di miliki oleh Kelurahan Potrobangsari kemudian tertinggi berikutnya Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kramat. Dengan demikian Kelurahan Potrobangsari apabila dilihat dari pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman mempunyai nilai tertinggi diantara dua kelurahan lainnya.

Hal tersebut diatas didukung data untuk Kelurahan Potrobangsari bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Potrobangsari apabila mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dasar permukiman dari mereka berusaha untuk hadir. Dari kehadiran mereka dalam suatu pertemuan sebagian besar akan berusaha untuk terlibat aktif dalam diskusi untuk pembahasan pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Keaktifan masyarakat Kelurahan Potrobangsari juga nampak pada sebagian besar masyarakatnya yang ikut serta dalam berbagai jenis organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungannya, meskipun diantaranya banyak yang hanya menjadi anggota biasa saja. Keaktifan masyarakat Kelurahan Potrobangsari juga ditunjukkan dengan kehadiran mereka dalam kegiatan kerja bakti meskipun kegiatan tersebut hanya kadang-kadang saja dilaksanakan. Lebih jelasnya hasil penghitungan nilai perbandingan dapat dilihat pada tabel IV.24.

TABEL IV.24
PERBANDINGAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PR SARANA DASAR PERMUKIMAN	KELURAHAN (% x Bobot)		
		MAGER- SARI	KRAMAT	POTRO- BANGSAN
1.	Frekuensi Kehadiran dalam Pertemuan			
	a. Selalu menghadiri	151.72	180.00	116.13
	b. Sering menghadiri	93.10	105.00	116.13
	c. Kadang-kadang menghadiri	48.28	40.00	58.06
	d. Tidak pernah menghadiri	6.90	0.00	3.23
2.	Keaktifan Dalam Berdiskusi			
	a. Selalu berusaha terlibat aktif	151.72	90.00	116.13
	b. Sering terlibat aktif	72.41	135.00	106.45
	c. Jarang terlibat aktif	75.86	35.00	32.26
	d. Tidak pernah terlibat aktif	0.00	15.00	19.35
3.	Keanggotaan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan			
	a. Ada	220.69	160.00	296.77
	b. Tidak	44.83	60.00	25.81
4.	Frekuensi Kegiatan Kerja Bakti			
	a. Sangat sering diadakan kerja bakti	0.00	40.00	0.00
	b. Sering diadakan kerja bakti	144.83	172.50	106.45
	c. Kadang saja diadakan kerja bakti	89.66	65.00	122.58
	d. Tidak pernah diadakan kerja bakti	6.90	0.00	3.23
5.	Frekuensi Kehadiran dalam Kegiatan Kerja Bakti			
	a. Selalu mengikuti	151.72	120.00	90.32
	b. Sering mengikuti	103.45	165.00	164.52
	c. Kadang-kadang saja mengikuti	48.28	30.00	32.26
	d. Tidak pernah mengikuti	3.45	0.00	6.45
JUMLAH		1,413.79	1,412.50	1,416.13

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari nilai hasil penghitungan pada tabel IV.24 diatas maka untuk melihat kategori keberhasilannya secara kuantitatif dari masing-masing kelurahan dapat diperoleh dengan cara mencari selisih antara nilai tertinggi dan terendah dari jumlah keseluruhan indikator yang ada dan membaginya menjadi tiga kategori, yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Hasil penilaian untuk menentukan

kategori persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada tabel IV.25.

TABEL IV.25
PENILAIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA
DASAR PERMUKIMAN

NO	NILAI	KATEGORI
1.	1.500 – 1.999	Baik
2.	1.000 – 1.499	Cukup Baik
3.	500 – 999	Kurang Baik

Sumber: Hasil Analisa

Dari nilai yang dimiliki oleh Kelurahan Potrobangsari, yakni sebesar 1.413,79 maka kategori yang sesuai dengan jumlah nilai yang dimiliki adalah pada kategori cukup baik pada proses pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman, yaitu terletak diantara nilai 1.000 dan 1.499. Meskipun kedua kelurahan lainnya mempunyai nilai dibawah dari Kelurahan Potrobangsari tetapi apabila dilihat dari jumlah nilai yang diperoleh keduanya juga termasuk pada kategori cukup baik. Dengan demikian ketiga kelurahan tersebut dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman secara keseluruhan telah melaksanakan dengan cukup baik.

Hasil analisa perbandingan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman yang diperoleh oleh masing-masing kelurahan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.26 sebagaimana berikut.

TABEL IV.26
ANALISA PERBANDINGAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	KELURAHAN	NILAI	KATEGORI
1.	Kelurahan Magersari	1,413.79	Cukup Baik
2.	Kelurahan Kramat	1,412.50	Cukup Baik
3.	Kelurahan Potrobangsari	1,416.13	Cukup Baik

Sumber: Hasil Analisa

4.5.3 Perbandingan Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Hasil penghitungan akhir perbandingan persepsi masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman pada obyek penelitian menunjukkan perbedaan angka yang tidak begitu besar diantara ketiga kelurahan yang ada. Hasil penjumlahan nilai yang diperoleh dengan mengalikan antara persentase dengan bobot nilai pada masing-masing indikator diperoleh nilai sebanyak 1.500 untuk Kelurahan Magersari, 1.477,50 untuk Kelurahan Kramat dan sebanyak 1.487,10 untuk Kelurahan Potrobangsari.

Kelurahan Magersari memiliki nilai tertinggi dalam capaian hasil dari pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman. Hal tersebut didukung oleh data yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakatnya merasakan bahwa hasil pembangunan prasarana dasar permukiman melalui program P2DP telah sesuai dengan kebutuhan prasarana yang dibutuhkan oleh mereka. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Magersari juga merasa puas terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman dalam wujud fisiknya. Terhadap keberadaan Program P2DP yang diperuntukkan untuk pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya, hampir semua masyarakat Kelurahan Magersari merasakan manfaatnya dan terhadap keberlangsungan model

pembangunan seperti Program P2DP mereka masih menginginkan keberlanjutannya dengan penambahan nilai dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat meskipun sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa dana yang telah mereka terima sudah memadai.

Secara lebih jelas hasil penghitungan analisa perbandingan terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman pada ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian dapat dilihat pada tabel IV.27 sebagaimana berikut.

TABEL IV.27
PERBANDINGAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN	KELURAHAN (% x Bobot)		
		MAGER- SARI	KRAMAT	POTRO- BANGSAN
1.	Kesesuaian Hasil Pembangunan dengan Kebutuhan Masyarakat			
	a. Sangat sesuai	13.79	30.00	154.84
	b. Sesuai	248.28	232.50	154.84
	c. Kurang sesuai	20.69	25.00	19.35
	d. Tidak sesuai	3.45	2.50	0.00
2.	Kepuasan Masyarakat terhadap Hasil Pembangunan			
	a. Sangat puas	13.79	20.00	0.00
	b. Cukup puas	227.59	225.00	251.61
	c. Kurang puas	41.38	40.00	32.26
	d. Tidak puas	0.00	0.00	0.00
3.	Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Program P2DP			
	a. Sangat bermanfaat	193.10	160.00	129.03
	b. Cukup bermanfaat	155.17	165.00	203.23
	c. Kurang bermanfaat	0.00	5.00	0.00
	d. Tidak bermanfaat	0.00	2.50	0.00
4.	Persepsi Masyarakat terhadap Jumlah Dana Stimulan			
	a. Sangat memadai	0.00	20.00	0.00
	b. Cukup memadai	165.52	150.00	96.77
	c. Kurang memadai	34.48	40.00	58.06
	d. Perlu ditambah	27.59	25.00	38.71

NO	HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRSARANA DASAR PERMUKIMAN	KELURAHAN (% x Bobot)		
		MAGER-SARI	KRAMAT	POTRO-BANGSAN
5.	Persepsi Masyarakat terhadap Kelanjutan Program P2DP			
	a. Sangat perlu dilanjutkan	220.69	140.00	193.55
	b. Masih perlu dilanjutkan	134.48	195.00	154.84
	c. Kurang perlu dilanjutkan	0.00	0.00	0.00
	d. Tidak perlu dilanjutkan	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	1,500.00	1,477.50	1,487.10

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari hasil penilaian pada tabel IV.27 diatas maka untuk melihat kategori keberhasilannya secara kuantitatif dari masing-masing kelurahan dapat diperoleh dengan cara mencari selisih antara nilai tertinggi dan terendah dari jumlah keseluruhan indikator yang ada dan membaginya menjadi tiga kategori, yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Hasil penilaian untuk menentukan kategori persepsi masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada tabel IV.28.

TABEL IV.28
PENILAIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	NILAI	KATEGORI
1.	1.500 – 1.999	Baik
2.	1.000 – 1.499	Cukup Baik
3.	500 – 999	Kurang Baik

Sumber: Hasil Analisa

Dilihat dari penilaian akhir yang diperoleh oleh Kelurahan Magersari, yakni 1.500 maka kategori keberhasilan kelurahan ini adalah masuk pada kategori baik, yaitu dengan nilai diantara 1.500 – 1.999, meskipun hanya terpaut sedikit nilainya dengan kategori di bawahnya. Untuk Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Kramat dalam kategori ini masuk pada kategori cukup baik dengan nilai pada kategori diantara 1.000 s/d 1.499. Dengan demikian secara garis besar

capaian hasil pembangunan prasarana dasar permukiman sudah berjalan dengan baik pada ketiga kelurahan tersebut. Analisa perbandingan persepsi masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman yang diperoleh oleh masing-masing kelurahan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.29 sebagaimana berikut.

TABEL IV.29
ANALISA PERBANDINGAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	KELURAHAN	NILAI	KATEGORI
1.	Kelurahan Magersari	1,500.00	Baik
2.	Kelurahan Kramat	1,477.50	Cukup Baik
3.	Kelurahan Potrobangsari	1,487.10	Cukup Baik

Sumber: Hasil Analisa

4.5.4 Perbandingan Partisipasi Swadaya Masyarakat sebagai Respon dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman

Dari penghitungan akhir perbandingan terhadap partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman pada obyek penelitian, nilai yang diperoleh dari masing-masing kelurahan juga menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda antara kelurahan satu dengan kelurahan lainnya. Hasil penjumlahan nilai akhir yang diperoleh dengan mengalikan antara persentase dengan bobot nilai pada masing-masing indikator diperoleh nilai sebanyak 1.493 untuk Kelurahan Magersari, Kelurahan Kramat dengan jumlah nilai 1.542,50 dan Kelurahan Potrobangsari dengan nilai sebanyak 1.619,35. Dari ketiga nilai tersebut diatas, untuk Kelurahan Potrobangsari ternyata memiliki nilai tertinggi dibanding dua kelurahan lainnya. Urutan nilai terbesar berikutnya adalah Kelurahan Kramat dan Kelurahan Magersari.

Tingginya nilai yang diperoleh oleh Kelurahan Potrobangsari tersebut telah didukung oleh berbagai data yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Potrobangsari merasakan bahwa apa yang telah diputuskan melalui pertemuan warga untuk pembangunan prasarana dasar permukiman telah sesuai dengan usulan dan pendapat dari warga masyarakat. Masyarakat Kelurahan Potrobangsari juga setuju apabila pengerjaan pembangunan prasarana dasar permukiman dilakukan secara bersama-sama (gotong royong) dengan sesama anggota masyarakat. Persetujuan ini dipilih dengan maksud selain untuk meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman diantara sesama anggota masyarakat juga untuk menciptakan keakraban. Untuk mewujudkan pembangunan prasarana dasar permukiman sebagian besar masyarakat di Kelurahan Potrobangsari kadang-kadang memberikan bantuan berupa uang, bahan material bangunan (semen, pasir, peralatan dan sebagainya) dan pada waktu pelaksanaan kerja bakti tidak sedikit warga masyarakat Kelurahan Potrobangsari menyediakan konsumsi baik makanan dan minuman bagi warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Sedangkan untuk frekuensi pembayaran iuran pembangunan yang rutin ditarik dari masyarakat, sebagian besar dari mereka menyatakan selalu membayarnya, meskipun kadang tidak rutin.

Hasil analisa perbandingan partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada tabel IV.30 sebagaimana berikut.

TABEL IV.30
PERBANDINGAN PARTISIPASI SWADAYA MASYARAKAT
SEBAGAI RESPON DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	PARTISIPASI SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI RESPON DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN	KELURAHAN (% x Bobot)		
		MAGER- SARI	KRAMAT	POTRO- BANGSAN
1.	Kesesuaian Hasil Pembangunan dengan Usulan dan Pendapat Masyarakat			
	a. Sangat sesuai	0.00	20.00	103.23
	b. Sesuai	196.55	210.00	203.23
	c. Kurang sesuai	62.07	50.00	12.90
	d. Tidak sesuai	3.45	0.00	0.00
2.	Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Kerja Bakti			
	a. Sangat setuju sekali	124.14	40.00	51.61
	b. Setuju	155.17	232.50	251.61
	c. Kurang setuju	20.69	15.00	6.45
	d. Tidak setuju	6.90	5.00	0.00
3.	Frekuensi Pemberian Bantuan/Sumbangan Berupa Uang			
	a. Selalu memberikan	0.00	60.00	0.00
	b. Sering memberikan	41.38	22.50	38.71
	c. Kadang memberikan	96.55	65.00	122.58
	d. Tidak pernah memberikan	37.93	45.00	25.81
4.	Frekuensi Pemberian Bantuan/Sumbangan Berupa Material Bangunan			
	a. Selalu memberikan	0.00	20.00	0.00
	b. Sering memberikan	31.03	7.50	0.00
	c. Kadang memberikan	62.07	90.00	148.39
	d. Tidak pernah memberikan	58.62	47.50	25.81
5.	Frekuensi Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Kerja Bakti			
	a. Selalu menyediakan	137.93	70.00	141.94
	b. Sering menyediakan	62.07	120.00	106.45
	c. Kadang menyediakan	75.86	70.00	25.81
	d. Tidak pernah menyediakan	6.90	7.50	16.13
6.	Frekuensi dalam Membayar iuran Pembangunan			
	a. Selalu rutin membayar	275.86	300.00	270.97
	b. Kurang rutin membayarnya	0.00	7.50	9.68
	c. Kadang rutin membayar	13.79	30.00	58.06
	d. Tidak rutin membayar	24.14	7.50	0.00
JUMLAH		1,493.10	1,542.50	1,619.35

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari hasil penghitungan pada tabel IV.30 maka untuk melihat kategori partisipasi swadaya masyarakat secara kuantitatif dari masing-masing kelurahan

dapat diperoleh dengan cara mencari selisih antara nilai tertinggi dan terendah dari jumlah keseluruhan indikator yang ada dan membaginya menjadi tiga kategori, yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Hasil penghitungan untuk menentukan kategori partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam pelaksanaan pembangunan prasarana permukiman dapat dilihat pada tabel IV.31

TABEL IV.31
PENILAIAN PARTISIPASI SWADAYA MASYARAKAT
SEBAGAI RESPON DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	NILAI	KATEGORI
1.	1.800 – 2.399	Baik
2.	1.200 – 1.799	Cukup Baik
3.	600 – 1.199	Kurang Baik

Sumber: Hasil Analisa

Jumlah nilai yang dimiliki oleh Kelurahan Potrobangsari yakni sebesar 1.619,35, apabila dilihat dari kategori keberhasilannya maka dapat dinyatakan bahwa kelurahan Potrobangsari masuk pada kategori cukup baik. Untuk kedua kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Kramat dan Kelurahan Magersari, apabila dilihat dari nilai yang dimilikinya ternyata keduanya juga masuk pada kategori yang sama pula yaitu cukup baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman di ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian sudah berjalan cukup baik.

Hasil analisa perbandingan persepsi masyarakat terhadap partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman yang diperoleh oleh masing-masing kelurahan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.32 sebagaimana berikut.

TABEL IV.32
ANALISA PERBANDINGAN PARTISIPASI SWADAYA MASYARAKAT
SEBAGAI RESPON DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	KELURAHAN	NILAI	KATEGORI
1.	Kelurahan Magersari	1,493.10	Cukup Baik
2.	Kelurahan Kramat	1,542.50	Cukup Baik
3.	Kelurahan Potrobangsari	1,619.35	Cukup Baik

Sumber: Hasil Analisa

Dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian diperoleh kenyataan bahwa Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kramat, masyarakatnya lebih berkecenderungan berpartisipasi melalui tenaga sedangkan untuk Kelurahan Potrobangsari masyarakatnya berkecenderungan berpartisipasi melalui pikiran. Untuk partisipasi berbentuk uang dan barang dalam hal ini material bangunan masih belum dapat dilakukan secara maksimal. Secara lebih jelas persentase jenis swadaya masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman dapat dilihat pada tabel IV.33 berikut.

TABEL IV.33
PERBANDINGAN PERSENTASE JENIS SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	KELURAHAN	JENIS SWADAYA									
		PIKIRAN		TENAGA		UANG		BARANG		KONSUMSI	
		NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
1	Magersari	262.07	22.22	306.90	26.02	175.86	14.91	151.72	12.87	282.76	23.98
2	Kramat	280.00	23.38	292.50	24.43	192.50	16.08	165.00	13.78	267.50	22.34
3	Potrobangsari	319.35	24.94	309.68	24.18	187.10	14.61	174.19	13.60	290.32	22.67

Sumber: Kuesioner, diolah

Apabila dilihat dari hasil perhitungan nilai pada sub pembahasan analisa perbandingan pada tiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian maka dapat dirangkum pada tabel IV.34 sebagaimana berikut.

TABEL IV.34
ANALISA PERBANDINGAN PROSES PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN

NO	ANALISA PERBANDINGAN	KELURAHAN		
		MAGERSARI	KRAMAT	POTROBANGSAN
1.	Persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman	1,048.28	1,095.00	1,022.58
2.	Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman	1,413.79	1,412.50	1,416.13
3.	Persepsi masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman	1,500.00	1,477.50	1,487.10
4.	Partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman	1,493.10	1,542.50	1,619.35

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel IV.34 diatas diperoleh kenyataan bahwa Kelurahan Magersari yang memiliki tingkat partisipasi swadaya tertinggi masyarakatnya memiliki persepsi yang tinggi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman. Meskipun mempunyai tingkat swadaya tertinggi, Kelurahan Magersari hanya mendominasi pada satu tahap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman. Kondisi ini disebabkan masyarakat Kelurahan Magersari mempunyai kecenderungan dalam berpartisipasi pembangunan prasarana di lingkungannya sering memberikan bantuan berupa uang daripada ikut terlibat secara langsung. Waktu yang ada lebih banyak dimanfaatkan untuk bekerja, karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan buruh. Terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman di

lingkungannya masyarakat Kelurahan Magersari mempunyai kecenderungan lebih mementingkan hasil pembangunan daripada proses bagaimana prasarana permukiman tersebut dapat terwujud. Meskipun dalam berpartisipasi mereka kadang-kadang memberi bantuan berupa uang, tetapi mereka lebih setuju apabila dalam pengerjaan prasarana di lingkungannya dilaksanakan dengan kerja bakti. Dari kegiatan kerja bakti yang sering dilakukan di lingkungannya mereka selalu berusaha untuk menghadirinya.

Kelurahan Kramat dengan tingkat partisipasi swadaya sedang masyarakatnya memiliki persepsi cukup tinggi terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman. Kondisi ini disebabkan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan prasarana terbuka luas. Masyarakat diberi kebebasan untuk melontarkan usulan-usulan berkenaan dengan pembangunan prasarana. Kondisi ini juga disebabkan sebagian besar masyarakat Kelurahan Kramat bekerja sebagai pegawai negeri, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kesuksesan program-program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

Kelurahan Potrobangsari dengan tingkat partisipasi swadaya rendah masyarakatnya justru memiliki persepsi yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman dan partisipasi swadaya masyarakat sebagai respon dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman. Kondisi ini merupakan suatu kenyataan bahwa kelurahan dengan swadaya rendah belum tentu selalu tertinggal dengan kelurahan yang berswadaya lebih tinggi. Kondisi ini juga tercipta karena tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap

pembangunan prasarana dengan selalu meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Keberhasilan Kelurahan Potrobangsari tersebut dipengaruhi dengan bentuk partisipasi swadaya masyarakatnya dalam pembangunan prasarana dasar permukiman yang berkecenderungan berbentuk pemikiran. Dengan banyaknya masyarakat yang memberikan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman akan semakin memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan prasarana permukiman secara lebih efektif dan efisien. Melalui pemikiran yang matang menjadikan usulan dan pendapat mereka banyak direalisasikan sesuai dengan harapan mereka.

B A B V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman pada dasarnya masyarakat sudah menilai dengan kategori cukup baik, tetapi pada proses pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar kategori penilaiannya dapat naik menjadi kategori baik.

Hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman selama ini ternyata belum melibatkan masyarakat secara maksimal. Masyarakat hanya kadang-kadang saja terlibat dalam penyusunan rencana usulan pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Pelibatan secara rutin baru dilakukan oleh anggota masyarakat yang kebetulan menjadi pengurus dalam organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungannya setingkat RT, RW atau LPM. Dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian, masyarakat Kelurahan Kramat mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap proses penyusunan rencana kegiatan dibandingkan dua kelurahan lainnya. Kondisi ini disebabkan didalam pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman masyarakat Kelurahan Kramat telah banyak dilibatkan untuk ikut menentukan jenis kegiatan yang akan diprioritaskan. Hal ini terbukti dengan direalisasikannya kegiatan pembangunan sesuai dengan usulan rencana yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan meningkatnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan juga dapat meningkatkan kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan yang membahas pelaksanaan pembangunan prasarana di lingkungannya. Selama ini kehadiran sebagian besar masyarakat hanya kadang-kadang saja. Kehadiran mereka juga belum diimbangi keaktifan berdiskusi untuk memberikan masukan, pendapat maupun usulan terhadap pembangunan prasarana permukiman di lingkungannya. Dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian, masyarakat Kelurahan Potrobangsari mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman dibandingkan dua kelurahan lainnya. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan pembangunan prasarana masyarakatnya lebih peduli dengan selalu berusaha menghadiri pada setiap pertemuan yang diadakan untuk membahas pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya dengan selalu aktif memberikan masukan, pendapat dan saran-sarannya. Keaktifan masyarakat Kelurahan Potrobangsari juga ditunjukkan dengan kehadiran mereka setiap kali diadakan kegiatan kerja bakti di lingkungannya.

Persepsi masyarakat terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman pada umumnya masyarakat telah merasa puas dan merasakan manfaatnya. Dari ketiga kelurahan yang menjadi obyek penelitian masyarakat Kelurahan Magersari mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap hasil pembangunan prasarana dasar permukiman dibandingkan dua kelurahan lainnya. Hal ini dikarenakan pada hasil pembangunan prasarana dasar permukiman wujud

fisiknya telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman, besarnya stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan akan memancing terkumpulnya swadaya masyarakat yang besar pula, tetapi pada kenyataannya besarnya stimulan tidak dapat dijadikan jaminan pada terwujudnya swadaya yang besar pula. Dengan kata lain semakin besar dana stimulan yang diberikan pemerintah maka belum tentu swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat juga semakin besar. Besarnya swadaya yang diberikan masyarakat akan sangat tergantung dengan kondisi kemampuan masyarakat setempat dan persepsi mereka terhadap pembangunan prasarana permukiman.

Swadaya masyarakat merupakan sumber kekuatan intern terhadap pembangunan prasarana yang bertumpu pada swadaya masyarakat. Semakin besar swadaya masyarakat yang terkumpul seharusnya akan semakin lebih mendukung, memperlancar dan mempermudah terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana permukiman. Dari hasil penelitian didapat kenyataan bahwa kelurahan dengan tingkat swadaya tinggi belum tentu dalam setiap tahapan pembangunan prasarana dasar permukiman berjalan lebih baik dari pada kelurahan yang memiliki tingkat swadaya yang lebih rendah. Sebaliknya kelurahan dengan tingkat swadaya yang lebih rendah dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dasar permukiman belum tentu berjalan dengan lambat dan selalu tertinggal dengan kelurahan yang memiliki swadaya masyarakat yang lebih tinggi.

5.2 Rekomendasi

- a. Terhadap kelanjutan Program P2DP sebagian besar masyarakat menghendaki untuk tetap dilaksanakannya pada tahun-tahun yang akan datang. Program ini bagi masyarakat sangat besar sekali manfaatnya untuk memenuhi prasarana permukiman yang mereka perlukan. Adanya beberapa kali kenaikan harga bahan bakar minyak telah ikut berpengaruh pada kenaikan harga-harga material bahan bangunan, sehingga untuk melaksanakan program ini di tahun-tahun yang akan datang perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah dana stimulan yang telah diberikan selama ini.
- b. Masih belum maksimalnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman perlu dicarikan jalan keluarnya untuk meningkatkan pelibatan mereka. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Melalui sosialisasi ini perlu ditekankan pengertian bahwa pembangunan prasarana permukiman tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi justru peranan masyarakatlah yang akan sangat menentukan. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah juga perlu disampaikan sehingga melalui partisipasi swadaya masyarakat diharapkan pemenuhan kebutuhan prasarana yang mereka inginkan dapat terpenuhi secara lebih cepat.
- c. Untuk dapat tercapainya pembangunan prasarana dasar permukiman yang bertumpu pada swadaya masyarakat melalui Program P2DP secara lebih efektif dan efisien maka ada hal-hal harus diperhatikan, yaitu :

- Jenis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan bentuk pembangunan yang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Apabila pembangunan dilaksanakan akan membawa dampak manfaat dan kepuasan bagi masyarakat.
 - Pembangunan prasarana diutamakan pada bentuk kegiatan pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan secara gotong royong. Pada awal pembangunan dapat dilaksanakan secara gotong royong dan pada tahap penyelesaiannya dapat di serahkan kepada ahlinya yang kalau memungkinkan diambilkan dari tenaga yang berasal dari lingkungannya.
 - Setiap anggota masyarakat diberi kebebasan menentukan jenis dan besarnya partisipasi swadaya sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Kondisi ini terutama sekali sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan mereka terhadap program pembangunan prasarana dasar permukiman.
- d. Perlu adanya studi lanjutan terhadap partisipasi swadaya masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman secara menyeluruh di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Magelang untuk menemukan strategi yang tepat guna meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R, A Ladder of Citizen Participation dalam Jay M. Stein, (ed) Classic Reading in Urban Planning : Introduction, Mc Graw Hill, Inc, New York, 1995.
- Badan Perencanaan Kota Magelang, 2001, Pedoman Umum Program Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP) di Kelurahan.
- Badan Perencanaan Kota Magelang, Daerah dalam Angka Kota Magelang Tahun 2004, 2005.
- Badan Perencanaan Kota Magelang, Laporan Pelaksanaan Monitoring/ Pemantauan Alokasi Dana di Tingkat Kelurahan Kota Magelang Tahun 2004, 2004.
- Badan Perencanaan Kota Magelang, Mengubah Harapan menjadi Kenyataan, 2004.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1988, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Branch C. Melville, 1996, Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan, terjemahan Bambang Hari Wibisono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bryant, Coralie & Louise B. White, 1982, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Jakarta, LP3ES.
- Daldjoeni, N, 1997, Seluk Beluk Masyarakat Kota, Pusparagam Sosiologi Kta dan Ekologi Sosial, Cetakan Kelima, Bandung, Penerbit Alumni.
- Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Modul Sosialisasi Pedoman Umum Perencanaan, Perancangan dan Pemrograman Prasarana Kota.
- Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum, 1987.
- Sujarto, Djoko. 2005, Kota Berkelanjutan, Bandung: Penerbit Alumni.

- Budiharjo, Eko. 1993. Kota Berwawasan Lingkungan, Bandung: Penerbit Alumni.
- Grigg, Neil, 1988, Infrastructure Engineering and Management, John Wiley & Sons.
- Sutrisno, Hadi. 2001, Metodologi Research, Yogyakarta, Penerbit: Andi.
- Jayadinata, Johara T, 1992, Tata Guna dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, Bandung, ITB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Jakarta, Bali Pustaka.
- Kartono, Kartini & Gulo, Dali, 1987. Kamus Psikologi, Bandung : Pionir Jaya
- Kartono, Kartini, 1996, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung, Penerbit : CV. Mandar Jaya.
- Khairudin, 1992, Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi dan Perencanaan, Liberty, Yogyakarta.
- Komarudin, 1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman Jakarta, Yayasan Realestat Indonesia- PT Rakasindo.
- Mussadun, 2000, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang : ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. "Tata Loka Vol 5".
- Nasir, Moh, 1999, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nasution, S, 2002, Metode Research, Jakarta: Penerbit Bumu Aksara.
- Panudju, Bambang, 1999; Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Bandung, Penerbit Alumni.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial kepada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana di Tingkat Kelurahan Tahun 2005 Kota Magelang.
- Robert Kodoatie, 2005, Pengantar Manajemen Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Rukmana DW Nana, Ir, Dr Florian Steinberg, Ir Robert Vander Hoff, Mei 1993, Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan, PT Pustaka, LP3ES, Jakarta.
- Santoso, Jo dkk, 2002, Sistem Perumahan Sosial di Indonesia, Jakarta, Center for Urban Studies (CUS) dan Ikatan Ahli Perencana (IAP).
- Sastrosaputra, Santoso, 1988, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Alumni.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Eds).1995. Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Soedarno, 1992, Ilmu Sosial Dasar : Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soedjatmoko, 1972, Pembinaan Aspek-aspek Sosiologis Kultural dalam Menunjang Modernisasi.
- Hadi, Sudharto 2005, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sugiarto, 2001, Teknik Sampling, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supardi Suparlan, 1995, Kemiskinan di Perkotaan, YOI, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wibisana Gunawan, 1989, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Peremajaan Pasar, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Walgito, Bimo, 2001, Psikologi Sosial (suatu pengantar), Yogyakarta, Andi
- Y. Slamet, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.